

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan Syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Karunia serta Perkenaan-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyampaian LPPD Kabupaten Solok pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun 2022. Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Sudah pasti dengan segala keterbatasan menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan bobot pelaksanaan tugas kami kedepan.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga senantiasa memperoleh petunjuk serta dari Ridha Allah SWT.

Amin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Arosuka, 30 Maret 2023
BUPATI SOLOK

H. EPYARDI ASDA, M.Mar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	19
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	525
BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	528
2.1 Capaian Kinerja Makro	528
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	795
BAB.III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	824
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan	824
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan	825
3.3 Permasalahan dan Kendala	833
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	833
BAB. IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	836
4.1 Urusan Pendidikan	836
4.2 Urusan Kesehatan	841
4.3 Urusan Pekerjaan Umum	851
4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	855
4.5 Urusan Trantibumlinmas	859
4.6 Urusan Sosial	863
4.7 Program dan Kegiatan	870
BAB. V PENUTUP	878
LAMPIRAN	

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran persentase capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas dua jenis yaitu maximize dan minimize.

A. Maximize

Rumus maximize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

B. Minimize

Rumus Minimize berlaku bagi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan ekspektasi kearah pencapaian realisasi indikator kinerja lebih rendah dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Target} (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Pemerintah Kabupaten Solok menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Capaian target RPJMD untuk Tahun 2022 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Target RPJMD Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	C	B	Tercapai

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	62,45	66,05	105,76
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*)	Indeks	70,50	73,02	103,57
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	3,18	4,31	135,53
5.	PDRB Perkapita (ADHK)	Rupiah	26.530.000	26.526.660	99,99
6.	PDRB Perkapita (ADHB)	Rupiah	39.010.000	39.668.150	101,69
7.	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	10.344.000	10.539.000	102,35
8.	PDRB Sektor pertanian	Rupiah	3.724.358	3.829.230	102,82
9.	Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	Persentase	2,4	0,03	1,25
10.	PDRB sektor perdagangan	Rupiah	1.196.292	1.223.140	102,24
11.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persentase	0,80	0,82	102,5
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,53	5,89	69,98
13.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (60,20)	B (60,42)	100,37
14.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Kategori	B (69,00)	B (66,95)	97,03
15.	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,16	-	-
16.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Tercapai
17.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	62	45,80	73,87
18.	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	Tercapai
19.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,5	3,12	124,8
20.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,45	3,39	98,26
21.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	62	54	87,1
22.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,99	70.02	100.04
23.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,90	7,89	99,87
24.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,7	13,30	97,08
25.	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,63	2,12	119,39
26.	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,38	96,19	99,80
27.	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.01	69.19	100.26
28.	Persentase Penduduk Miskin	Persentase	7,31	7,12	102,59
29.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,678	0,691	101,92

Berdasarkan Tabel 1 di atas dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok pada Tahun 2022 dari 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, 15 Indikator melebihi target dari 100%, 3 Indikator tercapai dan 10 Indikator tidak mencapai target serta 1 Indikator belum diketahui hasilnya.

Masing-masing Indikator Kinerja Utama Kabupaten Solok Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan 6 dimensi IPKD dengan tahapan sebagai berikut:

Dimensi 1: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2: Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3: Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4: Penyerapan anggaran

Dimensi 5: Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6: Opini BPK

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

TOTAL INDEKS IPKD = Dimensi 1 + Dimensi 2 + Dimensi 3 + Dimensi 4 + Dimensi 5 + Dimensi 6

atau

TOTAL INDEKS IPKD = D.1 + D.2 + D.3 + D.4 + D.5 + D.6

Dimana:

1. D.1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. D.2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
3. D.3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. D.4 = Penyerapan anggaran
5. D.5 = Kondisi keuangan daerah
6. D.6 = Opini BPK

I. Indeks Dimensi 1 = Skor rata-rata x bobot

Dimana:

1. D.1.1 = Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, memperoleh hasil pengukuran = 0.000
2. D.1.2 = Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.000
3. D.1.3 = Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.006
4. D.1.4 = Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, memperoleh hasil pengukuran = 0.000
5. D.1.5 = Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD, memperoleh hasil pengukuran = 0.003
6. Bobot = 15

Jadi: Indeks D.1 = Skor rata-rata x bobot

$$D.1 = \frac{D.1.1 + D.1.2 + D.1.3 + D.1.4 + D.1.5}{5} \times 15$$

$$D.1 = \frac{0.000 + 0.000 + 0.006 + 0.000 + 0.003}{5} \times 15$$

$$D.1 = 0.025$$

II. Indeks Dimensi 2 = Skor rata-rata x bobot

Dimana:

1. D.2.1 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.2.2 = Alokasi jumlah belanja untuk fungsi kesehatan, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.2.3 = Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
4. D.2.4 = Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal, memperoleh hasil pengukuran = 0.7241
5. Bobot = 20

Jadi: Indeks D.2 = Skor rata-rata x bobot

$$D.2 = \frac{D.2.1 + D.2.2 + D.2.3 + D.2.4 + D.2.5}{4} \times 20$$

$$D.2 = \frac{1 + 1 + 1 + 0.7241}{4} \times 20$$

$$D.2 = 18.6207$$

III. Indeks Dimensi 3 = Skor rata-rata x bobot

Dimana:

1. D.3.1 = Ketepatan waktu, memperoleh hasil pengukuran = 0
2. D.3.2 = ketersediaan/keteraksesan, memperoleh hasil pengukuran = 0
3. Bobot = 15

Jadi: Indeks D.3 = Skor rata-rata x bobot

$$D.3 = \frac{D.3.1 / 29 + D.3.2 / 29}{2} \times 15$$

$$D.3 = \frac{0/29 + 0/29}{2} \times 15$$

$$D.3 = 0$$

IV. Indeks Dimensi 4 = Skor rata-rata x bobot

Dimana:

1. D.4.1 = Penyerapan anggaran belanja operasional, memperoleh hasil pengukuran = 1
2. D.4.2 = Penyerapan anggaran belanja modal, memperoleh hasil pengukuran = 1
3. D.4.3 = Penyerapan anggaran belanja tidak terduga, memperoleh hasil pengukuran = 0
4. D.4.4 = Penyerapan anggaran belanja transfer, memperoleh hasil pengukuran = 1
5. Bobot = 20

Jadi: Indeks D.4 = Skor rata-rata x bobot

$$D.4 = \frac{D.4.1 + D.4.2 + D.4.3 + D.4.4}{4} \times 20$$

$$D.4 = \frac{1 + 1 + 0 + 1}{4} \times 20$$

$$D.4 = 15$$

V. Indeks Dimensi 5 = Hasil diukur berdasarkan 6 indikator kondisi keuangan daerah mulai dari kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.

Jadi Indeks D.5 = 3.8389

VI. Indeks Dimensi 6 = skor OPINI BPK x bobot

Nilai:

1. WTP = 1
2. Bobot = 15

Jadi: Indeks D.6 = skor opini BPK x bobot

$$D.6 = 1 \times 15$$

$$D.6 = 15$$

$$\begin{aligned} \text{TOTAL INDEKS IPKD} &= \text{D.1} + \text{D.2} + \text{D.3} + \text{D.4} + \text{D.5} + \text{D.6} \\ &= 0.0251 + 18.6207 + 0 + 15 + 3.8389 + 15 \\ &= 52.4847 \\ &= \text{PERLU PERBAIKAN (B)} \end{aligned}$$

Hasil penilaian dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu:

1. Kategori A: Baik
2. Kategori B: Perlu Perbaikan
3. Kategori C: Sangat Perlu Perbaikan

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	B	Tercapai

Sumber: IPKD BPP Kemendagri. 2022

Berdasarkan table 1.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tahun 2022 tercapai, dimana pada tahun 2022 target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai C dan terealisasi nilai B dengan capaian kinerja Tercapai atau melebihi target.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 1.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	Tercapai	Tercapai	Tercapai	A	Belum tercapai

Sumber: IPKD BPP Kemendagri/ 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya selalu mendapatkan nilai yang memuaskan yaitu nilai B, dan jika capaian kinerja dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya tercapai serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target RPJMD (tahun 2026) yaitu nilai A maka capaian kinerja belum tercapai.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT.

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B

Sumber: IPKD BPP Kemendagri/2022

Dari tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperoleh oleh Provinsi Sumatera Barat bernilai B dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Solok bernilai B.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA.

Tercapainya target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, didukung dengan:
 - a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, didukung dengan:
 - a. Mengalokasikan belanja fungsi pendidikan 35.26% dari APBD.
 - b. Mengalokasikan belanja fungsi kesehatan 14.44% dari APBD.

- c. Mengalokasikan jumlah belanja infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer 36.33% dari dana transfer umum.
3. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, didukung dengan:
 - a. Dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
 - b. Dokumen pengelolaan keuangan daerah telah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
4. Penyerapan Anggaran, didukung dengan:

Data penyerapan anggaran diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran dalam APBD sesuai PP No. 12 Tahun 2019, meliputi penyerapan:

 - Anggaran belanja operasional
 - Anggaran belanja modal
 - Anggaran belanja tidak terduga
 - Anggaran belanja transfer
5. Kondisi Keuangan Daerah, didukung dengan:
 - a. Kemandirian keuangan
 - b. Fleksibilitas keuangan
 - c. Solvabilitas operasional
 - d. Solvabilitas jangka pendek
 - e. Solvabilitas jangka panjang
 - f. Solvabilitas layanan
6. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan, didukung dengan keberhasilan perolehan Opini WTP lebih dari 3 tahun terakhir secara berturut-turut. Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah:

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok pada tahun 2022 Badan Keuangan Daerah didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dan didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu serta sarana dan prasarana yang ada.

Untuk sumber daya manusia Badan Keuangan Daerah didukung oleh ASN dan THL yaitu Bidang Perencanaan Anggaran Daerah 8 orang ASN dan 5 orang THL, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 12 orang ASN dan 6 orang THL. Untuk sarana dan prasarana didukung oleh kendaraan roda

empat dan kendaraan roda dua. Untuk mencapai kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini persentase anggaran yang digunakan sebesar 82,13%.

Tabel 1.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	B	Tercapai	4.380.357.400	3.637.202.817	83,03%
				Rata-rata capaian		83,03%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						16,97%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						120,43%

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian opini Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan capaian kinerja Tercapai atau 100% dengan penyerapan anggaran 83.03% maka terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 16,97% dan tingkat efektifitas 120,43%.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan serta anggaran untuk mencapai target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel .1.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Capaian (%)
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.800.478.100,00	2.319.349.737,00	82.82
I	Kegiatan Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	2.249.637.100,00	1.910.009.162,00	84.90
II	Kegiatan Pengelolaan data implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	550.841.000,00	409.340.575,00	74.31
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.579.879.300,00	1.317.853.080,00	81.43
III	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.162.216.249,00	1.515.844.249,00	81.43
Jumlah		4.380.357.400	3.637.202.817	83,03

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN.

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatkan Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan cara:
 - a. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RPJMD dan RKPD.
 - b. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - c. Memperhatikan nomenklatur program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
 - d. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKPD dan KUA-PPAS.
 - e. Memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD.
2. Untuk lebih mengupayakan Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, dengan cara:
 - a. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20 % dari APBD.
 - b. Mengalokasikan jumlah belanja untuk fungsi kesehatan minimal 10 % dari APBD.
 - c. Mengalokasikan jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer minimal 25 % dari dana transfer umum.
 - d. Mengalokasikan belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
3. Untuk mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan cara:
 - a. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
 - b. Mengupayakan agar dokumen pengelolaan keuangan daerah diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan sistem informasi pemerintahan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran.
5. Mengusahakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan Kondisi Keuangan Daerah dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
6. Mempertahankan kualitas opini WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan dengan cara menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu.

2. INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH

Pengertian indikator dan formulasi indikator

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Indeks Infrastuktur Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Infrastuktur Daerah	62,45	66,05	105,76

Sumber: Dinas PUPR, Dinas PRKPP dan Dinas LH

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 62,45 dan terealisasi sebesar 66,05 dengan capaian kinerja sebesar 105,76 %.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 2.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Infrastuktur Daerah	NA	68,43	66,05	NA	111,11	105,76	67,14	98,37

Sumber: Dinas PUPR, Dinas PRKPP dan Dinas LH

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** sebesar 5,35%, adapun penyebab penurunannya karena persentase infrastuktur dasar rendah, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 67,14 maka capaian kinerja sebesar 98,37%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Tercapainya target Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

- Tersedianya SDM yang sudah cukup memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja.
- Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya sudah cukup baik (rata-rata berpendidikan sarjana).

- c. Adanya struktur organisasi yang cukup jelas pembagian tugas dari masing-masing bidang.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik diantara masing-masing unit/bidang organisasi;
- e. Program kerja berpedoman pada Tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap aparatur yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
- f. Tercapainya target indikator Ketaatan terhadap tata Ruang tahun 2022 adalah sering dilakukannya sosialisasi kepada seluruh camat, wali nagari se kabupaten solok mengenai ketaatan terhadap tata ruang dan tingginya kesadaran masyarakat akan mantaati aturan tata ruang yang berlakuBukit dukung (foto atau dokumen lainnya)
- g. Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2022 tentang bantuan rehabilitasi rumah dan pembangunan rumah bencana baru terbit pada triwulan ke-3.
- h. Belum terbitnya SK Bupati Solok kebencanaan daerah.
- i. Kriteria bantuan rehabilitasi rumah dan pembangunan baru yang terdapat dalam peraturan Bupati belum ada yang memenuhi persyaratan
Bukit dukung
- j. Berdasarkan laporan Pelaksanaan kegiatan, Kabupaten solok tidak ada rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah karena belum adanya kegiatan relokasi rumah bencana yang diakomodir pada APBD tahun 2022 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- k. Peraturan Bupati terkait bantuan (RTLH) terbit pada triwulan 3
- l. Pada tahun anggaran 2022 berdasarkan kewenangan penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang terdapat dalam SK Nomor: 653-389-2022 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten solok, hanya terdapat satu Nagari yang ditangani, yaitu berupa pembangunan drainase lingkungan di Taratak Baru Palanca Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh. Sehingga menyebabkan target tidak tercapai. Target tahunan akan tercapai apabila tersedia anggaran dalam penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan kabupaten solok.Terdapat 7 indikator kawasan kumuh berupa bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

- m. Tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok dimana Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan mendapat nilai baik, sehingga indeks IKLH Kabupaten Solok mendapat nilai baik
- n. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa izin lingkungan atau Amdal sebagai salah satu syarat pengurusan izin usaha. Selain itu juga diterbitkan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Solok, yang baik secara langsung dan tidak langsung sangat berperan dalam menentukan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok. Beberapa diantaranya sebagai berikut:
 - a. Regulasi terkait pengelolaan persampahan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Solok Tahun 2018 – 2025.

Dengan terbitnya regulasi terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok ada beberapa Nagari yang mengimplementasikan regulasi tersebut ke dalam peraturan nagari seperti Nagari Indudur, Nagari Sungai Durian, Nagari Koto Baru, Nagari Cupak dan Nagari Saniangbaka.

- b. Regulasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 135 – 2017, tentang Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penunjukan Tim Mediator Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 464 – 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok .
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-096-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah di Kabupaten Solok Tahun 2021.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-095-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Solok Tahun 2021.
 - Keputusan Bupati Solok Nomor 440-323-2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-196-2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-488-2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia.

Terkait regulasi perlindungan dan pengelolaan LH di Kabupaten Solok semua stakeholder berperan aktif untuk mengimplementasikan regulasi dimaksud dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah aktif mengikuti program Adiwiyata dimana kegiatan ini bertujuan agar guru dan siswa menerapkan secara sadar Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Pelaku usaha secara sadar tidak melanggar aturan dalam pengelolaan lingkungan.

- c. Adanya fasilitasi data dan peralatan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memadai terutama terkait data IKA, IKU dan IKL. Peralatan yang difasilitasi oleh Kementerian LHK adalah alat pengukuran udara yaitu passive sampler yang nantinya hasil pengukuran menjadi data Indeks Kualitas Udara Kabupaten.
- d. Baiknya fungsi koordinasi antar lembaga pengawas lingkungan hidup dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder lainnya mulai dari masyarakat hingga pengusaha. Seperti akan adanya pengaduan dari masyarakat ke DLH Kabupaten Solok apabila adanya pelaku usaha yang mencemari lingkungan
- e. Semakin aktifnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Fungsi pengawasan mempunyai peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan dan pencemaran akibat aktivitas yang dilakukan. Seperti Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka

Tambang Solok Selatan Indonesia karena perusahaan mencemari lingkungan sehingga terganggunya kualitas sungai.

f. Presentase pengurangan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 7.001.79 Ton atau 12.16 %. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat seperti adanya pengembangan budidaya maggot dan pengelolaan bank sampah di beberapa nagari. Untuk Tahun 2022 Nagari yang aktif mengembangkan budidaya maggot adalah Nagari Cupak, Alahan Panjang, Koto Baru, Batu Bajanjang, Tanjung Balik, Simp. Tanjung Nan Ampek, Nagari Salimpek dan Nagari Batang Barus. Sedangkan untuk Bank Sampah yang aktif yaitu:

- Bank Sampah Razqana di Nagari Supayang,
- Bank Sampah Lansia Panyalakalan Kec. Kubung.
- Bank Sampah Salimpek Bersih, Nagari Salmpek Kec. Lembah Gumanti
- Bank Sampah Rukio Bersih Koto Hilalang Kec. Kubung
- Bank Sampah Cinta Bersih Nagari Cupak Kec. Gunung Talang
- Bank Sampah Hijau Lestari Nagari Selayo Kec. Kubung
- Bank Sampah Ka Saro Nagari Janjung Balik Kec. X Koto Diatas
- Bank Sampah Sarasah Mancah Nagari Koto Gaek Kec. Gunung Talang
- Bank Sampah Sirukam Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki
- Bank Sampah Kinari Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi
- Bank Sampah Kelok Salayang Nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang
- Bank Sampah Pinang Saiyo Nagari Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak
- Bank Sampah Jirek Bajanjang Batu Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Indeks Infrastuktur Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2.4

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Indeks Infrastuktur Daerah

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Indeks Infrastuktur Daerah	62,45	66,05	105,76 %	144.441.956. 679	128.417.601. 957	88,91%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						11,09 %
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						118,9 5%

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa Indikator Indeks Infrastuktur Daerah pada Tahun 2022 target kinerja sebesar 62,45 dan terealisasi sebesar 66,05 dengan capaian kinerja sebesar 105,76% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 144.441.956.679 dan terealisasi sebanyak Rp. 128.417.601.957 dengan capaian 88,91% dan terjadi efisiensi sebesar 11,09% maka didapat efektifitas 118,95%.

E. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Infrastuktur Daerah Kabupaten Solok adalah

1. Tingkat Kemantapan Jalan
 - Kegiatan Pembangunan Jalan
seperti: Coran Jalan, Bahu Jalan, Dam Jalan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan
Contoh: Pelapisan ulang Jalan Aspal
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
Contoh: Penambalan Jalan, Perambahan semak perdu Jalan
 - Pembangunan Jembatan
Seperti: Pembuatan Abutmen Jembata
 - Penggantian Jembatan
Seperti: Pembangunan Ulang Jembatan Lama yang sudah tidak layak
 - Rehabilitasi Jembatan
Seperti: Mencat Gelagar dan Injeksi Pondasi Jembatan.
2. Rasio Luas DI Kewenangan Kabupaten yang dilayani Jaringan Irigasi
 - Kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan adalah pengerjaan Dam Irigasi, Membuat Saluran Irigasi, membuat embung penampung air, dan pemeliharaan Irigasi berupa perambahan untuk membersihkan irigasi.
3. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum terindungi
 - Memasang perpipaan ke rumah-rumah
4. Persentase Rumah Tangga dengan akses Sanitasi yang layak

- Pembangunan MCK IPAL Komunal, IPAL Individual
 - Drainase Lingkungan
5. Pengolahan Tinja
 6. Pencapaian target nilai IKLH tidak terlepas dari adanya dukungan dan kinerja dari instansi lain yang mendukung program lingkungan hidup seperti program Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat juga menjadi indikator kinerja di Dinas Kesehatan serta program pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup secara tidak langsung juga menjadi indikator kinerja Dinas PUPR dan Dinas PRKPP.
 7. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarela wan tanggap Bencana ini yaitu edukasi dan informasi bagi masyarakat tentang rumah terdampak bencana serta peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni.
 8. Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan beberapa faktor yaitu jumlah rumah tidak layak huni dan letak geografis nagari tersebut yang rawan bencana alam. Ada 10 nagari yang di jadikan objek sosialisasi kegiatan ini yaitu nagari sulit air, Tanjung balik, Taruang-Taruang, bukit bais, Bukit kandung, Aie dingin, Batang barus, Salimpek, Aia Batumbuak, dan Nagari Singkarak.
 9. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban bencana kegiatan ini membantu masyarakat yang terkena bencana alam yang mengakibatkan kerusakan terhadap komponen struktur maupun non struktur rumah. Jenis pelayanan dasar Pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan ketentuan:
 - a. Pada saat masa pasca bencana
 - b. Surat penetapan bencana dari Bupati
 - c. Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten
 10. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain, Tidak adanya bencana yang bias ditetapkan oleh kepala daerah sehingga untuk capaian Pembangunan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tidak dapat disajikan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dengan segera melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait seperti BPBD dan Bappeda.
 11. Survei Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh
Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 050-335-2019 yang menyebutkan bahwa luas kawasan kumuh di Kab. Solok adalah 574 ha yang tersebar di 37 Nagari di Kabupaten Solok yang terbagi atas

3 kewenangan penanganan yaitu kewenangan pusat dengan luas kawasan kumuh diatas 15 Ha, kewenangan provinsi dengan luas kawasan kumuh sebesar 10-15 Ha dan untuk kewenangan kabupaten dengan luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha. Namun pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap SK Bupati tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Solok. Pada SK Bupati Solok tahun 2019 hanya terdapat satu nagari yang termasuk kewenangan penanganan kabupaten solok yaitu nagari Garabak Data. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Solok Nomor: 653-389-2022 terdapat 23 lokasi yang tersebar di 22 nagari yang termasuk kedalam kewenangan kabupaten Solok dalam penanganan kawasan kumuh.

12. Untuk tahun 2022 hanya terdapat satu nagari yang dilakukan penanganan terhadap kawasan kumuh di bawah 10 Ha yaitu nagari salayo tanang bukit sileh. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan berupa pembangunan Drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m. Berdasarkan SK Bupati Solok Nomor: 653-389-2022 luas kawasan kumuh nagari salayo tanang bukit sileh sebesar 8,28 Ha.
13. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kegiatan ini merupakan upaya pemerintah kabupaten solok dalam mewujudkan kesejahteraan social dengan menghasilkan database rumah tidak layak huni secara kompleks. Pada tahun 2022 DPRKPP melaksanakan pendataan rumah tidak layak huni di kabupaten solok. Adapun langkah pelaksanaan pendataan dimulai dengan permintaan data kenagari-nagari di kabupaten solok.maka selanjutnya DPRKPP melakukan pendataan dan verifikasi data yang diberikan oleh nagari. Hasil dari pendataan dan verifikasi nantinya akan dimasukkan ke database rumah tidak layak huni kabupaten solok.

Tabel. 2.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	PROGRAM INFRASTRUKTUR DASAR BERKONDISI BAIK	140.055.495.725	124.665.834.798	89,01
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	755.473.000	712.123.617	94,26
C	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	433.889.200,00	244.457.808,00	56,34
D	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	896.876.255,00	548.575.521,00	61,17

E	PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN	2.300.222.499	2.246.610.213	97.66 %
JUMLAH		144.441.956.679	128.417.601.957	88,91

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Infrastuktur Daerah Kabupaten Solok adalah Seiring dengan keberhasilan pencapaian target kinerja, DLH Kabupaten Solok selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja yang tertuang dalam Rencana Tindak Lanjut antara lain:

1. Rencana tindak lanjut perbaikan untuk pencapaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan ditahun selanjutnya adalah Memprioritaskan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Jalan Kabupaten sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Kegiatan Pembangunan Jalan diprioritaskan untuk meningkatkan kondisi jalan, sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan diprioritaskan untuk menjaga kondisi jalan yang ada.
2. Tindak lanjut Untuk meningkatkan realisasi kinerja maka perlu ditingkatkan lagi kondisi infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan kabupaten melalui pemeliharaan dan optimalisasi fungsi irigasi. Selain itu perlu perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, realistis dan sesuai kebutuhan.
3. maka langkah rencana tindak lanjut yang diperlukan adalah melakukan optimalisasi dan fasilitasi jaringan air bersih yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih dapat meningkat dan sesuai target.
4. Untuk dapat menetapkan PERDA RTRW yang terbaru.
5. Masing- masing wilayah / kawasan di buatkan RDTR sampai RTBL.
6. Untuk dapat mangadakan sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai aturan tata ruang.
7. Untuk dapat membuat aturan mengenai sanksi / rewards Pemanfaatan Tata Ruang.
8. Untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang canggih untuk pengukuran dilapangan. Eks: GPS geodetik.
9. Untuk SDM pada Indikator Ketaatan Terhadap tata ruang diutamakan Jurusan Planologi, Geografi, Arsitek , Teknis Sipil, dan Geodesi.
10. Membuat Praga Modul / Banner yang lebih simple dan mudah dimengerti oleh masyarakat

11. Mengusulkan kriteria penerima bantuan baik rumah berdampak bencana dengan kategori rusak sedang dan rusak berat. Hal ini agar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat membantu rumah yang terkena bencana.
12. Tersedianya anggaran dalam penanganan kawasan kumuh kewenangan kabupaten.
13. Untuk dapat memperbaiki truck tinja yang sudah rusak guna untuk penyedotan tinja.
14. Menambah lokus kegiatan sosialisasi tentang kegiatan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;
15. Menetapkan dan menambah jumlah titik pantau dan frekuensi pemantauan yang diiringi dengan pembiayaan yang memadai;
16. Meningkatkan koordinasi *stakeholder* dan peran serta masyarakat, serta selektif dalam penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
17. Memperkuat penerapan dan penegakan hukum lingkungan;
18. Penyebarluasan informasi Kebijakan Strategis Daerah pengelolaan sampah melalui sosialisasi kepada masyarakat;
19. Melaksanakan inovasi di bidang lingkungan hidup antara lain:
 - a. Pemberian informasi terkait program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (program adiwiyata) melalui penyajian komunikasi visual yang lebih interaktif.
 - b. Penayangan di videotron mengenai perilaku ramah lingkungan (pengelolaan sampah dengan pola 3R) melalui kerjasama dengan Dinas Kominfo Kab.Solok.
20. Penayangan di videotron tentang keberhasilan pencapaian individu, instansi dan lembaga dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
21. Membangun Kampung Iklim;
22. Menggalakkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah (Adiwiyata);
23. Melakukan Pengujian Sampel Air di 19 titik sampling;
24. Pemasangan Alat Passive Sampler (alat dikirim ke pusat untuk dianalisa);
25. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan persampahan;
26. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan danau dan sungai di Kabupaten Solok
27. Meningkatkan Pengawasan ke Perusahaan

3. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup berdasarkan indikator kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.

Formulasi yang digunakan dalam menentukan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel. 3.1

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	73,02	103,57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,50 dan terealisasi sebesar 73,02 dengan capaian kinerja sebesar 103,57%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 3.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,36	73,94	73,02	100,45	105,18	103,57	71,60	101,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, adapun penyebab terjadi penurunan

capaian kinerja adalah kurang maksimalnya kegiatan dalam peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 71,60 maka capaian kinerja sebesar 101, 98%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel. 3.3

Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	84.30	74.98	73,02

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2022

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok Tahun 2022 masih berada dibawah Provinsi yaitu 74,98 dan Nasional sebesar 84,30.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Tercapainya/ tidak tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok dimana Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan mendapat nilai baik, sehingga indeks IKLH Kabupaten Solok mendapat nilai baik
2. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menegaskan bahwa izin lingkungan atau Amdal sebagai salah satu syarat pengurusan izin usaha. Selain itu juga diterbitkan kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Solok, yang baik secara langsung dan tidak langsung sangat berperan dalam menentukan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Solok. Beberapa diantaranya sebagai berikut:
 - a. Regulasi terkait pengelolaan persampahan
 - Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
 - Peraturan Bupati Solok Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kabupaten Solok Tahun 2018-2025.

Dengan terbitnya regulasi terkait pengelolaan persampahan di Kabupaten Solok ada beberapa Nagari yang mengimplementasikan regulasi tersebut ke dalam peraturan nagari seperti Nagari Indudur, Nagari Sungai Durian, Nagari Koto Baru, Nagari Cupak dan Nagari Saniangbaka.

b. Regulasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH

- Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 135 – 2017, tentang Pembentukan Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Penunjukan Tim Mediator Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440 – 464 – 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Solok .
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-096-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah di Kabupaten Solok Tahun 2021.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-095-2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Solok Tahun 2021.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-323-2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terhadap Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-196-2021 tanggal 10 Mei 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.
- Keputusan Bupati Solok Nomor 440-488-2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia.

Terkait regulasi perlindungan dan pengelolaan LH di Kabupaten Solok semua stakeholder berperan aktif untuk mengimplementasikan regulasi dimaksud dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah aktif mengikuti program Adiwiyata dimana kegiatan ini bertujuan agar guru dan siswa menerapkan secara

sadar Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah. Pelaku usaha secara sadar tidak melanggar aturan dalam pengelolaan lingkungan.

3. Adanya fasilitasi data dan peralatan dari Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memadai terutama terkait data IKA, IKU dan IKL. Peralatan yang difasilitasi oleh Kementerian LHK adalah alat pengukuran udara yaitu passive sampler yang nantinya hasil pengukuran menjadi data Indeks Kualitas Udara Kabupaten.
4. Baiknya fungsi koordinasi antar lembaga pengawas lingkungan hidup dan masyarakat serta stakeholder lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, tapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder lainnya mulai dari masyarakat hingga pengusaha. Seperti akan adanya pengaduan dari masyarakat ke DLH Kabupaten Solok apabila adanya pelaku usaha yang mencemari lingkungan
5. Semakin aktifnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan. Fungsi pengawasan mempunyai peranan penting dalam melakukan evaluasi terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi kerusakan dan pencemaran akibat aktivitas yang dilakukan. Seperti Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT.Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia karena perusahaan mencemari lingkungan sehingga terganggunya kualitas sungai.
6. Presentase pengurangan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 7.001.79 Ton atau 12.16 %. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya penanganan sampah secara mandiri oleh masyarakat seperti adanya pengembangan budidaya maggot dan pengelolaan bank sampah di beberapa nagari. Untuk Tahun 2022 Nagari yang aktif mengembangkan budidaya maggot adalah Nagari Cupak, Alahan Panjang, Koto Baru, Batu Bajanjang, Tanjung Balik, Simp. Tanjung Nan Ampek, Nagari Salimpek dan Nagari Batang Barus. Sedangkan untuk Bank Sampah yang aktif yaitu:
 - Bank Sampah Razqana di Nagari Supayang,
 - Bank Sampah Lansia Panyalakalan Kec. Kubung.
 - Bank Sampah Salimpek Bersih, Nagari Salmpek Kec. Lembah Gumanti
 - Bank Sampah Rukio Bersih Koto Hilalang Kec. Kubung
 - Bank Sampah Cinta Bersih Nagari Cupak Kec. Gunung Talang
 - Bank Sampah Hijau Lestari Nagari Selayo Kec. Kubung

- Bank Sampah Ka Saro Nagari Janjung Balik Kec. X Koto Diatas
 - Bank Sampah Sarasah Mancah Nagari Koto Gaek Kec. Gunung Talang
 - Bank Sampah Sirukam Nagari Sirukam Kec. Payung Sekaki
 - Bank Sampah Kinari Nagari Kinari Kec. Bukit Sundi
 - Bank Sampah Kelok Salayang Nagari Batang Barus Kec. Gunung Talang
 - Bank Sampah Pinang Saiyo Nagari Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak
 - Bank Sampah Jirek Bajanjang Batu Nagari Batu Banyak Kec. Lembang Jaya .
7. Pencapaian target nilai IKLH tidak terlepas dari adanya dukungan dan kinerja dari instansi lain yang mendukung program lingkungan hidup seperti program Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat juga menjadi indikator kinerja di Dinas Kesehatan serta program pembangunan infrastruktur bidang lingkungan hidup secara tidak langsung juga menjadi indikator kinerja Dinas PUPR dan Dinas PRKPP.

Seiring dengan keberhasilan pencapaian target kinerja, DLH Kabupaten Solok selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerja yang tertuang dalam Rencana Tindak Lanjut antara lain:

1. Menambah lokus kegiatan sosialisasi tentang kegiatan lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha;
2. Menetapkan dan menambah jumlah titik pantau dan frekuensi pemantauan yang diiringi dengan pembiayaan yang memadai;
3. Meningkatkan koordinasi *stakeholder* dan peran serta masyarakat, serta selektif dalam penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Memperkuat penerapan dan penegakan hukum lingkungan;
5. Penyebarluasan informasi Kebijakan Strategis Daerah pengelolaan sampah melalui sosialisasi kepada masyarakat;
6. Melaksanakan inovasi di bidang lingkungan hidup antara lain:
 - a. Pemberian informasi terkait program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (program adiwiyata) melalui penyajian komunikasi visual yang lebih interaktif.
 - b. Penayangan di videotrone mengenai perilaku ramah lingkungan (pengelolaan sampah dengan pola 3R) melalui kerjasama dengan Dinas Kominfo Kab.Solok.
7. Penayangan di videotrone tentang keberhasilan pencapaian individu, instansi dan lembaga dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Dalam menjalankan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pengelolaan lingkungan di Kabupaten Solok berbagai program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target kinerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok 2016-2021. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DLH saat ini perlu dilakukan efisiensi karena adanya keterbatasan alokasi anggaran serta sarana dan prasarana pendukung. Adapun efisiensi yang telah dilakukan antara lain:

1. Efisiensi pada Operasional Pelayanan Persampahan

Sarana pelayanan persampahan yang dimiliki saat ini terdiri dari 7 unit dumptruck, 2 unit armroll truck dan 3 unit becak motor. Sarana ini dimanfaatkan untuk melayani 70 titik layanan sampah baik domestik (rumah tangga/permukiman), komersil (pasar) dan institusi (kantor pemerintah, sekolah, perusahaan). Dengan kondisi wilayah pelayanan dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia, Pemerintah Daerah berupaya memberikan pelayanan secara optimal untuk penanganan (pengangkutan) sampah di seluruh wilayah Kabupaten Solok. Wilayah pelayanan persampahan di Kabupaten Solok untuk tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.13.

Tabel. 3.5.13

Lokasi pelayanan transportasi persampahan Kabupaten Solok, 2022

No	Wilayah Pelayanan	Jumlah Titik Pelayanan
1	Pasar	10
2	Nagari	4
3	Perumahan	13
4	Perusahaan	4
5	SKPD	30
6	Puskesmas	5
7	Bank	1
8	Sekolah	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2022

Berdasarkan data yang tersedia dari Aplikasi SIPSN Kabupaten Solok tahun 2022 sampah terkelola adalah sebesar 6.253.91 ton. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan wilayah pelayanan di Nagari yang ada di Kabupaten Solok serta pengangkutan sepanjang jalan (penyisiran) yang dilakukan di Nagari Alahan Panjang, Kota Baru , Nagari Singkarak.

Perbandingan jumlah sampah yang terkelola pada tahun 2021 dan 2022 terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Solok

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	391.467	397.636
2	Jumlah Timbulan Sampah (ton)	55.506,2	57.558.60
3	Jumlah Penanganan (pengangkutan) Sampah (ton)	6.100	6.253.91
4	Jumlah Pengurangan Sampah (ton)	75.809,9	7.001.79
5	Persentase Sampah Terkelola %	71,56	72.18

Sumber: SIPSN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2022 *satu timbulan sampah = 0,4 kg/org/hari

Dari Tabel 3.4 terlihat adanya peningkatan persentase sampah yang terkelola sebesar 3%. Sehingga dapat disimpulkan meskipun sarana pengangkutan sampah terbatas dari tahun ke tahun, akan tetapi pelayanan persampahan tetap berjalan dengan baik.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia(SDM)

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia. Dengan adanya keterbatasan jumlah SDM di Dinas Lingkungan Hidup maka pelaksanaan pekerjaan dioptimalkan melalui bantuan tenaga harian lepas sebagai petugas kebersihan lapangan dalam pelayanan pengangkutan sampah ke TPA .

Pada tahun 2022 petugas kebersihan yang dapat dioptimalkan sebanyak 38 personil.

3. Efisiensi Anggaran

Untuk efisiensi dan efektifitas anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,50	73,02	103,57	2.300.222.499	2.246.610.213	97,66%
				Rata-rata capaian		97,66%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						2,34%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						106,05%

Pada tabel 3.5 dapat dilihat Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian opini Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana

dan prasarana yang ada. Dengan capaian kinerja Tercapai atau 103,57% dengan penyerapan anggaran 97,66% maka terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 2,34% dan tingkat efektifitas 106,05%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok adalah

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Pemenuhan nilai indeks kualitas air di Kabupaten Solok ditentukan dari kualitas air sungai. Pengukuran kualitas air sungai ditentukan oleh 8 parameter kunci, yaitu:

- a. DO (*dissolve oxygen*), merupakan kadar oksigen yang terlarut dalam perairan. Semakin tinggi nilai DO maka kondisi air akan semakin baik.
- b. TSS (*Total Suspended Solid* atau padatan tersuspensi total), merupakan padatan yang menyebabkan kekeruhan air dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas pengairan. Padatan dalam air seperti lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfide, ganggang, bakteri dan jamur.
- c. BOD (*Biological Oxygen Demand*), merupakan tingkat permintaan kadar oksigen oleh makhluk hidup dalam air. Semakin tinggi nilai BOD maka semakin banyak mikroba yang menyebabkan semakin turun nilai DO, sehingga semakin rendah kualitas air.
- d. COD (*Chemical Oxygen Demand*), merupakan tingkat kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen. Semakin tinggi nilai COD maka semakin turun nilai DO, sehingga semakin rendah kualitas air.
- e. Total Fosfat, untuk mengetahui kandungan fosfor dalam air. Semakin tinggi kandungan fosfor maka kualitas air semakin rendah.
- f. Fecal Coliform, bakteri coliform merupakan indikator untuk menentukan suatu perairan telah terkontaminasi atau tidak oleh patogen. Semakin tinggi jumlah coliform di perairan maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran air.
- g. Total Coliform, merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan aman atau tidaknya air untuk dikonsumsi. Semakin tinggi jumlahnya dalam perairan maka kemungkinan adanya bakteri patogen semakin besar.
- h. Derajat keasaman (pH) juga merupakan salah satu bagian dari kualitas kimia yang dapat menurunkan kualitas air. pH air netral adalah berkisar antara 6,8-7,0 jika pH air berada dibawah pH 7 maka air berada dalam keadaan asam.

Perhitungan IKA dilakukan melalui penentuan Status Mutu Air di setiap titik pemantauan. Indeks Kualitas Air (IKA) akan didapat setelah dihitung melalui pemenuhan mutu air dikalikan bobot nilai indeks. Perhitungan status mutu air sungai dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Metode Indeks Pencemaran merupakan ukuran relatif tingkat pencemaran terhadap parameter kualitas air yang diijinkan.

Langkah-langkah perhitungan nilai IKA:

- 1) Menghitung nilai Indeks Pencemaran (IP)
 - a. Hasil uji laboratorium kualitas air sungai dalam 1 (satu) periode pemantauan dibandingkan dengan nilai Baku mutu, sehingga diperoleh X_1 .

$$X_1 = \text{Hasil Uji} / \text{Baku Mutu}$$

- b. Jika $X_1 \leq 1$, maka $X_{1\text{new}} = X$
Jika $X_1 > 1$, maka $X_{1\text{new}} = 1 + 5 \cdot \log(X_1)$
- c. Nilai IP dihitung dengan Rumus,

$$IP = \sqrt{\frac{\{\text{maksimal}(X_{1\text{new}})\}^2 + \{\text{rata} - \text{rata}(X_{1\text{new}})\}^2}{2}}$$

- 2) Menentukan Status Mutu IP

Status Mutu IP ditentukan dengan kategori sebagai berikut:

Tabel. 3.6

Kisaran dan Kriteria IPA

No	Kisaran Nilai	Keterangan Nilai
1	$0 \leq PI_j \leq 1,0$	memenuhi baku mutu (kondisi baik)
2	$1,0 \leq PI_j \leq 5,0$	cemar ringan
3	$5,0 \leq PI_j \leq 10$	cemar sedang
4	$PI_j \geq 10$	cemar berat

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Selanjutnya, nilai IP akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung IKA.

- 3) Menentukan nilai IKA

Menghitung nilai IKA:

- a. Menghitung Persentase pemenuhan Mutu Air, dengan rumus:

$$= \frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu})}{\sum (\text{status mutu air})} * 100$$

- b. Nilai Indeks Per Mutu Air = Persentase Pemenuhan Mutu Air x Bobot Nilai

Bobot nilai:

- a) Status Memenuhi Baku Mutu = 70

- b) Status Cemar Ringan = 50
 - c) Status Cemar Sedang = 30
 - d) Status Cemar Berat = 10
- c. $IKA = \Sigma(\text{Nilai Indeks Permutu Air})$

Tabel. 3.7
Skor dan Kriteria IKA

SKOR	KRITERIA
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Didapat nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar **54,17**. Sesuai dengan tabel 3.7 maka nilai IKA Kabupaten Solok Tahun 2022 termasuk dalam kriteria “**SEDANG**”.

1.1. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan persyaratan, baik administratif maupun teknis dalam pengurusan izin lingkungan dan didukung dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Meningkatkan fungsi Koordinasi antar lembaga pengawas lingkungan hidup dan masyarakat serta stakeholder lainnya.
- c) Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan yang telah dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2.1. Faktor Penghambat untuk Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA)

Secara umum faktor penyebab terjadinya pencemaran di sungai yang dilakukan pemantauan berdasarkan beberapa parameter yang melebihi baku mutu (DO, Cl₂, TSS, BOD₅, MBAS/Detergen, Total Coli dan Fecal Coli) bersumber dari aktifitas manusia disekitar sungai (Buang Air Besar/BAB, limbah domestik, sampah), aktifitas pertanian/perkebunan, tingkat erosi yang tinggi akibat bukaan lahan pada bagian hulu, kegiatan penambangan di sungai dan erosi tebing sungai.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil pengukuran kualitas udara dengan metoda passive sampler pada 4 (empat) lokasi pemantauan. Pelaksanaan pengukuran dilaksanakan 2 (dua) periode, yaitu Periode I tanggal 28 April 2022 dan Periode II tanggal 7 Juli 2022. Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO₂ dan SO₂ sebagai komponen perhitungannya. Pembanding yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Nilai rata-rata tahunan dari NO₂ dan SO₂ akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1) \right)$$

Ket:

- I_{eu} = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).
Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20 µg/m³.
- Konsentrasi rata-rata Tahunan (µg/Nm³): NO₂ = 9,20
SO₂ = 7,07
- Baku mutu udara ambien referensi EU: (NO₂/40) = 0,23
(SO₂/20) = 0,35
- $I_{eu} = ((NO_2/40) + (SO_2/20)) / 2 = (0,23 + 0,35) = 0,29$

Langkah-langkah Perhitungan IKU:

1. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi, Industri, pemukiman atau perumahan, dan komersial/perkantoran/perdagangan.
2. Menghitung rerata parameter NO₂, dan SO₂ untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rerata dari keempat titik pemantauan.
3. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ untuk provinsi yang merupakan perhitungan rerata dari kota atau kabupaten.
4. Angka rerata NO₂ dan SO₂ provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Dalam penghitungan IKU untuk Kabupaten Solok kualitas udara yang diukur adalah kualitas udara ambien yang dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual *passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Secara lengkap hasil pengukuran dan perhitungan IKU Tahun 2022 dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8

Indeks Kualitas Udara 2022

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,49	90.55	102,03

Sumber Data Kemntemterian Lingkungan Hidup Tahun 2022

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

IKTL digunakan untuk menghitung luas tutupan lahan bervegetasi diaplikasikan mulai tahun 2018, yang sebelumnya menggunakan rumus ITH (Indeks Tutupan Hutan) yang belum merepresentasikan tutupan lahan secara lengkap. Pada IKTL ditambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25%, Ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati. Berdasarkan UU nomer 41 tahun 1999, bahwa setiap Kabupaten/Kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah, maka Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya.

Kualitas tutupan lahan dipengaruhi oleh vegetasi yang sangat memegang peranan penting dalam memelihara kualitas lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan. Untuk menentukan indeks kualitas lahan (IKL) berdasarkan pada indeks tutupan hutan, indeks performance hutan, indeks kondisi tutupan tanah, indeks konservasi badan air, dan indeks kondisi habitat.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IKL = 100 - \{(84,4 - (LTL - DKK \times 100) \times 50/54,3\}$$

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal

LTL = ITL

Pengukuran IKL dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana nilai IKL untuk Kabupaten Solok adalah 72,96 (Seperti terlihat pada tabel).

Tabel 3.9
Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

WILAYAH	LTL	LW	TL	DKK	TL-DKK	IKL
Kabupaten Solok	182.314,45	331.865,85	0,5494	0	0,5494	72,96

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022

Tabel 3.10
ANGGARAN, PROGRAM, KEGIATAN

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
A.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.1.951.365.400	Rp.1.915.992.763	98,98 %
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Rp. 1.388.762.400	Rp. 1.372.859.927	98,85 %
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rp. 444.997.000	Rp. 439.347.636	98.73%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Rp. 117.606.000	Rp. 103.785.200	88.25%
B.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 183.912.600	Rp. 177.816.450	96.69 %
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	Rp. 171.172.600	Rp. 168.087.450	98.20 %
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	Rp. 12.740.000	Rp. 9.729.000	76.37%
C.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 5.155.500	Rp. 4.910.000	95.24 %
	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 5.155.500	Rp. 4.910.000	95.24 %
D.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 97.979.000	Rp. 90.971.000	92.85 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 97.979.000	Rp. 90.971.000	92.85 %
E.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 38.000.000	Rp. 33.340.000	87.74 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 38.000.000	Rp. 33.340.000	87.74 %
F.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 23.809.999	Rp. 23.580.000	99.03 %
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Rp. 23.809.999	Rp. 23.580.000	99.03 %
Total		Rp. 2.300.222.499	Rp. 2.246.610.213	97.66 %

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Solok adalah

1. Membangun Kampung Iklim;
2. Menggalakkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah (Adiwiyata);
3. Melakukan Pengujian Sampel Air di 19 titik sampling;
4. Pemasangan Alat Passive Sampler (alat dikirim ke pusat untuk dianalisa);
5. Melaksanakan Sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan persampahan;
6. Kegiatan Sosialisasi kebijakan dalam pengelolaan danau dan sungai di Kabupaten Solok
7. Kegiatan Rutin Pengawasan ke Perusahaan

4. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan pendapatan suatu negara atau daerah tanpa mengaitkannya dengan pertumbuhan penduduk, artinya jumlah produksi barang dan jasanya terus meningkat tanpa dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan jumlah penduduk negara atau daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan perekonomian dalam menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya memperlihatkan peningkatan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa.

Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi setiap periodenya, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G_t = \frac{PDB_t - PDB_{(t-1)}}{PDB_{(t-1)}} \times 100$$

Keterangan :

Gt : Pertumbuhan ekonomi periode t
 PDB (t) : Produk domestik periode t
 PDB (t-1) : Produk domestik periode sebelumnya

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Pertumbuhan Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,18	4,31	135,53

Sumber: Solok Dalam Angka, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 dapat **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,18% dan terealisasi sebesar **4,31%** dengan capaian kinerja sebesar **135,53 %**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Perkembangan capaian target Pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut.

Tabel. 4.2

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (%)	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,12	3,32	4,31	0	123,42	135,53	5,05	85,35

Sumber: Solok Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **4,31%** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **135,53%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 5,05% maka capaian kinerja telah mencapai **85,35%**.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel. 4.3
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,36	4,31

Sumber:

1. Kabupaten Solok Dalam Angka 2023
2. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023
3. Statistik Indonesia 2023

Dari tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2022 4,31 persen lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Untuk perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok dengan Kabupaten Lainnya di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Padang Pariaman	6,87
2	Mentawai	4,94
3	Bukittinggi	4,68
4	Kota Solok	4,60
5	Kota Pariaman	4,55
6	Kota Payakumbuh	4,52
7	Kota Padang Panjang	4,39
8	Kota Padang	4,33
9	Solok	4,31
10	Dharmasraya	4,28
11	Agam	4,21
12	Tanah Datar	4,20

13	Pasaman Barat	4,17
14	Pasaman	4,09
15	Lima Puluh Kota	4,04
16	Solok Selatan	4,02
17	Pesisir Selatan	4,02
18	Sawahlunto	3,98
19	Sijunjung	3,95

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka, 2023

Jika dilihat dari tabel 4.4. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok urutan ke 9 (Sembilan) se Sumatera Barat, dimana Kabupaten tertinggi adalah Padang Pariaman dengan laju pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar Rp. 6,87%, sementara laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sijunjung sebesar 3,95%.

D. ANALISIS PENYEBAB BERHASIL/PENINGKATAN KINERJA

Tabel 4.5

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok Tahun (persen) 2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	2,58	2,66	1 ,16	3,05	3,37
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	2,9	2,38	-3 ,21	-0,28	9,23
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,18	-1,72	-3 ,08	2,21	0,79
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,49	2,09	-5 ,74	1,12	5,68
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,21	3,98	-1 ,85	2,68	1,29
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,73	8,91	-4 ,59	1,15	6,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail</i>	8,06	8,03	-0 ,77	4,24	5,59

	<i>Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>					
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,48	6,36	-11,61	4,59	2,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	8,77	9,23	-9,97	6,95	10,26
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,29	9,85	7,86	6,83	6,39
K	K Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,29	2,73	0,25	4,61	4,43
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,76	5,88	0,01	1,94	4,9
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Administration</i> , Pemerintahan,	5,65	5,59	-4,55	2,89	6,26
O	Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public</i>	7,2	5,49	-0,92	1,21	2,21
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,71	9,33	4,52	3,86	4,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social</i>	8,12	8,51	7,52	7,89	5,48
R,S,TU	Jasa Lainnya/ <i>Other Services</i>	8,11	7,95	-11	3,02	9,35
	Produk Domestik Bruto/Gross	5,19	5,04	-1,14	3,31	4,31

Sumber: Solok Dalam Angka 2023, BPS

Dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1% dimana pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi 3,31 dan Tahun 2022 4,31%. Laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang tertinggi yaitu faktor Pariwisata 10,26%, pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 9,25%, dan yang terendah industri 0,79% dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 1,29%.

Faktor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi dan menjadi program unggulan di Kabupaten Solok diantaranya:

1) Pariwisata

Pertumbuhan ekonomi bidang pariwisata Kabupaten Solok pada Tahun 2022 sebesar 10,26% atau mengalami peningkatan sebesar 3,31% dibanding Tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok melalui program/kegiatan yang direncanakan sudah tepat.

Yang mempengaruhi pertumbuhan pariwisata adalah:

a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok

Tabel. 4.6
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Solok
Tahun 2022

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN SOLOK																							
NO.	NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH (ORANG) PERTAHUN																		KET			
		2016			2017			2018			2019			2020			2021				2022		
		Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah		Wisman	Wisnus	Jumlah
1	Taman Janjang Saribu Sulit Air	-	-	-	-	312	312	21	1.932	1.953	5	2.630	2.635	-	1.705	1.705	-	1.901	1.901	-	1.879	1.879	
2	Puncak Batu Gajah Sulik Aia	-	-	-	-	528	528	-	2.050	2.050	-	2.744	2.744	-	1.902	1.902	-	1.957	1.957	-	1.963	1.963	
3	Miniatur Nagari Sulik Aia	-	-	-	-	594	594	-	1.683	1.683	-	2.171	2.171	-	1.878	1.878	-	2.077	2.077	-	2.010	2.010	
4	Air Terjun Timbulun Sulik Aia	-	-	-	-	283	283	-	1.500	1.500	-	1.580	1.580	-	1.374	1.374	-	1.431	1.431	-	1.435	1.435	
5	Teluk Indah Kacang	30	82.082	82.112	24	90.201	90.225	30	99.221	99.251	-	329.052	329.052	-	146.481	146.481	-	92.332	92.332	-	80.037	80.037	
6	Pesanggrahan Singkarak	134	147.247	147.381	238	268.734	268.972	161	509.744	509.905	450	509.747	510.197	-	184.641	184.641	-	89.030	89.030	-	118.521	118.521	
7	Katapiang Indah Tikalak	17	1.840	1.857	11	1.989	2.000	22	5.177	5.199	10	8.716	8.726	-	4.539	4.539	-	38.514	38.514	-	28.178	28.178	
8	Panorama Tanjung Alai	4	975	979	6	1.003	1.009	12	2.103	2.115	-	3.951	3.951	-	2.148	2.148	-	6.155	6.155	-	16.156	16.156	
9	Pincuran Ruyung Arian	-	741	741	-	864	864	-	1.950	1.950	-	2.517	2.517	-	1.742	1.742	-	791	791	-	2.350	2.350	
10	Angin Berembus Arian	2	18.685	18.687	7	23.214	23.221	8	35.527	35.535	-	45.840	45.840	-	21.642	21.642	-	21.437	21.437	-	30.889	30.889	
11	Air Panas Padang Belimbing	-	983	983	-	1.010	1.010	-	6.119	6.119	-	7.993	7.993	-	2.895	2.895	-	20.831	20.831	-	15.097	15.097	
12	Rest Area Kacang	15	10.025	10.040	25	11.020	11.045	28	15.122	15.150	8	19.753	19.761	-	13.788	13.788	-	5.945	5.945	-	6.335	6.335	
13	Villa Puruk Saniang Baka	-	703	703	-	756	756	-	1.850	1.850	-	2.386	2.386	-	1.766	1.766	-	-	-	-	-	-	
14	Puncak Gobah Arian	-	-	-	14	531	545	23	21.900	21.923	8	28.490	28.498	8	12.887	12.895	-	-	-	-	-	-	
15	Cinangkik Singkarak	-	-	-	28	684	712	51	6.332	6.383	64	8.073	8.137	-	45.303	45.303	-	45.660	45.660	-	35.120	35.120	
16	Villa Terapung Kacang	-	-	-	-	284	284	-	1.291	1.291	-	1.665	1.665	-	1.386	1.386	-	-	-	-	-	-	
17	Danau Tuo Koto sani	-	-	-	-	197	197	-	2.200	2.200	-	4.738	4.738	-	2.111	2.111	-	4.633	4.633	-	3.472	3.472	
18	Selayang Pandang Arian	-	-	-	-	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	557	-	285	285	
19	Borobudur Arian	-	9.233	9.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Puncak Gagoan Paninggahan	-	-	-	8	436	444	11	2.501	2.512	-	4.530	4.530	-	1.694	1.694	20	13.924	13.944	-	7.589	7.589	
21	Mesjid Tuo Kayu Jao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.832	3.832	-	2.643	2.643	-	16.106	16.106	-	8.056	8.056	
22	Aie Angek Bukik Gadang	-	-	-	34	689	723	8	1.900	1.908	-	2.491	2.491	-	2.525	2.525	-	8.123	8.123	118	7.014	7.132	
23	Aie Angek Bukit Kili	-	-	-	24	90.003	90.027	37	78.976	79.013	3	1.936	1.939	-	2.299	2.299	-	17.301	17.301	90	4.885	4.975	
24	Taman Arosuka	-	-	-	-	879	879	19	8.562	8.581	10	101.949	101.959	-	41.300	41.300	-	85.467	85.467	-	59.750	59.750	
25	Kampung Budaya Jawi-Jawi	-	-	-	50	583	633	36	4.011	4.047	45	15.059	15.104	4	4.623	4.627	-	35	35	-	1.940	1.940	
26	Kebun Teh Aie Batumbiak	-	-	-	23	154	177	29	69.109	69.138	20	20.052	20.072	-	8.058	8.058	-	64.707	64.707	-	150.550	150.550	
27	Taman Hutan Kota Wisata (THKW)	-	1.139	1.139	-	1.201	1.201	17	5.366	5.383	10	6.944	6.954	-	2.973	2.973	-	10.183	10.183	-	-	-	
28	Pendakian Gunung Talang	17	17.976	17.993	50	15.602	15.652	47	56.938	56.985	35	71.915	71.950	-	47.244	47.244	-	-	-	-	-	-	
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Bukik Bulek)																	16.936	16.936	-	17.199	17.199	
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Kapuwang)																	25.234	25.234	-	8.512	8.512	
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Seroja)																	2.858	2.858	-	5.865	5.865	
29	Aie Angek Batu Bajanjang	-	-	-	-	-	-	-	1.765	1.765	2	1.685	1.687	-	1.094	1.094	-	2.591	2.591	-	-	-	
30	Dermaga Danau Diateh	53	16.101	16.154	18	18.231	18.249	53	49.935	49.988	20	63.987	64.007	-	20.901	20.901	-	5.974	5.974	-	7.287	7.287	
31	Panorama Danau Dibawah	70	21.645	21.715	34	30.010	30.044	37	49.502	49.539	25	63.918	63.943	-	22.459	22.459	-	20.811	20.811	-	10.422	10.422	
32	Alahan Panjang Resort	81	48.802	48.883	25	28.282	28.307	45	50.046	50.091	70	64.706	64.776	49	20.552	20.601	2	23.289	23.291	50	56.945	56.995	
33	Bukit Indah Alahan Panjang	-	-	-	-	220	220	-	1.734	1.734	-	2.276	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	Desa Wisata Tabek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.788	5.788	2	1.173	1.175	-	525	525	13	641	654	
35	Danau Talang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66.850	66.855	-	18.189	18.189	-	42.153	42.153	
36	Villa 1000 Ban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.374	2.374	-	2.033	2.033	-	1.344	1.344		
37	Lereng Green View	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.436	1.436	-	12.110	12.110	-	22.972	22.972		
38	Puncak Happy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	704	-	-	-	-	-	-	-	
39	Panorama Bukit Cambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805	805	-	-	-	-	-	-	-	
40	Timbulun 7 Salirik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.097	1.097	-	2.094	2.094	-	226	226		
41	Aie Angek Garara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.401	8.401	-	-	-	-	1.501	1.501		
42	Sentral Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286	1.286	45	7.672	7.672	-	7.717	7.717		
43	Pulau Indah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.327	6.327	-	6.649	6.649	-	6.649	6.649		
44	Moosa Edufarm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.058	6.058	-	3.950	3.950	-	3.950	3.950		
45	Solok Radjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.339	49.339	-	28.882	28.882	-	28.882	28.882		
46	Kebun Strobery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.029	52.029	-	47.855	47.855	-	47.855	47.855		
47	Villa Bukik Jirak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878	1.878	-	1.516	1.516	-	1.516	1.516		
48	Batu Barajuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.820	5.820	-	4.570	4.570	-	4.570	4.570		
49	Pincuran Puti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.280	7.280	-	857	857	-	857	857		
	JUMLAH	423	378.177	378.600	619	588.661	589.280	695	1.096.046	1.096.741	785	1.413.114	1.413.899	68	700.992	701.060	22	820.159	820.181	316	860.529	860.845	

Sumber: Data Kunjungan Wisata Kabupaten Solok (Disparbud)

Salah satu peningkatan kunjungan dapat dilihat dari kenaikan jumlah wisman yang datang ke Kabupaten Solok, dimana di tahun 2021 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 22 orang dan ditahun 2022 sebanyak 316 orang, sedangkan jumlah wisatawan nusantara di tahun 2021 adalah 820.159 orang dan terjadi peningkatan 860.529 orang di tahun 2022.

Pencatatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok telah dilaksanakan di 49 objek wisata yang ada di Kabupaten Solok dengan menggunakan beberapa sistem perhitungan diantaranya adalah menggunakan tiket masuk, buku tamu, data kelompok pengelola.

Meningkatnya pertumbuhan industri dan usaha kepariwisataan terutama dalam sektor akomodasi dan makan minum sebagai akibat *multiplier effect* pembangunan di sektor pariwisata. Hal ini sesuai dengan data kontribusi sektor makan minum dan akomodasi terhadap PDRB Kab. Solok yang tahun ini mengalami kenaikan dari 78.800.000.000 pada tahun 2021 menjadi 86.880.000.000 di tahun 2022.

Tabel. 4.7

Data Pertumbuhan Ekraf Pariwisata Tahun 2021-2022

No	Jenis	2021	2022
1.	Objek Wisata		
	a. Alam	111	111
	b. Budaya	75	75
	c. Buatan	13	15
	d. Alam & Buatan	4	4
2.	Kelompok Sadar Wisata	44	
3.	Hotel		
	a. Bintang	-	1
	b. Non Bintang	9	5
	c. Penginapan Lainnya		20
4.	Rumah Makan	89	89
5.	Desa Wisata	17	17
6.	Usaha/ Industri Pariwisata		
	Lainnya	56	56
	a. Kuliner	47	47
	b. Cenderamata	2	2
	c. Fashion		

Sumber: Data Ekraf Disparbud

- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan

Ditandai dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat non fisik khususnya dalam hal peningkatan Kapasitas SDM kepariwisataan baik yang berasal dari APBD Kab. Solok, APBD Provinsi maupun dari APBN (DAK non fisik pelayanan kepariwisataan). Juga ditandai dengan tumbuhnya pokdarwis di

berbagai destinasi wisata sebagai pengelola lokasi tsb. Saat ini dari data yang ada di Disparbud terdapat 44 pokdarwis yang sudah diterbitkan SK-nya oleh Kepala Disparbud Kab. Solok.

Untuk Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan disparbud antara lain

1. Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/ Pondok wisata (DAK non Fisik Kepariwisataaan)
 2. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata (DAK non Fisik Kepariwisataaan)
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (cagar budaya: museum, keraton, dan candi)
 4. Pelatihan Digitalisasi Branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, dan fotografi
 5. Pelatihan pemandu wisata trekking
 6. Pelatihan Pembuatan Cendramata di destinasi wisata unggulan di Kabupaten Solok
- c. Terlaksananya kegiatan pariwisata secara kontinue baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta/masyarakat

Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparbud, yaitu

- a) Festival 5 Danau(Arak Jamba, Indang Kolosal, Pameran Pokdarwis, Penampilan Kesenian)
- b) Gowes di Alahan panjang Resort
- c) Camping Ground di Danau Talang
- d) Pendakian Gunung Talang dan Camp Bersih
- e) Gowes Salingka Danau
- f) Paralayang, Silaturahmi Silek Tuo, serta Pameran UMKM dan Ekraf
- g) Talang Trail Run

Sedangkan untuk promosi sektor pariwisata sudah dilaksanakan baik secara konvensional (brosur, pamflet dan pariwisata) dan melalui media sosial (fb, IG, website, dsb)

- d. Berkembangnya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Hal ini terlihat dari adanya agenda-agenda atau kegiatan terkait dengan peningkatan terhadap Kapasitas SDM Destinasi wisata yaitu melalui beberapa kegiatan berikut:

- a) Focus group discussion (FGD) Pengelolaan destinasi wisata
- b) Workshop Edukasi Geopark untuk komunitas sekolah
- c) Workshop Menulis legenda Geopark
- d) Lomba Menulis Legenda Geopark singkarak danau Kembar
- e) Penulisan Buku Penunjang daya tarik wisata (Inovasi)
- f) Sosialisasi Geopark

2) Konstruksi

Untuk Sektor Konstruksi menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok sebesar 6,27% atau tumbuh sebesar 5,12, ini menunjukkan intervensi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Solok sudah tepat sasaran.

Yang mempengaruhi bidang pertumbuhan bidang konstruksi diantaranya:

- a) Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan proyek infrastruktur dan bangunan untuk pemerataan pembangunan, salah satu dengan menciptakan inovasi 1 (satu) Traktor untuk 1 (satu) Kecamatan.



- b) Dengan banyaknya Proyek dan bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten banyak menyerap tenaga kerja.



- c) Meratanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok juga mempengaruhi pertumbuhan barang dan jasa.

3) Pertanian

Keberhasilan tercapainya target Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok Tahun 2022 jika dilihat dari sektor pertanian disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa komoditi pertanian. Laju pertumbuhan PDRB ADHK sector pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 sebesar 3,37% naik dibandingkan dengan tahun 2021 dimana laju pertumbuhannya 3,05%. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Solok. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8

Perkembangan produksi komoditi pertanian tahun 2021-2022

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Padi sawah*	Ton	179.316,10	171.335,32	4,66
Jagung	Ton	2.062,40	2.874,20	-28,24
Ubi Kayu	Ton	8.958,60	9.004,80	-0,51
Ubi Jalar	Ton	54.524,20	45.225,10	20,56
Kacang Tanah	Ton	229,5	229,1	0,17
Talas	Ton	416,0	430,3	-3,32
Bawang Daun	Ton	8.901,00	6.412,90	38,80
Bawang Merah	Ton	188.555,86	188.549,35	0,00
Bawang Putih	Ton	770,80	1.744,63	-55,82
B a y a m	Ton	538,9	436,7	23,40
B u n c i s	Ton	13.080,90	9.925,00	31,80
C a b e keriting	Ton	34.254,96	25.997,44	31,76
Cabe Rawit	Ton	2.699,49	2.947,17	-8,40
Jamur	Kw	26,05	17,1	52,34
Kacang Panjang	Ton	755,49	721,2	4,75
Kangkung	Ton	510,75	397,4	28,52
Kentang	Ton	19.554,10	8.014,50	143,98
K e t i m u n	Ton	438,3	315,25	39,01
Kubis	Ton	143.889,70	134.881,23	6,68
Labu siam	Ton	790,2	507,78	55,61
Petsai/sawi	Ton	2.106,30	2.379,90	-11,50
Semangka	Ton	38,1	17,65	115,25
Stroberi	Ton	71,55	42,9	66,78
Terung	Ton	5.338,00	2.608,50	104,64

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Tomat	Ton	84.086,65	49.503,00	69,86
Wortel	Ton	14.653,00	15.563,30	-5,85
Alpokate	Ton	52.934,20	43.280,66	22,30
Apel	Ton	29,2	17,5	66,86
Belimbing	Ton	21,05	14,63	44,18
Duku	Ton	33,3	52,25	-36,33
Durian	Ton	7.816,78	3.936,70	98,56
Jambu Air	Ton	261,93	237,14	10,47
Jambu Biji	Ton	522,24	653,08	-20,04
Jengkole	Ton	814,1	523,03	55,66
Jeruk Besar	Ton	11,8	7,3	61,64
Jeruk siam/keprok	Ton	1.939,15	4.378,90	-55,72
Mangga	Ton	826,38	434,19	90,32
Manggis	Ton	1.617,95	839,45	92,73
Melinjo	Ton	212,5	272,5	-22,02
Nangka	Ton	566,65	467,35	21,23
Nenas	Ton	2,56	2,1	21,90
Pepaya	Ton	1.873,30	1.343,12	39,48
Pisang	Ton	7.013,15	6.381,25	9,90
Rambutan	Ton	1775,4	860,64	106,30
Salak	Ton	93,3	78,1	19,46
Sawo	Ton	1132,55	791,99	43,00
Sirsak	Ton	595,4	843,85	-29,45
Sukun	Ton	51,75	94,9	-45,47
Buah naga	Ton	1184	341,78	246,40
Lengkeng	Ton	22,1	3,9	466,67
Jahe	Ton	659,34	457,5	44,12
Laos	Ton	534,56	368,97	44,87
Kunyit	Ton	734,13	512,95	43,11
Kapulaga	Ton	350,94	298,04	17,75
Kelapa	Ton	2.459,42	2.078,81	18,31
Karet	Ton	2.322,10	2.734,48	-15,08
Kopi Arabika	Ton	1.320,42	1.294,10	1,96
Kopi Robusta	Ton	3.171,70	3.104,03	2,18
Cengkeh	Ton	657,72	639,73	2,81
Kulit Manis	Ton	2.949,46	215,45	1268,98

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Tebu	Ton	754,15	766,04	-1,55
Cokelat	Ton	1.912,05	1.885,66	1,40
Tembakau	Ton	29,55	13,85	113,36
Pala	Ton	14,83	13,42	10,51
Enau	Ton	78,57	124,21	-36,74
Kemiri	Ton	1.274,75	985,24	29,38
Teh	Ton	980,08	923,98	6,07
Kapuk	Ton	186,54	24,36	665,76
Pinang	Ton	399,75	216,79	84,40
Daging Sapi	Ton	1.057,42	1.184,94	-10,76
Daging Kerbau	Ton	6,756	8,01	-15,66
Daging Kambing	Ton	24,768	50,7	-51,15
Daging Ayam Buras	Ton	358,89	375,17	-4,34
Daging Ras Pedaging	Ton	3.547,76	3.270,14	8,49
Daging Ras Petelur	Ton	46,723	51,5	-9,28
Daging Itik	Ton	64,32	68,18	-5,66
Telur Ayam Ras	Ton	326,71	360,11	-9,27
Telur Ayam Buras	Ton	122,35	127,9	-4,34
Telur Itik	Ton	600,52	636,54	-5,66
Susu Sapi	Ton	206,55	68,85	200,00
Susu Kerbau	Ton	29,27	49,18	-40,48
Total	Ton	875.099,74	768.848,23	13,82

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2022

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 meningkat 13,82% dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan

produktifitas. sedangkan untuk produksi peternakan yang mengalami penurunan produksi karena turunnya populasi ternak. Penurunan produksi terjadi karena turunnya populasi ternak yang disebabkan oleh:

1. Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan kerbau. Kasus PMK tidak saja terdapat di Kabupaten Solok tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. PMK dapat berpengaruh langsung terhadap system produksi ternak dan penurunan fertilitas ternak sehingga berpengaruh terhadap penambahan populasi ternak. PMK juga dapat menyebabkan kematian pada ternak. Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi pada ternak ruminansia yang berdampak pada peningkatan produksi daging.
2. Penurunan populasi pada unggas karena adanya kasus infeksi saluran pernafasan (CRD) yang menyebabkan kematian pada ternak.

Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 belum optimal. Belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktifitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.

Adapun kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi adalah:

1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan pengembangan areal penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 16,2 Ha dan varitas cisokan seluas 45,4 Ha. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG). Selain penangkaran dilakukan fasilitasi bantuan benih padi bersertifikat untuk kelompok tani dengan luas areal 2.380 Ha.
2. Penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha.
3. Pengembangan ubi jalar seluas 1 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani.
4. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit, irigasi air tanah dalam 4 unit, irigasi tanah dangkal 3 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 23 unit. Kegiatan ini bertujuan

- meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.
5. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung 1 unit.
 6. Pengembangan kawasan bawang merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 71,25 Ha dan bimbingan teknis penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 7. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 9,5 Ha.serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabe merah.
 8. Pengembangan kawasan kentang melalui fasilitasi sarana produksi seluas 33 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kentang.
 9. Pengembangan kawasan manggis melalui fasilitasi sarana produksi seluas 8 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP) berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Arian. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi manggis.
 10. Pengembangan kawasan durian melalui fasilitasi sarana produksi seluas seluas 37,5 Ha yang berasal dari APBN 30 Ha dan APBD Propinsi Sumatera Barat 7,5 Ha dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Arian yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi durian.
 11. Pengembangan kawasan pisang melalui fasilitasi sarana produksi budidaya dan sarana pasca panen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pisang. Bantuan fasilitasi sarana produksi ditargetkan seluas 20 Ha yang berasal dari APBN dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Arian yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.

12. Pengembangan kawasan pepaya melalui bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
13. Pengembangan kawasan alpukat melalui fasilitasi sarana produksi seluas 70 Ha yang berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan Aripan serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi alpukat.
14. Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
15. Pengembangan kawasan tahunan berupa intensifikasi areal kopi arabika seluas 200 Ha dengan bantuan berupa pupuk organik 400 liter dan knapsack sprayer 40 unit dan pelatihan PHT Pengendalian OPT Kopi dan perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi .
16. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
17. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha , Klinik PHT Kakao, Pembinaan Regu OPT Tanaman Perkebunan (Kakao).
18. Melakukan pengendalian OPT dengan bekerjasama dengan petugas PHP Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan pada kelompok tani.
19. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)
20. Meningkatkan kelahiran anak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 6.700 dosis dan kelahiran 2.750 ekor .
21. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor
22. Penanggulangan penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), infeksi saluran pernafasan (CRD) pada unggas.
23. Untuk meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan memberikan bantuan ayam kukuk balenggek pada kelompok penangkar ayam kukuk balenggek dan melaksanakan lomba ayam

kukuk balenggek untuk menarik minat masyarakat membudidayakan ayam kukuk balenggek.

24. Penyediaan alsintan untuk kelompok tani.
25. Mendorong petani untuk menerapkan teknologi budidaya sesuai SOP GAP dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
26. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan pelatihan.
27. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan tenaga teknis reproduksi ternak serta memberdayakan penyuluh swadaya.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk melihat tingkat efisiensi dan efektifitas sumber daya anggaran terhadap pencapaian target kinerja indikator Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9

Efisiensi dan Efektifitas Indikator PDRB Perkapita (ADHB)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
PDRB Perkapita (ADHB)	3,18	4,31	135,53	190.609.729.	169.494.35	88,92%
				174	1.546	
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						11,8%
Tingkat Efektifitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						152,42%

Pada tabel 4.9 dapat dilihat Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dimana anggaran yang disediakan sebanyak 190.609.729.174 dan terealisasi sebanyak 169.494.351.546 atau 88,92% dengan efisiensi sebanyak 21.115.377.628 atau 11,8% dan jika dibandingkan capaian kinerja sebesar 135,53% untuk indikator ini maka didapat tingkat efektifitas 152,42%. Berdasarkan tabel 4.6. dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja anggaran 93,86% dengan tingkat efisiensi 15,2% dan tingkat efektifitas 144,4%, sedangkan persentase pencapaian indikator 135,53%. Dari capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran sudah optimal untuk mencapai sasaran strategis.

Selain anggaran untuk pencapaian indikator sasaran strategis juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pertanian. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh 103 orang PNS , 38 orang P3K dan 54 orang tenaga harian lepas. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 17 orang dari jumlah pegawai tahun 2021.

Penurunan jumlah pegawai karena adanya pensiun, meninggal dunia dan mutasi pegawai serta pegawai harian lepas yang mengundurkan diri. Dinas pertanian telah mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja dan memanfaatkan SDM yang ada.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - Bantuan alat mesin pertanian berupa handtraktor sebanyak 2 unit, mesin potong rumput 10 unit dan cultivator 10 unit.
 - Pengadaan ayam kukuak balenggek sebanyak 240 ekor betina dan 32 ekor jantan, bantuan pakan 400 kg, bantuan obat-obatan/vitamin dan bantuan bahan kandang untuk 4 kelompok peternak dan lomba ayam kukuk balenggek sebanyak 1 event
 - Pengembangan padi organic seluas 3 Ha
 - Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
 - Melaksanakan Sekolah lapang GAP bawang merah dan buah naga serta SL GHP bawang merah.
 - Perluasan kopi arabika dengan memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 12.240 batang.
 - Kegiatan pembibitan manggis, pepaya, alpukat, durian dan pisang bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi benih unggul hortikultura yang bersertifikat.
 - Kegiatan pengembangan kentang dengan memberikan bantuan sarana produksi seluas 10 Ha dan pengembangan cabe merah dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada kelompok tani seluas 5 Ha
 - Pengembangan penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 41,4 Ha dan varitas cisokan seluas 4 Ha dan menyalurkan benih padi dari hasil penangkaran ke kelompok tani. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG).
 - Pengembangan ubi jalar 1 Ha dengan memberikan bantuan benih ubi jalar ke kelompok tani.
 - Penyediaan semen beku, N2 cair, container dan palstik glove untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran anak sapi dan pelaksanaan bimbingan teknologi

pembuatan konsentrat/pakan ternak sapi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk membuat pakan ternak sapi yang berkualitas.

- Pembangunan gudang pakan ternak dan penyediaan sarana untuk pengolahan pakan ternak.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan areal luas tanam dengan pengembangan sumber air dan mempertahankan ketersediaan sumber ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi.
 - Renovasi gedung BPP 3 sebanyak 3 unit yaitu BPP Kubung, Tigo Lurah dan lembang Jaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat melakukan koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis.
 - Pembangunan uv dryer untuk padi sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan padi dan meningkatkan kualitas gabah.
 - Kegiatan pembangunan jalan pertanian sebanyak 151 unit bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.
3. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan dilakukan berupa pembebasan terhadap penyakit hewan menular seperti melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies, penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak dan meningkatkan fasilitas pelayanan Puskesmas dengan merenovasi Puskesmas Sumani, menyediakan sarana pendukung untuk Puskesmas berupa:
- Peralatan reproduksi berupa alat USG dan refrigerator
 - Peralatan pemeriksaan klinis berupa thermometer, handscund, masker, stetoskop
 - Peralatan pengambilan sampel berupa disposable syringe
 - Sarana transportasi dan komunikasi roda dua puskesmas sebanyak 26 unit
 - Peralatan kantor puskesmas berupa icebox, filling cabinet, lemari obat, computer PC, laptop, printer, kamera, kursi kerja, meja kerja
 - Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan di puskesmas

4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan melaksanakan SL-PHT pada tanaman perkebunan, penyediaan sarana untuk pengendalian OPT tanaman pangan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan AUTP.
5. Program Penyuluhan Pertanian
Kegiatan berupa bimbingan teknis bagi petani dan petugas, pelatihan petani dan petugas dan pelaksanaan Sekolah lapang serta pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain program/kegiatan yang alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Solok juga terdapat kegiatan yang alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN yaitu:

- A. Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022
 1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha dan pembangunan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 unit .
 2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan
Kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan membangun irigasi perpompaan besar 1 unit, irigasi perpompaan menengah 1 unit, embung 1 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi 18 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas.
 - b. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian
 - c. Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan melakukan penyusunan E-RDCK untuk pendaftaran penerimaan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi, validasi penerima pupuk subsidi.
 - d. Fasilitasi pembiayaan pertanian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
 3. Program nilai tambah dan daya saing industry. Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kawasan pisang 20 Ha, kawasan kentang 20 Ha, kawasan bawang merah 65 Ha dan kawasan Durian 30 Ha.

4. Program nilai tambah dan daya saing industry dengan kegiatan berupa pengembangan kawasan tahunan berupa bantuan sarana produksi untuk intensifikasi kopi arabika seluas 200 Ha, penanaman serih wangi seluas 20 Ha dan pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditi perkebunan 1 unit (17,94 ha).
 5. Peningkatan kelahiran ternak melalui Kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana Inseminasi Buatan (IB) dan pemberian Sertifikat NKV pada unit usaha produksi ternak.
- B. Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
1. Kegiatan pengembangan kawasan manggis seluas 8 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 2. Kegiatan pengembangan kawasan durian seluas 7,5 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 3. Kegiatan pengembangan kawasan alpukat seluas 70 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 4. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 3,75 Ha, cabe merah 4,5 Ha dan kentang 3 Ha melalui fasilitasi bantuan benih dan pupuk.
 5. Bantuan benih jagung hibrida seluas 270 Ha.
 6. Bantuan power thresher sebanyak 13 unit
 7. Pengadaan UV Dryer 1 unit.
 8. Kegiatan pelatihan pengendalian OPT kopi, klinik PHT kakao dan pembinaan regu OPT tanaman kakao yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas.
 9. Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha.
 10. Perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi.

11. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
12. Perluasan tanaman pinang dengan memberikan bantuan bibit pinang sebanyak 22.300 batang.
13. Bantuan bibit puyuh sebanyak 40.000 ekor, ayam 12.000 ekor dan itik 6.000 batang serta penandaan dan pendataan ternak sebanyak 1.480 penandaan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Barat.
14. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor untuk perbaikan genetic sapi.
15. Register kandang sapi.

Program dan kegiatan serta anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Solok untuk mencapai target Pertumbuhan Ekonomi pada sektor pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.7

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
I	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	428.620.800	337.713.904	78,79
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.072.080.620	3.558.784.501	87,39
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.779.050.470	1.027.062.836	57,73
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	289.784.900	224.520.233	77,48
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.594.112.285	28.017.829.827	97,98
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota			
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	177.041.600	133.099.807	75,18
V	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
	JUMLAH	38.529.794.675	36.164.169.744	93,86

Sumber: Dinas Pertanian, 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dengan cara sebagai berikut

1. Perluasan areal tanam di lahan perkebunan/lahan hortikultura serta optimalisasi tumpang sari.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperpendek umur padi varitas caredek merah dari 140 HST menjadi 120 HST dengan tujuan dapat ditanam 2,5 kali dalam setahun.
2. Meningkatkan produksi benih bersertifikat dengan mengembangkan luas areal penangkaran padi sawah, melakukan pembibitan tanaman buah-buahan, melakukan pemeliharaan kebun induk kopi dan cengkeh.
3. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan bantuan benih bersertifikat dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP.
4. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit pada ternak.
5. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas tanam dengan membangun irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi air tanah dalam , irigasi air tanah dangkal dan irigasi sprinkler.
6. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung, dam parit dan long storage
7. Membangun dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk menambah luas areal tanam sehingga dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman.

8. Fasilitasi sarana pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan alsintan
9. Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bimtek, worksop, sekolah lapang.
10. Penyediaan sarana dan prasarana untuk petugas teknis/penyuluh/petugas IB
11. Meningkatkan skala usaha petani melalui kewirausahaan tani dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
12. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.
13. Meningkatkan penanganan dan pengawasan untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif
14. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara khusus kepada petugas ataupun kelompok tani.
15. Meningkatkan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak dan meningkatkan kelahiran ternak melalui optimalisasi reproduksi dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan menyediakan sarana IB seperti N2 cair, dan semen beku.
16. Untuk memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka Dinas Pertanian berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan mengusulkan Unit Usaha Produk Hewan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan sertifikat nilai control veteriner (NKV). Sertifikat NKV sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu syarat bagi unit usaha untuk melakukan ekspor.
17. Pembangunan rumah potong hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
18. Meningkatkan promosi produk unggulan dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek.
19. Meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan melakukan penangkaran ayam kukuk balenggek.
20. Melaksanakan bimtek Good Handling Practise (GHP) untuk penanganan pasca panen.
21. Mendorong petani mengikuti AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.

22. Meningkatkan kualitas pakan ternak dengan pengembangan bank pakan ternak.
23. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan Puskesmas.
24. Peningkatan kualitas ternak untuk perbaikan genetic sapi melalui Transfer Embrio (TE).
25. Perbaikan mutu pakan sapi dengan menyediakan bahan pakan olahan maupun bahan pakan dengan membangun bank pakan
26. n bibit sapi indukan
27. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dengan membangun/renovasi Puskesmas, pengembangan teknologi pengolahan pakan, membangun/meningkatkan jalan produksi peternakan
28. Meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan ruang data yang dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, computer, jaringan internet dan lain-lain. Selain itu juga meningkatkan kegiatan dempot di BPP untuk menjadi lahan percontohan sebagai salah satu cara unuk mendiseminasikan teknologi pertanian ke petani
29. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas seperti obat-obatan, peralatan ternak dan peralatan kesehatan hewan.
30. Mendorong peternak untuk menggunakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
31. Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan
32. gan integrasi ternak dan tanaman.
33. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian yang bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian
34. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan meningkatkan luas lahan pertanian organic.

5. PDRB PERKAPITA (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai

tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan oleh BPS adalah harga tahun 2010. PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar harga Konstan dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah itu.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian PDRB Perkapita ADHK dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel. 5.1
PDRB Perkapita (ADHK)

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Perkapita (ADHK)	26.530.000	26.526.660	99,99

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target PDRB Perkapita (ADHK) dengan nilai Rp. 26.530.000 dan terealisasi dengan nilai Rp. **26.526.660** dengan capaian kinerja sebesar **99,99%**

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Perkembangan capaian target PDRB Perkapita (ADHK) beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 5.2. berikut:

Tabel. 5.2
Perkembangan Meningkatnya PDRB Per Kapita (ADHK)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	PDRB Perkapita (ADHK)	25.019.604	25.669.585	26.526.660	96,49	98,99	99,99	30.970.000	85,65

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa Realisasi PDRB Perkapita (ADHK) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **Rp. 26.526.660,-** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **99,99%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun

2026) dengan nilai Rp. 30.970.000 maka capaian kinerja telah mencapai **85,65%**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHK) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini:

Tabel. 5.3
Perbandingan PDRB Perkapita (ADHK)

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	PDRB Perkapita (ADHK)	42.463.800	32.378.000	26.526.660

Sumber: Sumatera Barat dalam angka 2023, Statistik Indonesia 2023

Dari tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Solok Tahun 2022 Rp. 26.526.660,- lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Rp. 32.378.000,- dan Nasional Rp. 42.463.800.

D. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN KINERJA

Sektor pertanian mempunyai peranan penting terhadap PDRB Perkapita (ADHK) karena sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB (ADHK) Kabupaten Solok. Keberhasilan tercapainya target PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Solok Tahun 2022 jika dilihat dari sektor pertanian disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa komoditi pertanian. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut ini:

Tabel. 5.4.
Perkembangan produksi komoditi pertanian tahun 2021-2022

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Padi sawah	Ton	179.316,10	171.335,32	4,66
Jagung	Ton	2.062,40	2.874,20	-28,24
Ubi Kayu	Ton	8.958,60	9.004,80	-0,51
Ubi Jalar	Ton	54.524,20	45.225,10	20,56
Kacang Tanah	Ton	229,5	229,1	0,17
Talas	Ton	416,0	430,3	-3,32
Bawang Daun	Ton	8.901,00	6.412,90	38,80
Bawang Merah	Ton	188.555,86	188.549,35	0,00
Bawang Putih	Ton	770,80	1.744,63	-55,82

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
B a y a m	Ton	538,9	436,7	23,40
B u n c i s	Ton	13.080,90	9.925,00	31,80
C a b e keriting	Ton	34.254,96	25.997,44	31,76
Cabe Rawit	Ton	2.699,49	2.947,17	-8,40
Jamur	Kw	26,05	17,1	52,34
Kacang Panjang	Ton	755,49	721,2	4,75
Kangkung	Ton	510,75	397,4	28,52
Kentang	Ton	19.554,10	8.014,50	143,98
K e t i m u n	Ton	438,3	315,25	39,01
Kubis	Ton	143.889,70	134.881,23	6,68
Labu siam	Ton	790,2	507,78	55,61
Petsai/sawi	Ton	2.106,30	2.379,90	-11,50
Semangka	Ton	38,1	17,65	115,25
Stroberi	Ton	71,55	42,9	66,78
Terung	Ton	5.338,00	2.608,50	104,64
Tomat	Ton	84.086,65	49.503,00	69,86
Wortel	Ton	14.653,00	15.563,30	-5,85
Alpokat	Ton	52.934,20	43.280,66	22,30
Apel	Ton	29,2	17,5	66,86
Belimbing	Ton	21,05	14,63	44,18
Duku	Ton	33,3	52,25	-36,33
Durian	Ton	7.816,78	3.936,70	98,56
Jambu Air	Ton	261,93	237,14	10,47
Jambu Biji	Ton	522,24	653,08	-20,04
Jengkol	Ton	814,1	523,03	55,66
Jeruk Besar	Ton	11,8	7,3	61,64
Jeruk siam/keprok	Ton	1.939,15	4.378,90	-55,72
Mangga	Ton	826,38	434,19	90,32
Manggis	Ton	1.617,95	839,45	92,73
Melinjo	Ton	212,5	272,5	-22,02
Nangka	Ton	566,65	467,35	21,23
Nenas	Ton	2,56	2,1	21,90
Pepaya	Ton	1.873,30	1.343,12	39,48
Pisang	Ton	7.013,15	6.381,25	9,90
Rambutan	Ton	1775,4	860,64	106,30
Salak	Ton	93,3	78,1	19,46

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Sawo	Ton	1132,55	791,99	43,00
Sirsak	Ton	595,4	843,85	-29,45
Sukun	Ton	51,75	94,9	-45,47
Buah naga	Ton	1184	341,78	246,40
Lengkeng	Ton	22,1	3,9	466,67
Jahe	Ton	659,34	457,5	44,12
Laos	Ton	534,56	368,97	44,87
Kunyit	Ton	734,13	512,95	43,11
Kapulaga	Ton	350,94	298,04	17,75
Kelapa	Ton	2.459,42	2.078,81	18,31
Karet	Ton	2.322,10	2.734,48	-15,08
Kopi Arabika	Ton	1.320,42	1.294,10	1,96
Kopi Robusta	Ton	3.171,70	3.104,03	2,18
Cengkeh	Ton	657,72	639,73	2,81
Kulit Manis	Ton	2.949,46	215,45	1268,98
Tebu	Ton	754,15	766,04	-1,55
Cokelat	Ton	1.912,05	1.885,66	1,40
Tembakau	Ton	29,55	13,85	113,36
Pala	Ton	14,83	13,42	10,51
Enau	Ton	78,57	124,21	-36,74
Kemiri	Ton	1.274,75	985,24	29,38
Teh	Ton	980,08	923,98	6,07
Kapuk	Ton	186,54	24,36	665,76
Pinang	Ton	399,75	216,79	84,40
Daging Sapi	Ton	1.057,42	1.184,94	-10,76
Daging Kerbau	Ton	6,756	8,01	-15,66
Daging Kambing	Ton	24,768	50,7	-51,15
Daging Ayam Buras	Ton	358,89	375,17	-4,34
Daging Ras Pedaging	Ton	3.547,76	3.270,14	8,49
Daging Ras Petelur	Ton	46,723	51,5	-9,28
Daging Itik	Ton	64,32	68,18	-5,66
Telur Ayam Ras	Ton	326,71	360,11	-9,27
Telur Ayam Buras	Ton	122,35	127,9	-4,34
Telur Itik	Ton	600,52	636,54	-5,66
Susu Sapi	Ton	206,55	68,85	200,00

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Susu Kerbau	Ton	29,27	49,18	-40,48
Total	Ton	875.099,74	768.848,23	13,82

Sumber: Kabupaten Solok, 2022

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 meningkat 13,82% dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan produktifitas. sedangkan untuk produksi peternakan yang mengalami penurunan produksi karena turunnya populasi ternak. Penurunan produksi terjadi karena turunnya populasi ternak yang disebabkan oleh:

1. Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan kerbau. Kasus PMK tidak saja terdapat di Kabupaten Solok tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. PMK dapat berpengaruh langsung terhadap system produksi ternak dan penurunan fertilitas ternak sehingga berpengaruh terhadap penambahan populasi ternak. PMK juga dapat menyebabkan kematian pada ternak. Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi pada ternak ruminansia yang berdampak pada peningkatan produksi daging.
2. Penurunan populasi pada unggas karena adanya kasus infeksi saluran pernafasan (CRD) yang menyebabkan kematian pada ternak.

Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 belum optimal. Belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktifitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.

Adapun kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi adalah:

1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan pengembangan areal penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 16,2 Ha dan varitas cisokan seluas 45,4 Ha. Kegiatan ini merupakan

salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG). Selain penangkaran dilakukan fasilitasi bantuan benih padi bersertifikat untuk kelompok tani dengan luas areal 2.380 Ha.

2. Penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha.
3. Pengembangan ubi jalar seluas 1 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani.
4. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit, irigasi air tanah dalam 4 unit, irigasi tanah dangkal 3 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 23 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.
5. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung 1 unit.
6. Pengembangan kawasan bawang merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 71,25 Ha dan bimbingan teknis penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
7. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 9,5 Ha.serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabe merah.
8. Pengembangan kawasan kentang melalui fasilitasi sarana produksi seluas 33 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kentang.
9. Pengembangan kawasan manggis melalui fasilitasi sarana produksi seluas 8 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP) berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Arian. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi manggis.
10. Pengembangan kawasan durian melalui fasilitasi sarana produksi seluas seluas 37,5 Ha yang berasal dari APBN 30 Ha dan APBD Propinsi Sumatera Barat 7,5 Ha dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Arian yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok serta penerapan Standar Operasional Procedure

(SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi durian.

11. Pengembangan kawasan pisang melalui fasilitasi sarana produksi budidaya dan sarana pasca panen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pisang. Bantuan fasilitasi sarana produksi ditargetkan seluas 20 Ha yang berasal dari APBN dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
12. Pengembangan kawasan pepaya melalui bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
13. Pengembangan kawasan alpukat melalui fasilitasi sarana produksi seluas 70 Ha yang berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan Aripan serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi alpukat.
14. Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
15. Pengembangan kawasan tahunan berupa intensifikasi areal kopi arabika seluas 200 Ha dengan bantuan berupa pupuk organik 400 liter dan knapsack sprayer 40 unit dan pelatihan PHT Pengendalian OPT Kopi dan perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi .
16. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
17. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha , Klinik PHT Kakao, Pembinaan Regu OPT Tanaman Perkebunan (Kakao).
18. Melakukan pengendalian OPT dengan bekerjasama dengan petugas PHP Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan pada kelompok tani.
19. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)
20. Meningkatkan kelahiran anak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 6.700 dosis dan kelahiran 2.750 ekor .
21. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor

22. Penanggulangan penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), infeksi saluran pernafasan (CRD) pada unggas.
23. Untuk meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan memberikan bantuan ayam kukuk balenggek pada kelompok penangkar ayam kukuk balenggek dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek untuk menarik minat masyarakat membudidayakan ayam kukuk balenggek.
24. Penyediaan alsintan untuk kelompok tani.
25. Mendorong petani untuk menerapkan teknologi budidaya sesuai SOP GAP dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
26. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan pelatihan.
27. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan tenaga teknis reproduksi ternak serta memberdayakan penyuluh swadaya.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target PDRB per Kapita (ADHK) pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan penggunaan sumber daya manusia. Pada tahun 2022 alokasi anggaran sebesar Rp. 52.862.927.439,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.740.198.476,- atau 94,09%. Untuk mendukung pencapaian target kinerja kinerja PDRB Perkapita (ADHK) pada sektor pertanian di alokasikan anggaran sebesar Rp. 38.529.794.675 ,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.164.169.744,- atau 93,86% dengan sisa anggaran Rp. 2.365.624.931 ,- atau 6,14%.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja PDRB Perkapita (ADHK) Tahun 2022 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase pencapaian sasaran strategis adalah 99,99%
2. Persentase pencapaian kinerja anggaran adalah 93,86%

Untuk melihat tingkat efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 5.5. dibawah ini:

Tabel. 5.5
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator PDRB per Kapita (ADHK)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
PDRB per Kapita (ADHK)	26.530.000	26.526.648	99,99%	38.529.794.675	36.164.169.744	93,86%
				Rata-rata capaian		93,86%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						15,20%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						106,53%

Berdasarkan tabel 5.5. dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja anggaran 93,86% dengan tingkat efisiensi 15,2% dan tingkat efektifitas

106,53%, sedangkan persentase pencapaian indikator 99,99%. Dari capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran sudah optimal untuk mencapai sasaran strategis.

Selain anggaran untuk pencapaian indikator sasaran strategis juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh 103 orang PNS, 38 orang P3K dan 54 orang tenaga harian lepas. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 17 orang dari jumlah pegawai tahun 2021. Penurunan jumlah pegawai karena adanya pensiun, meninggal dunia dan mutasi pegawai serta pegawai harian lepas yang mengundurkan diri. telah mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja dan memanfaatkan SDM yang ada.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Perkapita (ADHK) di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

6. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

- Bantuan alat mesin pertanian berupa handtraktor sebanyak 2 unit, mesin potong rumput 10 unit dan cultivator 10 unit.
- Pengadaan ayam kukuak balenggek sebanyak 240 ekor betina dan 32 ekor jantan, bantuan pakan 400 kg, bantuan obat-obatan/ vitamin dan bantuan bahan kandang untuk 4 kelompok peternak dan lomba ayam kukuk balenggek sebanyak 1 event
- Pengembangan padi organic seluas 3 Ha
- Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
- Melaksanakan Sekolah lapang GAP bawang merah dan buah naga serta SL GHP bawang merah.
- Perluasan kopi arabika dengan memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 12.240 batang.
- Kegiatan pembibitan manggis, pepaya, alpukat, durian dan pisang bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi benih unggul hortikultura yang bersertifikat.
- Kegiatan pengembangan kentang dengan memberikan bantuan sarana produksi seluas 10 Ha dan pengembangan cabe merah dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada kelompok tani seluas 5 Ha
- Pengembangan penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 41,4 Ha dan varitas cisokan seluas 4 Ha dan menyalurkan benih padi dari hasil penangkaran ke kelompok tani. Kegiatan ini

merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG).

- Pengembangan ubi jalar 1 Ha dengan memberikan bantuan benih ubi jalar ke kelompok tani.
 - Penyediaan semen beku, N2 cair, container dan palstik glove untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran anak sapi dan pelaksanaan bimbingan teknologi pembuatan konsentrat/pakan ternak sapi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk membuat pakan ternak sapi yang berkualitas.
 - Pembangunan gudang pakan ternak dan penyediaan sarana untuk pengolahan pakan ternak.
7. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan areal luas tanam dengan pengembangan sumber air dan mempertahankan ketersediaan sumber ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi.
 - Renovasi gedung BPP 3 sebanyak 3 unit yaitu BPP Kubung, Tigo Lurah dan lembang Jaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat melakukan koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis.
 - Pembangunan uv dryer untuk padi sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan padi dan meningkatkan kualitas gabah.
 - Kegiatan pembangunan jalan pertanian sebanyak 151 unit bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.
8. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan dilakukan berupa pembebasan terhadap penyakit hewan menular seperti melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies, penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak dan meningkatkan fasilitas pelayanan Puskesmas dengan merenovasi Puskesmas Sumani, menyediakan sarana pendukung untuk Puskesmas berupa:
- Peralatan reproduksi berupa alat USG dan refrigerator

- Peralatan pemeriksaan klinis berupa thermometer, handscund, masker, stetoskop
 - Peralatan pengambilan sampel berupa disposable syringe
 - Sarana transportasi dan komunikasi roda dua puskesmas sebanyak 26 unit
 - Peralatan kantor puskesmas berupa icebox, filling cabinet, lemari obat, computer PC, laptop, printer, kamera, kursi kerja, meja kerja
 - Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan di puskesmas
9. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan melaksanakan SL-PHT pada tanaman perkebunan, penyediaan sarana untuk pengendalian OPT tanaman pangan dan pendampingan melaksanakan kegiatan AUTP.
10. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan berupa bimbingan teknis bagi petani dan petugas, pelatihan petani dan petugas dan pelaksanaan Sekolah lapang serta pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain program/kegiatan yang alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Solok juga terdapat kegiatan yang alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN yaitu:

C. Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022

1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha dan pembangunan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 unit .
2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan
- Kegiatan yang dilaksanakan berupa:
- a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan membangun irigasi perpompaan besar 1 unit, irigasi perpompaan menengah 1 unit, embung 1 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi 18 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas.
 - b. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian
 - c. Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan melakukan penyusunan E-RDCK untuk pendaftaran penerimaan pupuk

bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi, validasi penerima pupuk subsidi.

- d. Fasilitasi pembiayaan pertanian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
3. Program nilai tambah dan daya saing industry. Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kawasan pisang 20 Ha, kawasan kentang 20 Ha, kawasan bawang merah 65 Ha dan kawasan Durian 30 Ha.
 4. Program nilai tambah dan daya saing industry dengan kegiatan berupa pengembangan kawasan tahunan berupa bantuan sarana produksi untuk intensifikasi kopi arabika seluas 200 Ha, penanaman serih wangi seluas 20 Ha dan pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditi perkebunan 1 unit (17,94 ha).
 5. Peningkatan kelahiran ternak melalui Kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana Inseminasi Buatan (IB) dan pemberian Sertifikat NKV pada unit usaha produksi ternak.
- D. Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
1. Kegiatan pengembangan kawasan manggis seluas 8 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 2. Kegiatan pengembangan kawasan durian seluas 7,5 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 3. Kegiatan pengembangan kawasan alpukat seluas 70 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 4. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 3,75 Ha, cabe merah 4,5 Ha dan kentang 3 Ha melalui fasilitasi bantuan benih dan pupuk.
 5. Bantuan benih jagung hibrida seluas 270 Ha.
 6. Bantuan power thresher sebanyak 13 unit
 7. Pengadaan UV Dryer 1 unit.
 8. Kegiatan pelatihan pengendalian OPT kopi, klinik PHT kakao dan pembinaan regu OPT tanaman kakao yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas.

9. Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha.
10. Perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi.
11. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
12. Perluasan tanaman pinang dengan memberikan bantuan bibit pinang sebanyak 22.300 batang.
13. Bantuan bibit puyuh sebanyak 40.000 ekor, ayam 12.000 ekor dan itik 6.000 batang serta penandaan dan pendataan ternak sebanyak 1.480 penandaan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Barat.
14. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor untuk perbaikan genetic sapi.
15. Register kandang sapi.

Program dan kegiatan serta anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Solok untuk mencapai target PDRB Per Kapita (ADHK) adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.7

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
I	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	428.620.800	337.713.904	78,79
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	428.620.800	337.713.904	78,79
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.072.080.620	3.558.784.501	87,39
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	231.260.000	207.984.800	89,94
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	613.804.020	515.304.606	83,95

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
3	Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	3.227.016.600	2.835.495.095	87,87
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.779.050.470	1.027.062.836	57,73
1	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak ,Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.458.050.470	744.861.736	51,09
2	Pengawasan Peredaran Bahan/Pakan, Benih /Bibit Hijauan Pakan Ternak	321.000.000	282.201.100	87,91
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	289.784.900	224.520.233	77,48
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	289.784.900	224.520.233	77,48
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.594.112.285	28.017.829.827	97,98
1	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.233.750.000	2.222.995.000	99,52
2	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	24.191.260.485	23.826.818.961,00	98,49
3	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	1.894.301.800	1.722.269.367	90,92
4	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	274.800.000	245.746.499	89,43
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	177.041.600	133.099.807	75,18

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanamn (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	152.041.600	113.339.807	74,55
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25.000.000	19.760.000	79,04
V	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan desa	348.260.800	316.943.288	91,01
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	68.520.800	67.606.051	98,67
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	284.571.600	240.810.102	84,62
4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	133.137.800	123.385.781	92,68
	JUMLAH	38.529.794.675	36.164.169.744	93,86

Sumber: Laporan Keuangan Pemda Kab. Solok 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dengan cara sebagai berikut:

1. Perluasan areal tanam di lahan perkebunan/lahan hortikultura serta optimalisasi tumpang sari.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperpendek umur padi varitas caredek merah dari 140 HST menjadi 120 HST dengan tujuan dapat ditanam 2,5 kali dalam setahun.
3. Meningkatkan produksi benih bersertifikat dengan mengembangkan luas areal penangkaran padi sawah, melakukan pembibitan tanaman buah-buahan, melakukan pemeliharaan kebun induk kopi dan cengkeh.
4. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan bantuan benih bersertifikat dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP.
5. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit pada ternak.

6. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas tanam dengan membangun irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi air tanah dalam, irigasi air tanah dangkal dan irigasi sprinkler.
7. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung, dam parit dan long storage.
8. Membangun dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk menambah luas areal tanam sehingga dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman.
9. Fasilitasi sarana pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan alsintan.
10. Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bimtek, worksop, sekolah lapang.
11. Penyediaan sarana dan prasarana untuk petugas teknis/penyuluh/petugas IB.
12. Meningkatkan skala usaha petani melalui kewirausahaan tani dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
13. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.
14. Meningkatkan penanganan dan pengawasan untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif.
15. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara khusus kepada petugas ataupun kelompok tani.
16. Meningkatkan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak dan meningkatkan kelahiran ternak melalui optimalisasi reproduksi dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan menyediakan sarana IB seperti N2 cair, dan semen beku.
17. Untuk memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan mengusulkan Unit Usaha Produk Hewan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan sertifikat nilai control veteriner (NKV). Sertifikat NKV sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu syarat bagi unit usaha untuk melakukan ekspor.
18. Pembangunan rumah potong hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

19. Meningkatkan promosi produk unggulan dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek.
20. Meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan melakukan penangkaran ayam kukuk balenggek.
21. Melaksanakan bimtek Good Handling Practise (GHP) untuk penanganan pasca panen.
22. Mendorong petani mengikuti AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
23. Meningkatkan kualitas pakan ternak dengan pengembangan bank pakan ternak.
24. Meningkatkan pelayanan Puskeswan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan Puskeswan.
25. Peningkatan kualitas ternak untuk perbaikan genetic sapi melalui Transfer Embrio (TE).
26. Perbaikan mutu pakan sapi dengan menyediakan bahan pakan olahan maupun bahan pakan dengan membangun bank pakan.
27. Penambahan bibit sapi indukan.
28. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dengan membangun/renovasi Puskeswan, pengembangan teknologi pengolahan pakan, membangun/meningkatkan jalan produksi peternakan.
29. Meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan ruang data yang dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, computer, jaringan internet dan lain-lain. Selain itu juga meningkatkan kegiatan dempot di BPP untuk menjadi lahan percontohan sebagai salah satu cara unuk mendiseminasikan teknologi pertanian ke petani.
30. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Puskeswan seperti obat-obatan, peralatan ternak dan peralatan kesehatan hewan.
31. Mendorong peternak untuk menggunakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
32. Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan.
33. Pengembangan integrasi ternak dan tanaman.

34. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian yang bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.
35. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan meningkatkan luas lahan pertanian organik.

6. PDRB PERKAPITA (ADHB)

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Cara perhitungannya dengan membagi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya PDRB Perkapita (ADHB) dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel. 6.1
PDRB Perkapita (ADHB)

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Perkapita (ADHB)	39.010.000	39.668.150	101,69

Sumber: Data PDRB dan Jumlah Penduduk berasal dari Solok Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 6.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target PDRB Perkapita (ADHB) dengan nilai Rp. 39.010.000 dan terealisasi dengan nilai **Rp. 39.668.149** dengan capaian kinerja sebesar **101,69%**

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Perkembangan capaian target PDRB Sektor Pertanian beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut:

Tabel. 6.2
Perkembangan Meningkatnya PDRB Perkapita (ADHB)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rp)	Capaian
1.	PDRB Perkapita (ADHB)	34.540.954	35.715.343	39.668.150	109,55	96,27	101,69	48.530.000	81,74

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 6.2 dapat dilihat bahwa Realisasi PDRB Perkapita (ADHB) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **39.668.149** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **101,69%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai Rp. 48.530.000 maka capaian kinerja sebesar **81,74%**.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 6.3 di bawah ini:

Tabel. 6.3

Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB)

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	PDRB Perkapita (ADHB)	71.030.900	50.593.000	39.668.150

Sumber: Sumatera Barat dalam angka 2023, Statistik Indonesia 2023

Dari tabel 6.3 dapat dijelaskan bahwa PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar Rp. 39.668.150,- lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Rp. 50.593.00,- dan nasional dengan nilai Rp. 71.030.900,-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Sektor pertanian mempunyai peranan penting terhadap PDRB Perkapita (ADHB) karena sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Solok. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Solok tahun 2022 adalah sebesar 33,31%. Keberhasilan tercapainya target PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Solok Tahun 2022 jika dilihat dari sektor pertanian disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa komoditi pertanian. PDRB ADHB sector pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 sebesar Rp. 5257,08 milyar naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai Rp. 4830,14 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa sector pertanian berkontribusi positif terhadap PDRB ADHB Kabupaten Solok. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.4 berikut ini:

Tabel 6.4.

Perkembangan produksi komoditi pertanian tahun 2021-2022

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Padi sawah	Ton	179.316,10	171.335,32	4,66
Jagung	Ton	2.062,40	2.874,20	-28,24
Ubi Kayu	Ton	8.958,60	9.004,80	-0,51
Ubi Jalar	Ton	54.524,20	45.225,10	20,56
Kacang Tanah	Ton	229,5	229,1	0,17
Talas	Ton	416,0	430,3	-3,32
Bawang Daun	Ton	8.901,00	6.412,90	38,80
Bawang Merah	Ton	188.555,86	188.549,35	0,00
Bawang Putih	Ton	770,80	1.744,63	-55,82
B a y a m	Ton	538,9	436,7	23,40
B u n c i s	Ton	13.080,90	9.925,00	31,80
C a b e keriting	Ton	34.254,96	25.997,44	31,76
Cabe Rawit	Ton	2.699,49	2.947,17	-8,40
Jamur	Kw	26,05	17,1	52,34
Kacang Panjang	Ton	755,49	721,2	4,75
Kangkung	Ton	510,75	397,4	28,52
Kentang	Ton	19.554,10	8.014,50	143,98
K e t i m u n	Ton	438,3	315,25	39,01
Kubis	Ton	143.889,70	134.881,23	6,68
Labu siam	Ton	790,2	507,78	55,61
Petsai/sawi	Ton	2.106,30	2.379,90	-11,50
Semangka	Ton	38,1	17,65	115,25
Stroberi	Ton	71,55	42,9	66,78
Terung	Ton	5.338,00	2.608,50	104,64
Tomat	Ton	84.086,65	49.503,00	69,86
Wortel	Ton	14.653,00	15.563,30	-5,85
Alpoket	Ton	52.934,20	43.280,66	22,30
Apel	Ton	29,2	17,5	66,86
Belimbing	Ton	21,05	14,63	44,18
Duku	Ton	33,3	52,25	-36,33
Durian	Ton	7.816,78	3.936,70	98,56
Jambu Air	Ton	261,93	237,14	10,47
Jambu Biji	Ton	522,24	653,08	-20,04
Jengkol	Ton	814,1	523,03	55,66
Jeruk Besar	Ton	11,8	7,3	61,64
Jeruk siam/keprok	Ton	1.939,15	4.378,90	-55,72

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Mangga	Ton	826,38	434,19	90,32
Manggis	Ton	1.617,95	839,45	92,73
Melinjo	Ton	212,5	272,5	-22,02
Nangka	Ton	566,65	467,35	21,23
Nenas	Ton	2,56	2,1	21,90
Pepaya	Ton	1.873,30	1.343,12	39,48
Pisang	Ton	7.013,15	6.381,25	9,90
Rambutan	Ton	1775,4	860,64	106,30
Salak	Ton	93,3	78,1	19,46
Sawo	Ton	1132,55	791,99	43,00
Sirsak	Ton	595,4	843,85	-29,45
Sukun	Ton	51,75	94,9	-45,47
Buah naga	Ton	1184	341,78	246,40
Lengkeng	Ton	22,1	3,9	466,67
Jahe	Ton	659,34	457,5	44,12
Laos	Ton	534,56	368,97	44,87
Kunyit	Ton	734,13	512,95	43,11
Kapulaga	Ton	350,94	298,04	17,75
Kelapa	Ton	2.459,42	2.078,81	18,31
Karet	Ton	2.322,10	2.734,48	-15,08
Kopi Arabika	Ton	1.320,42	1.294,10	1,96
Kopi Robusta	Ton	3.171,70	3.104,03	2,18
Cengkeh	Ton	657,72	639,73	2,81
Kulit Manis	Ton	2.949,46	215,45	1268,98
Tebu	Ton	754,15	766,04	-1,55
Cokelat	Ton	1.912,05	1.885,66	1,40
Tembakau	Ton	29,55	13,85	113,36
Pala	Ton	14,83	13,42	10,51
Enau	Ton	78,57	124,21	-36,74
Kemiri	Ton	1.274,75	985,24	29,38
Teh	Ton	980,08	923,98	6,07
Kapuk	Ton	186,54	24,36	665,76
Pinang	Ton	399,75	216,79	84,40
Daging Sapi	Ton	1.057,42	1.184,94	-10,76
Daging Kerbau	Ton	6,756	8,01	-15,66
Daging Kambing	Ton	24,768	50,7	-51,15

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Daging Ayam Buras	Ton	358,89	375,17	-4,34
Daging Ras Pedaging	Ton	3.547,76	3.270,14	8,49
Daging Ras Petelur	Ton	46,723	51,5	-9,28
Daging Itik	Ton	64,32	68,18	-5,66
Telur Ayam Ras	Ton	326,71	360,11	-9,27
Telur Ayam Buras	Ton	122,35	127,9	-4,34
Telur Itik	Ton	600,52	636,54	-5,66
Susu Sapi	Ton	206,55	68,85	200,00
Susu Kerbau	Ton	29,27	49,18	-40,48
Total	Ton	875.099,74	768.848,23	13,82

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2022

Dari tabel 6.4 dapat dilihat bahwa produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 meningkat 13,82% dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan produktifitas. sedangkan untuk produksi peternakan yang mengalami penurunan produksi karena turunnya populasi ternak. Penurunan produksi terjadi karena turunnya populasi ternak yang disebabkan oleh:

1. Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan kerbau. Kasus PMK tidak saja terdapat di Kabupaten Solok tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. PMK dapat berpengaruh langsung terhadap system produksi ternak dan penurunan fertilitas ternak sehingga berpengaruh terhadap penambahan populasi ternak. PMK juga dapat menyebabkan kematian pada ternak. Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi pada ternak ruminansia yang berdampak pada peningkatan produksi daging.
2. Penurunan populasi pada unggas karena adanya kasus infeksi saluran pernafasan (CRD) yang menyebabkan kematian pada ternak.

Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 belum optimal. Belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan

perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktifitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.

Adapun kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi adalah:

1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan pengembangan areal penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 16,2 Ha dan varitas cisokan seluas 45,4 Ha. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG). Selain penangkaran dilakukan fasilitasi bantuan benih padi bersertifikat untuk kelompok tani dengan luas areal 2.380 Ha.
2. Penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha.
3. Pengembangan ubi jalar seluas 1 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani.
4. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit, irigasi air tanah dalam 4 unit, irigasi tanah dangkal 3 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 23 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.
5. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung 1 unit.
6. Pengembangan kawasan bawang merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 71,25 Ha dan bimbingan tekhnis penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
7. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 9,5 Ha.serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabe merah.
8. Pengembangan kawasan kentang melalui fasilitasi sarana produksi seluas 33 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kentang.
9. Pengembangan kawasan manggis melalui fasilitasi sarana produksi seluas 8 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP) berasal dari APBD Propinsi Sumatera

Barat dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi manggis.

10. Pengembangan kawasan durian melalui fasilitasi sarana produksi seluas seluas 37,5 Ha yang berasal dari APBN 30 Ha dan APBD Propinsi Sumatera Barat 7,5 Ha dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi durian.
11. Pengembangan kawasan pisang melalui fasilitasi sarana produksi budidaya dan sarana pasca panen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pisang. Bantuan fasilitasi sarana produksi ditargetkan seluas 20 Ha yang berasal dari APBN dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
12. Pengembangan kawasan pepaya melalui bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
13. Pengembangan kawasan alpukat melalui fasilitasi sarana produksi seluas 70 Ha yang berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan Aripan serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi alpukat.
14. Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
15. Pengembangan kawasan tahunan berupa intensifikasi areal kopi arabika seluas 200 Ha dengan bantuan berupa pupuk organik 400 liter dan knapsack sprayer 40 unit dan pelatihan PHT Pengendalian OPT Kopi dan perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi .
16. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.

17. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha , Klinik PHT Kakao, Pembinaan Regu OPT Tanaman Perkebunan (Kakao).
18. Melakukan pengendalian OPT dengan bekerjasama dengan petugas PHP Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan pada kelompok tani.
19. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)
20. Meningkatkan kelahiran anak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 6.700 dosis dan kelahiran 2.750 ekor .
21. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor
22. Penanggulangan penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), infeksi saluran pernafasan (CRD) pada unggas.
23. Untuk meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan memberikan bantuan ayam kukuk balenggek pada kelompok penangkar ayam kukuk balenggek dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek untuk menarik minat masyarakat membudidayakan ayam kukuk balenggek.
24. Penyediaan alsintan untuk kelompok tani.
25. Mendorong petani untuk menerapkan tekhnologi budidaya sesuai SOP GAP dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
26. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan pelatihan.
27. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan tenaga tekhnis reproduksi ternak serta memberdayakan penyuluh swadaya.

Selain sektor pertanian PDRB (ADHK) juga dipengaruhi oleh sektor perikanan yaitu produksi perikanan Kabupaten Solok memberikan sumbangan sebesar 1,04% dari total produksi perikanan propinsi. Produksi perikanan propinsi terdiri dari produksi perikanan budidaya sebesar 268.774,3 ton dan produksi perikanan tangkap 218.688,66 ton. Untuk produksi perikanan budidaya Kabupaten Solok memberikan sumbangan sebesar 4.483,54 ton 1,67% dan perikanan tangkap 823,10 ton 0,38% terhadap produksi perikanan propinsi. Sedangkan untuk data persentase peningkatan produksi perikanan nasional tahun 2022 belum ditemukan data sampai akhir tahun. Pertumbuhan produksi nasional sampai Triwulan I sebesar (2,72)%.(Sumber: situs rilis data kementerian kelautan dan perikanan)

Dibandingkan dengan target nasional sebesar 27,55 juta ton (produksi tangkap 8,08 juta ton dan produksi budidaya 19,47 juta ton), kontribusi Kabupaten Solok hanya sebesar 5.306,64 ton (0,02%) untuk pencapaian target nasional. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Solok tidak mempunyai wilayah laut sebagai produksi terbesar dalam penangkapan ikan.

Walaupun target kinerja produksi perikanan pada tahun 2022 sudah tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya namun masih ditemukannya beberapa kendala dan permasalahan terutama pada produksi budidaya perikanan yang disebabkan oleh berbagai faktor yakni:

1. Mahalnya biaya produksi terutama biaya pakan pabrikan sementara harga jual ikan tidak mengalami peningkatan
2. Rata-rata induk pada Unit Pemenuhan Rakyat (UPR) sudah tidak layak pakai (tidak produktif) yang mengakibatkan produksi benih rendah dan pertumbuhan yang lambat
3. Penurunan jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) akibat sulitnya biaya modal usaha dan adanya kebijakan zero KJA menyebabkan sedikitnya jumlah KJA yang bertambah. Pada akhir 2021 KJA berjumlah 147 dan pada akhir tahun 2022 KJA berjumlah sebanyak 171 unit
4. Sudah rendahnya tingkat produksi karamba yang berproduksi di Kabupaten Solok akibat kesulitan dalam modal usaha dan karamba yang ada sudah tidak layak lagi dipakai
5. Tidak berfungsinya mesin pembuatan pakan yang ada pada kelompok karena kesulitan dalam memperoleh bahan baku
6. Belum adanya sistem plasma di sektor perikanan yang menopang permodalan pelaku usaha perikanan di Kabupaten Solok

Sedangkan pada perairan umum, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 49,26 %. Walaupun produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan namun terdapat berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi di lapangan. Untuk peningkatan produksi perairan umum yang menjadi salah satu kendalanya adalah berkembangnya alat tangkap bagan yang tidak ramah lingkungan. Untuk mengatasi berkembangnya bagan dan punahnya ikan endemik Danau Singkarak, serta dalam upaya peningkatan produksi perikanan perairan umum, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sendiri, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Pusat

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja PDRB Perkapita (ADHB) Tahun 2022 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase pencapaian sasaran strategis adalah 101,69%
2. Persentase pencapaian kinerja anggaran adalah 93,86%

Untuk melihat tingkat efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 6.5. dibawah ini:

Tabel. 6. 5

Efisiensi dan Efektifitas Indikator PDRB Perkapita (ADHB)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
PDRB Perkapita (ADHB)	39.010.000	39.668.150	101,69	39.636.771.745	37.215.051.683	93,89%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						6,11%
Tingkat Efektifitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						108,31%

Pada tabel 6.5 dapat dilihat Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian PDRB Perkapita (ADHB) pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dimana anggaran yang disediakan sebanyak 39,636.771.745 dan terealisasi sebanyak 37.215.051.683 atau 93,89% dengan efisiensi sebanyak 2.421.720.062,00 atau 6,11% dan jika dibandingkan capaian kinerja 101,69% untuk indikator ini maka didapat tingkat efektifitas 108,31%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Perkapita (ADHB) di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - Bantuan alat mesin pertanian berupa handtraktor sebanyak 2 unit, mesin potong rumput 10 unit dan cultivator 10 unit.
 - Pengadaan ayam kukuak balenggek sebanyak 240 ekor betina dan 32 ekor jantan, bantuan pakan 400 kg, bantuan obat-obatan/vitamin dan bantuan bahan kandang untuk 4 kelompok peternak dan lomba ayam kukuk balenggek sebanyak 1 event
 - Pengembangan padi organic seluas 3 Ha
 - Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
 - Melaksanakan Sekolah lapang GAP bawang merah dan buah naga serta SL GHP bawang merah.
 - Perluasan kopi arabika dengan memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 12.240 batang.
 - Kegiatan pembibitan manggis, pepaya, alpukat, durian dan pisang bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi benih unggul hortikultura yang bersertifikat.

- Kegiatan pengembangan kentang dengan memberikan bantuan sarana produksi seluas 10 Ha dan pengembangan cabe merah dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada kelompok tani seluas 5 Ha
 - Pengembangan penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 41,4 Ha dan varitas cisokan seluas 4 Ha dan menyalurkan benih padi dari hasil penangkaran ke kelompok tani. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG).
 - Pengembangan ubi jalar 1 Ha dengan memberikan bantuan benih ubi jalar ke kelompok tani.
 - Penyediaan semen beku, N2 cair, container dan palstik glove untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran anak sapi dan pelaksanaan bimbingan teknologi pembuatan konsentrat/pakan ternak sapi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk membuat pakan ternak sapi yang berkualitas.
 - Pembangunan gudang pakan ternak dan penyediaan sarana untuk pengolahan pakan ternak.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan areal luas tanam dengan pengembangan sumber air dan mempertahankan ketersediaan sumber ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi.
 - Renovasi gedung BPP 3 sebanyak 3 unit yaitu BPP Kubung, Tigo Lurah dan lembang Jaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat melakukan koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis.
 - Pembangunan uv dryer untuk padi sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan padi dan meningkatkan kualitas gabah.
 - Kegiatan pembangunan jalan pertanian sebanyak 151 unit bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.
3. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan dilakukan berupa pembebasan terhadap penyakit

hewan menular seperti melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies, penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak dan meningkatkan fasilitas pelayanan Puskesmas dengan merenovasi Puskesmas Sumani, menyediakan sarana pendukung untuk Puskesmas berupa:

- Peralatan reproduksi berupa alat USG dan refrigerator
 - Peralatan pemeriksaan klinis berupa thermometer, handscund, masker, stetoskop
 - Peralatan pengambilan sampel berupa disposable syringe
 - Sarana transportasi dan komunikasi roda dua puskesmas sebanyak 26 unit
 - Peralatan kantor puskesmas berupa icebox, filling cabinet, lemari obat, computer PC, laptop, printer, kamera, kursi kerja, meja kerja
 - Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan di puskesmas
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan melaksanakan SL-PHT pada tanaman perkebunan, penyediaan sarana untuk pengendalian OPT tanaman pangan dan pendampingan melaksanakan kegiatan AUTP.
5. Program Penyuluhan Pertanian
- Kegiatan berupa bimbingan teknis bagi petani dan petugas, pelatihan petani dan petugas dan pelaksanaan Sekolah lapang serta pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain program/kegiatan yang alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Solok juga terdapat kegiatan yang alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN yaitu:

- A. Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022
1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha dan pembangunan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 unit .
 2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan
Kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan membangun irigasi perpompaan besar 1 unit, irigasi perpompaan menengah 1 unit, embung 1 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi 18 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas.

- b. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian
 - c. Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan melakukan penyusunan E-RDKK untuk pendaftaran penerimaan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi, validasi penerima pupuk subsidi.
 - d. Fasilitasi pembiayaan pertanian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
 3. Program nilai tambah dan daya saing industry. Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kawasan pisang 20 Ha, kawasan kentang 20 Ha, kawasan bawang merah 65 Ha dan kawasan Durian 30 Ha.
 4. Program nilai tambah dan daya saing industry dengan kegiatan berupa pengembangan kawasan tahunan berupa bantuan sarana produksi untuk intensifikasi kopi arabika seluas 200 Ha, penanaman serih wangi seluas 20 Ha dan pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditi perkebunan 1 unit (17,94 ha).
 5. Peningkatan kelahiran ternak melalui Kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana Inseminasi Buatan (IB) dan pemberian Sertifikat NKV pada unit usaha produksi ternak.
- B. Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
1. Kegiatan pengembangan kawasan manggis seluas 8 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 2. Kegiatan pengembangan kawasan durian seluas 7,5 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 3. Kegiatan pengembangan kawasan alpukat seluas 70 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
 4. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 3,75 Ha, cabe merah 4,5 Ha dan kentang 3 Ha melalui fasilitasi bantuan benih dan pupuk.
 5. Bantuan benih jagung hibrida seluas 270 Ha.
 6. Bantuan power thresher sebanyak 13 unit

7. Pengadaan UV Dryer 1 unit.
8. Kegiatan pelatihan pengendalian OPT kopi, klinik PHT kakao dan pembinaan regu OPT tanaman kakao yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas.
9. Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha.
10. Perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi.
11. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
12. Perluasan tanaman pinang dengan memberikan bantuan bibit pinang sebanyak 22.300 batang.
13. Bantuan bibit puyuh sebanyak 40.000 ekor, ayam 12.000 ekor dan itik 6.000 batang serta penandaan dan pendataan ternak sebanyak 1.480 penandaan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Barat.
14. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor untuk perbaikan genetic sapi.
15. Register kandang sapi.

Selain sektor pertanian indikator ini juga didukung oleh sektor perikanan yaitu Sektor perikanan mempunyai peranan penting terhadap PDRB Perkapita (ADHB) karena sektor perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Solok. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Solok tahun 2022 adalah sebesar 33,31%. Keberhasilan tercapainya target PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Solok Tahun 2022 jika dilihat dari sektor perikanan disebabkan adanya peningkatan produksi dari perikanan budidaya juga perikanan tangkap perairan umum. PDRB ADHB sector pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 sebesar Rp. 5257,08 milyar naik dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai Rp. 4830,14 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa sector perikanan berkontribusi positif terhadap PDRB ADHB Kabupaten Solok. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.6 berikut ini:

Tabel 6.6
Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2020-2022

No	Uraian	Pertumbuhan Produksi (%)		
		2020	2021	2022
1	Produksi perikanan budidaya	(40,40)	(3,22)	60,06
2	Pertumbuhan produksi perikanan perairan umum	16,18	12,77	49,26
3	Total pertumbuhan produksi perikanan Kab. Solok	(35,81)	(0,92)	18,89

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Dari Tabel 6.5 dapat dilihat dari tahun sebelumnya capaian kinerja peningkatan produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 843,02 ton/18,89% juga terlihat bahwa peningkatan produksi perikanan disebabkan oleh kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 60,06 % maupun produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan sebesar 49,26%.

Produksi perikanan tahun 2020-2022 baik produksi budidaya maupun produksi perairan umum dapat dilihat pada berikut:

Tabel 6.7
Produksi Perikanan Kabupaten Solok Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Realisasi (ton)		
		2020	2021	2022
1	Produksi perikanan budidaya	3.856,81	3.732,48	4483,54
2	Produksi perikanan perairan umum	648,35	731,14	823,10
	Jumlah	4.505,16	4.463,62	5306,64

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Produksi perikanan perairan umum/tangkap tahun 2020-2022 berdasarkan jenis perairan umum adalah sebagai berikut:

Tabel 6.8
Produksi Perikanan Perikanan Perairan Umum/Tangkap Tahun 2020 - 2022

No	Uraian	Produksi (ton)		
		2020	2021	2022
1	Danau	422,64	490,22	570,34
2	Sungai	178,18	190,47	198,80
3	Rawa	8,90	10,67	11,58
4	Genangan Air Lainnya	38,63	39,78	42,38

	Total	648,35	731,14	823,10
--	--------------	---------------	---------------	---------------

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Sedangkan data produksi perikanan budidaya dari tahun 2020-2022 berdasarkan lokasi pembesarannya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.9

Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2020 – 2022 Berdasarkan Lokasi Usaha

No	Budidaya	Produksi (ton)		
		2020	2021	2022
1	Sawah	195,11	84,09	234,06
2	Kolam	2.121,02	2.463,50	2466,96
3	Saluran irigasi	207,36	94,10	242,01
4	Kolam Air Deras	671,25	569,17	779,21
5	Karamba Jaring Apung	661,37	520,90	760,71
6	Karamba	0,70	0,72	0,59
	Total	3.856,81	3.732,48	4483,54

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Capaian kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 20,12%.

Usaha perikanan budidaya sangat didukung dengan ketersediaan benih yang ada. Benih ikan ini diproduksi oleh Balai Benih Ikan Sungai Janieh dan instalasi Koto Baru serta dari Unit Perbenihan Rakyat (UPR). Produksi benih dan pertumbuhannya dapat dilihat pada berikut:

Tabel 6.10

Produksi Perbenihan dan Pertumbuhannya Tahun 2020- 2022

No	Uraian	Produksi (ton)		
		2020	2021	2022
1	Produksi Benih	37.152.630 ekor	34.299.322 ekor	136.261.000 ekor
2	Pertumbuhan Produksi	(29,00)%	(7,68)%	297,27%

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan produksi benih ikan sebesar 297,27% pada tahun 2022. Peningkatan produksi benih terjadi baik di BBI maupun di Unit Pembenihan Rakyat (UPR).

Produksi benih di Kabupaten Solok tahun 2020-2022 berdasarkan lokasi pembenihannya sebagaimana Tabel 6.11.

Tabel 6.11

Produksi Perbenihan Berdasarkan Lokasi Pembenihannya Tahun 2020-2022

No	Budidaya	Produksi (ton)		
		2020	2021	2022
1	UPR	36.592.644	34.187.819	135.474.000
2	BBI	559.986	111.503	787.000
	Total	37.152.630	34.299.322	136.261.000

Sumber: Dinas Perikanan dan Pangan Kab. Solok, 2022

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Perkapita (ADHB) di Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Bantuan benih ikan Mas sebanyak 37.700 ekor, Nila 40.000 ekor dan Lele 28.125 ekor (APBD) kepada 17 kelompok Pokdakan.
 - Bantuan Rehab Kolam Unit Pembenuhan Rakyat (UPR) di Nagari Koto Baru (APBD)
 - Pengukuran kualitas perairan budidaya maupun perairan umum
 - Pelatihan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenuhan Ikan yang Baik (CPIB) bagi 10 orang pembudidaya ikan
 - Bantuan pakan dan natura untuk BBI (APBD)
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Pemberian bantuan sarana penangkapan yang ramah lingkungan bagi nelayan melalui alokasi APBD berupa pengadaan jaring sebanyak 3 Paket bagi 3 kelompok nelayan yakni: 1) Kelompok Nelayan Batu Batonggok Ba'ari, Jorong Gando Nagari Panningahan 2) Kelompok Nelayan Bungo Palo Jorong Kaluku Nagari Singkarak, 3) Kelompok Nelayan Kerang Danau Jorong Biteh Nagari Kacang,
 - Bantuan benih ikan APBD Murni Provinsi Sumbar (3 kelompok) dan Aspirasi DPRD Provinsi Sumbar (8 kelompok) kepada Kabupaten Solok berupa Bantuan benih ikan untuk perairan umum daratan berupa:
 - Benih Ikan Gariang sebanyak 83.200 ekor
 - Benih Ikan Nilem sebanyak 171.400 ekor
 - Benih Ikan Baung sebanyak 61.500 ekor
 - Bantuan Pembangunan Reservat dari APBD Provinsi sebanyak 2 unit dengan kelompok penerima yaitu:
 - Pokmaswas Balam Tigo Gayo Jorong Usak Nagari Alahan panjang Kecamatan Lembah Gumanti
 - Pokmaswas Kerang Danau Jorong Biteh Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak
 - Bantuan Alat Tangkap Ramah Lingkungan dari APBD Provinsi juga berupa mesin tempel (20 unit) dan jaring (50 unit)
 - Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan bagi 3 kelompok nelayan

- Adanya gerakan perairan umum (danau) bersih sehingga kualitas air mendukung pertumbuhan perkembangan ikan
 - Pembinaan bagi 59 kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas)
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pembinaan bagi 25 kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) hasil perikanan berupa penggaraman, pengasapan dan penggorengan yang ada di Kabupaten Solok
 - Pemberian sarana pengolahan hasil perikanan melalui alokasi dana APBN berupa 1 unit chest freezer kapasitas 310 liter bagi Poklahsar Tabiang Biduak Lestari Paninggahan dan Jaso Danau Nagari Tikalak Kecamatan X Kotom Singkarak
 - Bantuan olahan hasil perikanan ke 10 Nagari dalam rangka penanganan dan pencegahan Stunting melalui Gerakan Makan Ikan (GEMARIKAN)
- Bantuan olahan yang diberikan sebanyak 4 jenis:
- ✓ Sumpia bilih sebanyak 700 bungkus
 - ✓ Spring rol tuna sebanyak 700 bungkus
 - ✓ Somay tuna sebanyak 700 bungkus
 - ✓ Samosa Tuna sebanyak 700 bungkus
- Memperkenalkan dan menciptakan diversifikasi dan inovasi olahan hasil perikanan melalui lomba Ekspos Kegiatan Forikan se Provinsi Sumatera Barat dengan meraih Juara Harapan II pada tanggal 6 Juli 2022 di Padang
 - Mengikuti Lomba Masak Serba Ikan dan Lomba Inovasi Berbahan Baku Ikan tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - Pelaksanaan Sosialisasi Gemar Makan Ikan bagi 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solok
 - Sosialisasi Gemarikan melalui media cetak (leaflet)

Program dan kegiatan serta anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Solok untuk mencapai target PDRB Perkapita (ADHB) adalah sebagai berikut:

Tabel. 6.12

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
I	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	428.620.800	337.713.904	78,79

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.072.080.620	3.558.784.501	87,39
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.779.050.470	1.027.062.836	57,73
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	289.784.900	224.520.233	77,48
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.594.112.285	28.017.829.827	97,98
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	177.041.600	133.099.807	75,18
V	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	115.422.305	111.654.085	96,7
1	Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Satu Daerah Kota/Kabupaten	115.422.305	111.654.085	96,7
VII	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	736.724.855	698.210.536	94,8
1	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	13.270.000	13.205.000	99,5
2	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	723.454.855	685.005.536	94,69
VIII	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	254.829.910	241.017.318	94,58

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan kecil	30.614.605	30.506.609	99,65
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam Satu Kabupaten Kota	224.215.305	210.510.709	93,89
JUMLAH		39.636.771.745,00	37.215.051.683,00	93,89

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan PDRB Per kapita (ADHB) Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dengan cara sebagai berikut

1. Perluasan areal tanam di lahan perkebunan/lahan hortikultura serta optimalisasi tumpang sari.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperpendek umur padi varitas caredek merah dari 140 HST menjadi 120 HST dengan tujuan dapat ditanam 2,5 kali dalam setahun.
3. Meningkatkan produksi benih bersertifikat dengan mengembangkan luas areal penangkaran padi sawah, melakukan pembibitan tanaman buah-buahan, melakukan pemeliharaan kebun induk kopi dan cengkeh.
4. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan bantuan benih bersertifikat dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP.
5. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit pada ternak.
6. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas tanam dengan membangun irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi air tanah dalam , irigasi air tanah dangkal dan irigasi sprinkler.
7. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung, dam parit dan long storage
8. Membangun dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk menambah luas areal tanam sehingga dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman.
9. Fasilitasi sarana pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan alsintan

10. Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bimtek, worksop, sekolah lapang.
11. Penyediaan sarana dan prasarana untuk petugas tekhnis/penyuluh/petugas IB
12. Meningkatkan skala usaha petani melalui kewirausahaan tani dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
13. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.
14. Meningkatkan penanganan dan pengawasan untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif
15. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara khusus kepada petugas ataupun kelompok tani.
16. Meningkatkan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak dan meningkatkan kelahiran ternak melalui optimalisasi reproduksi dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan menyediakan sarana IB seperti N2 cair,dan semen beku.
17. Untuk memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka Dinas Pertanian berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan mengusulkan Unit Usaha Produk Hewan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan sertifikat nilai control veteriner (NKV). Sertifikat NKV sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu syarat bagi unit usaha untuk melakukan ekspor.
18. Pembangunan rumah potong hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
19. Meningkatkan promosi produk unggulan dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek.
20. Meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan melakukan penangkaran ayam kukuk balenggek.
21. Melaksanakan bimtek Good Handling Practise (GHP) untuk penanganan pasca panen.
22. Mendorong petani mengikuti AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
23. Meningkatkan kualitas pakan ternak dengan pengembangan bank pakan ternak.

24. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan Puskesmas.
25. Peningkatan kualitas ternak untuk perbaikan genetic sapi melalui Transfer Embrio (TE).
26. Perbaikan mutu pakan sapi dengan menyediakan bahan pakan olahan maupun bahan pakan dengan membangun bank pakan
27. Penambahan bibit sapi indukan
28. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dengan membangun/renovasi Puskesmas, pengembangan teknologi pengolahan pakan, membangun/meningkatkan jalan produksi peternakan
29. Meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan ruang data yang dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, computer, jaringan internet dan lain-lain. Selain itu juga meningkatkan kegiatan demplot di BPP untuk menjadi lahan percontohan sebagai salah satu cara untuk mendiseminasikan teknologi pertanian ke petani
30. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas seperti obat-obatan, peralatan ternak dan peralatan kesehatan hewan.
31. Mendorong peternak untuk menggunakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggung jawaban asuransi.
32. Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan
33. Pengembangan integrasi ternak dan tanaman.
34. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian yang bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian
35. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan meningkatkan luas lahan pertanian organik.
36. Pemberian bantuan benih dan pakan ikan bagi kelompok pembudidaya ikan secara berkelanjutan dalam bentuk paket teknologi perikanan
37. Pengadaan calon induk unggul dan pakan induk bagi UPR
38. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pembenihan dan pembesaran bagi kelompok pembudidaya

39. Pelatihan teknologi budidaya, pengendalian hama penyakit, CBIB dan CPIB
40. Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif
41. Pengusulan pengadaan mesin pakan melalui APBN
42. Mendorong investor dalam pendirian pabrik pakan mandiri di Kabupaten Solok guna memudahkan dalam memperoleh pakan dengan harga yang lebih terjangkau
43. Pembenahan kelembagaan perikanan melalui pelatihan dan pembinaan
44. Penelitian zoonasi dan carrying capacity oleh lembaga penelitian untuk penyusunan regulasi
45. Penyediaan obat-obatan untuk pengendalian hama penyakit
46. Fasilitasi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan bagi nelayan
47. Mendorong swadaya nagari untuk membuat daerah konservasi di perairan umum
48. Mendorong nagari untuk menyusun Peraturan nagari tentang Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan
49. Mendorong terbentuknya Kampung Perikanan
50. Peningkatan pengawasan perairan umum dan mengaktifkan Kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
51. Memperbanyak wilayah konservasi melalui fasilitasi APBD Propinsi dan APBN
52. Pembinaan berkelanjutan bagi Kelompok nelayan dan Kelompok masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
53. Penyebaran bibit ikan di perairan umum baik danau, sungai, embung dan lubuk larangan
54. Menjalin kerjasama dengan BUMN dan BUMD dalam upaya penyelamatan lingkungan perairan umum

7. PENGELUARAN PERKAPITA

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi

jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya pengeluaran per kapita dapat dilihat pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel. 7.1
Pengeluaran Perkapita

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengeluaran Perkapita	10.344.000	10.539.000	102,35

Sumber: Solok Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 7.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Pengeluaran Perkapita dengan nilai Rp. 10.297.000 dan terealisasi **Rp. 10.539.000** dengan capaian kinerja sebesar **102,35%**

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 7.2
Perkembangan Meningkatnya Pengeluaran perkapita

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengeluaran Perkapita	10.171.000	10.215.000	10.539.000	NA	99,21	102,35	11.242.000	93,74

Sumber: Solok Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 7.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Pengeluaran Perkapita tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **Rp. 10.539.000** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **102,35%** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai Rp. 11.242.000 maka capaian kinerja telah mencapai **93,74%**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Pengeluaran Perkapita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 7.3 di bawah ini:

Tabel. 7.3
Perbandingan Pengeluaran Perkapita

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Pengeluaran Perkapita	11.479.000	11.130.000	10.539.000

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2022

Dari tabel 7.3 dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran Perkapita Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar Rp. 10.539.000,- lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dengan Pengeluaran sebesar Rp. 11.130.000,-

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya target Indikator Pengeluaran Perkapita adalah:

1. Meningkatnya mobilitas masyarakat setelah adanya relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan dan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel atau penginapan;
2. Peningkatan kunjungan wisatawan juga mengakibatkan tumbuhnya sektor usaha makanan dan minuman serta sektor transportasi
3. Naiknya pendapatan berhubungan dengan naiknya produksi komoditi pertanian. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 7.4 berikut ini:

Tabel. 7.4.

Perkembangan produksi komoditi pertanian tahun 2021-2022

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Padi sawah	Ton	179.316,10	171.335,32	4,66
Jagung	Ton	2.062,40	2.874,20	-28,24
Ubi Kayu	Ton	8.958,60	9.004,80	-0,51
Ubi Jalar	Ton	54.524,20	45.225,10	20,56
Kacang Tanah	Ton	229,5	229,1	0,17
Talas	Ton	416,0	430,3	-3,32
Bawang Daun	Ton	8.901,00	6.412,90	38,80
Bawang Merah	Ton	188.555,86	188.549,35	0,00
Bawang Putih	Ton	770,80	1.744,63	-55,82
B a y a m	Ton	538,9	436,7	23,40

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
B u n c i s	Ton	13.080,90	9.925,00	31,80
C a b e keriting	Ton	34.254,96	25.997,44	31,76
Cabe Rawit	Ton	2.699,49	2.947,17	-8,40
Jamur	Kw	26,05	17,1	52,34
Kacang Panjang	Ton	755,49	721,2	4,75
Kangkung	Ton	510,75	397,4	28,52
Kentang	Ton	19.554,10	8.014,50	143,98
K e t i m u n	Ton	438,3	315,25	39,01
Kubis	Ton	143.889,70	134.881,23	6,68
Labu siam	Ton	790,2	507,78	55,61
Petsai/sawi	Ton	2.106,30	2.379,90	-11,50
Semangka	Ton	38,1	17,65	115,25
Stroberi	Ton	71,55	42,9	66,78
Terung	Ton	5.338,00	2.608,50	104,64
Tomat	Ton	84.086,65	49.503,00	69,86
Wortel	Ton	14.653,00	15.563,30	-5,85
Alpokate	Ton	52.934,20	43.280,66	22,30
Apel	Ton	29,2	17,5	66,86
Belimbing	Ton	21,05	14,63	44,18
Duku	Ton	33,3	52,25	-36,33
Durian	Ton	7.816,78	3.936,70	98,56
Jambu Air	Ton	261,93	237,14	10,47
Jambu Biji	Ton	522,24	653,08	-20,04
Jengkole	Ton	814,1	523,03	55,66
Jeruk Besar	Ton	11,8	7,3	61,64
Jeruk siam/keprok	Ton	1.939,15	4.378,90	-55,72
Mangga	Ton	826,38	434,19	90,32
Manggis	Ton	1.617,95	839,45	92,73
Melinjo	Ton	212,5	272,5	-22,02
Nangka	Ton	566,65	467,35	21,23
Nenas	Ton	2,56	2,1	21,90
Pepaya	Ton	1.873,30	1.343,12	39,48
Pisang	Ton	7.013,15	6.381,25	9,90
Rambutan	Ton	1775,4	860,64	106,30
Salak	Ton	93,3	78,1	19,46
Sawo	Ton	1132,55	791,99	43,00

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Sirsak	Ton	595,4	843,85	-29,45
Sukun	Ton	51,75	94,9	-45,47
Buah naga	Ton	1184	341,78	246,40
Lengkeng	Ton	22,1	3,9	466,67
Jahe	Ton	659,34	457,5	44,12
Laos	Ton	534,56	368,97	44,87
Kunyit	Ton	734,13	512,95	43,11
Kapulaga	Ton	350,94	298,04	17,75
Kelapa	Ton	2.459,42	2.078,81	18,31
Karet	Ton	2.322,10	2.734,48	-15,08
Kopi Arabika	Ton	1.320,42	1.294,10	1,96
Kopi Robusta	Ton	3.171,70	3.104,03	2,18
Cengkeh	Ton	657,72	639,73	2,81
Kulit Manis	Ton	2.949,46	215,45	1268,98
Tebu	Ton	754,15	766,04	-1,55
Cokelat	Ton	1.912,05	1.885,66	1,40
Tembakau	Ton	29,55	13,85	113,36
Pala	Ton	14,83	13,42	10,51
Enau	Ton	78,57	124,21	-36,74
Kemiri	Ton	1.274,75	985,24	29,38
Teh	Ton	980,08	923,98	6,07
Kapuk	Ton	186,54	24,36	665,76
Pinang	Ton	399,75	216,79	84,40
Daging Sapi	Ton	1.057,42	1.184,94	-10,76
Daging Kerbau	Ton	6,756	8,01	-15,66
Daging Kambing	Ton	24,768	50,7	-51,15
Daging Ayam Buras	Ton	358,89	375,17	-4,34
Daging Ras Pedaging	Ton	3.547,76	3.270,14	8,49
Daging Ras Petelur	Ton	46,723	51,5	-9,28
Daging Itik	Ton	64,32	68,18	-5,66
Telur Ayam Ras	Ton	326,71	360,11	-9,27
Telur Ayam Buras	Ton	122,35	127,9	-4,34
Telur Itik	Ton	600,52	636,54	-5,66
Susu Sapi	Ton	206,55	68,85	200,00
Susu Kerbau	Ton	29,27	49,18	-40,48

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Total	Ton	875.099,74	768.848,23	13,82

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2022

Dari tabel 7.4 dapat dilihat bahwa produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 meningkat 13,82% dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Agar produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terus meningkat setiap tahun perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas. Sedangkan untuk komoditi peternakan diperlukan upaya untuk meningkatkan populasi ternak.

Produksi komoditi pertanian tertinggi pada tanaman bawang merah yaitu sebesar 188.555,86 ton disusul dengan produksi padi sebesar sebesar 179.316,1 ton. Untuk beberapa komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang mengalami penurunan produksi disebabkan oleh turunnya luas tanam, luas panen dan produktifitas, sedangkan untuk produksi peternakan yang mengalami penurunan produksi karena turunnya populasi ternak. Penurunan produksi terjadi karena turunnya populasi ternak yang disebabkan oleh:

1. Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan kerbau. Kasus PMK tidak saja terdapat di Kabupaten Solok tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. PMK dapat berpengaruh langsung terhadap system produksi ternak dan penurunan fertilitas ternak sehingga berpengaruh terhadap penambahan populasi ternak. PMK juga dapat menyebabkan kematian pada ternak. Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi pada ternak ruminansia yang berdampak pada peningkatan produksi daging.
2. Penurunan populasi pada unggas karena adanya kasus infeksi saluran pernafasan (CRD) yang menyebabkan kematian pada ternak.

Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 belum optimal. Belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas panen dan produktifitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.

Adapun kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi adalah:

1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan pengembangan areal penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 16,2 Ha dan varitas cisokan seluas 45,4 Ha. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi

bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG). Selain penangkaran dilakukan fasilitasi bantuan benih padi bersertifikat untuk kelompok tani dengan luas areal 2.380 Ha.

2. Penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha.
3. Pengembangan ubi jalar seluas 1 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani.
4. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit, irigasi air tanah dalam 4 unit, irigasi tanah dangkal 3 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 23 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.
5. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung 1 unit.
6. Pengembangan kawasan bawang merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 71,25 Ha dan bimbingan teknis penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
7. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 9,5 Ha. serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabe merah.
8. Pengembangan kawasan kentang melalui fasilitasi sarana produksi seluas 33 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kentang.
9. Pengembangan kawasan manggis melalui fasilitasi sarana produksi seluas 8 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP) berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi manggis.
10. Pengembangan kawasan durian melalui fasilitasi sarana produksi seluas seluas 37,5 Ha yang berasal dari APBN 30 Ha dan APBD Propinsi Sumatera Barat 7,5 Ha dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi durian.

11. Pengembangan kawasan pisang melalui fasilitasi sarana produksi budidaya dan sarana pasca panen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pisang. Bantuan fasilitasi sarana produksi ditargetkan seluas 20 Ha yang berasal dari APBN dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
12. Pengembangan kawasan pepaya melalui bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
13. Pengembangan kawasan alpukat melalui fasilitasi sarana produksi seluas 70 Ha yang berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan Aripan serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi alpukat.
14. Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
15. Pengembangan kawasan tahunan berupa intensifikasi areal kopi arabika seluas 200 Ha dengan bantuan berupa pupuk organik 400 liter dan knapsack sprayer 40 unit dan pelatihan PHT Pengendalian OPT Kopi dan perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi .
16. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
17. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha , Klinik PHT Kakao, Pembinaan Regu OPT Tanaman Perkebunan (Kakao).
18. Melakukan pengendalian OPT dengan bekerjasama dengan petugas PHP Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan pada kelompok tani.
19. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)
20. Meningkatkan kelahiran anak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 6.700 dosis dan kelahiran 2.750 ekor .
21. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor
22. Penanggulangan penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), infeksi saluran pernafasan (CRD) pada unggas.

23. Untuk meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan memberikan bantuan ayam kukuk balenggek pada kelompok penangkar ayam kukuk balenggek dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek untuk menarik minat masyarakat membudidayakan ayam kukuk balenggek.
24. Penyediaan alsintan untuk kelompok tani.
25. Mendorong petani untuk menerapkan teknologi budidaya sesuai SOP GAP dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
26. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan pelatihan.
27. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan tenaga teknis reproduksi ternak serta memberdayakan penyuluh swadaya.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target Pengeluaran Perkapita pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan penggunaan sumber daya manusia. Pada tahun 2022 alokasi anggaran Dinas Pertanian sebesar Rp. 52.862.927.439,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.740.198.476,- atau 94,09%. Untuk mendukung pencapaian target kinerja kinerja Pengeluaran Per kapita pada sektor pertanian di alokasikan anggaran sebesar Rp. 38.529.794.675 ,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.164.169.744,- atau 93,86% dengan sisa anggaran Rp. 2.365.624.931 ,- atau 6,14%.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2022 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase pencapaian sasaran strategis adalah 102,35%
2. Persentase pencapaian kinerja anggaran adalah 93,86%

Untuk melihat tingkat efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 7.5. dibawah ini:

Tabel. 7.5
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Pengeluaran Perkapita

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Pengeluaran Perkapita	62,45	66,05	105,76 %	38.529.794 .675	36.164.169 .744	93,86%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						15,20 %
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						109,5 %

Berdasarkan tabel 7.5. dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja anggaran 93,86% dengan tingkat efisiensi 15,2% dan tingkat efektifitas 109,05% sedangkan persentase pencapaian indikator 102,35%. Dari capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran sudah optimal untuk mencapai sasaran strategis.

Selain anggaran untuk pencapaian indikator sasaran strategis juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pertanian. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh 103 orang PNS , 38 orang P3K dan 54 orang tenaga harian lepas. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 17 orang dari jumlah pegawai tahun 2021. Penurunan jumlah pegawai karena adanya pensiun, meninggal dunia dan mutasi pegawai serta pegawai harian lepas yang mengundurkan diri. Dinas pertanian telah mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja dan memanfaatkan SDM yang ada.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Pengeluaran Perkapita di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - Bantuan alat mesin pertanian berupa handtraktor sebanyak 2 unit, mesin potong rumput 10 unit dan cultivator 10 unit.
 - Pengadaan ayam kukuak balenggek sebanyak 240 ekor betina dan 32 ekor jantan, bantuan pakan 400 kg, bantuan obat-obatan/vitamin dan bantuan bahan kandang untuk 4 kelompok peternak dan lomba ayam kukuk balenggek sebanyak 1 event
 - Pengembangan padi organic seluas 3 Ha
 - Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
 - Melaksanakan Sekolah lapang GAP bawang merah dan buah naga serta SL GHP bawang merah.
 - Perluasan kopi arabika dengan memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 12.240 batang.
 - Kegiatan pembibitan manggis, pepaya, alpukat, durian dan pisang bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi benih unggul hortikultura yang bersertifikat.

- Kegiatan pengembangan kentang dengan memberikan bantuan sarana produksi seluas 10 Ha dan pengembangan cabe merah dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada kelompok tani seluas 5 Ha
 - Pengembangan penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 41,4 Ha dan varitas cisokan seluas 4 Ha dan menyalurkan benih padi dari hasil penangkaran ke kelompok tani. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG).
 - Pengembangan ubi jalar 1 Ha dengan memberikan bantuan benih ubi jalar ke kelompok tani.
 - Penyediaan semen beku, N2 cair, container dan palstik glove untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran anak sapi dan pelaksanaan bimbingan teknologi pembuatan konsentrat/pakan ternak sapi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk membuat pakan ternak sapi yang berkulaitas.
 - Pembangunan gudang pakan ternak dan penyediaan sarana untuk pengolahan pakan ternak.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan areal luas tanam dengan pengembangan sumber air dan mempertahankan ketersediaan sumber ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi.
 - Renovasi gedung BPP 3 sebanyak 3 unit yaitu BPP Kubung, Tigo Lurah dan lembang Jaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat melakukan koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis.
 - Pembangunan uv dryer untuk padi sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan padi dan meningkatkan kualitas gabah.

- Kegiatan pembangunan jalan pertanian sebanyak 151 unit bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.
3. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan dilakukan berupa pembebasan terhadap penyakit hewan menular seperti melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies, penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak dan meningkatkan fasilitas pelayanan Puskesmas dengan merenovasi Puskesmas Sumani, menyediakan sarana pendukung untuk Puskesmas berupa:
 - Peralatan reproduksi berupa alat USG dan refrigerator
 - Peralatan pemeriksaan klinis berupa thermometer, handscund, masker, stetoskop
 - Peralatan pengambilan sampel berupa disposable syringe
 - Sarana transportasi dan komunikasi roda dua puskesmas sebanyak 26 unit
 - Peralatan kantor puskesmas berupa icebox, filling cabinet, lemari obat, computer PC, laptop, printer, kamera, kursi kerja, meja kerja
 - Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan di puskesmas
 4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan melaksanakan SL-PHT pada tanaman perkebunan, penyediaan sarana untuk pengendalian OPT tanaman pangan dan pendampingan melaksanakan kegiatan AOTP.
 5. Program Penyuluhan Pertanian
Kegiatan berupa bimbingan teknis bagi petani dan petugas, pelatihan petani dan petugas dan pelaksanaan Sekolah lapang serta pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain program/kegiatan yang alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Solok juga terdapat kegiatan yang alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN yaitu:

- A. Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022
1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha dan pembangunan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 unit .
 2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan
Kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan membangun irigasi perpompaan besar 1 unit, irigasi perpompaan menengah 1 unit, embung 1 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi 18 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas.
 - b. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian
 - c. Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan melakukan penyusunan E-RDCK untuk pendaftaran penerimaan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi, validasi penerima pupuk subsidi.
 - d. Fasilitasi pembiayaan pertanian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
 3. Program nilai tambah dan daya saing industry. Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kawasan pisang 20 Ha, kawasan kentang 20 Ha, kawasan bawang merah 65 Ha dan kawasan Durian 30 Ha.
 4. Program nilai tambah dan daya saing industry dengan kegiatan berupa pengembangan kawasan tahunan berupa bantuan sarana produksi untuk intensifikasi kopi arabika seluas 200 Ha, penanaman sereh wangi seluas 20 Ha dan pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditi perkebunan 1 unit (17,94 ha).
 5. Peningkatan kelahiran ternak melalui Kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana Inseminasi Buatan (IB) dan pemberian Sertifikat NKV pada unit usaha produksi ternak.
- B. Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

1. Kegiatan pengembangan kawasan manggis seluas 8 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
2. Kegiatan pengembangan kawasan durian seluas 7,5 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
3. Kegiatan pengembangan kawasan alpukat seluas 70 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
4. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 3,75 Ha, cabe merah 4,5 Ha dan kentang 3 Ha melalui fasilitasi bantuan benih dan pupuk.
5. Bantuan benih jagung hibrida seluas 270 Ha.
6. Bantuan power thresher sebanyak 13 unit
7. Pengadaan UV Dryer 1 unit.
8. Kegiatan pelatihan pengendalian OPT kopi, klinik PHT kakao dan pembinaan regu OPT tanaman kakao yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas.
9. Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha.
10. Perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi.
11. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
12. Perluasan tanaman pinang dengan memberikan bantuan bibit pinang sebanyak 22.300 batang.
13. Bantuan bibit puyuh sebanyak 40.000 ekor, ayam 12.000 ekor dan itik 6.000 batang serta penandaan dan pendataan ternak

sebanyak 1.480 penandaan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Barat.

14. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor untuk perbaikan genetic sapi.
15. Register kandang sapi.

Program dan kegiatan serta anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Solok untuk mencapai target pengeluaran Per Kapita adalah sebagai berikut:

Tabel. 7.6

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
I	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	428.620.800	337.713.904	78,79
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	428.620.800	337.713.904	78,79
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.072.080.620	3.558.784.501	87,39
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	231.260.000	207.984.800	89,94
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	613.804.020	515.304.606	83,95
3	Pemanfaatan SDG Hewan /Tanaman	3.227.016.600	2.835.495.095	87,87
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.779.050.470	1.027.062.836	57,73
1	Pengawasan Mutu Benih / Bibit Ternak ,Bahan Pakan /Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.458.050.470	744.861.736	51,09

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
2	Pengawasan Peredaran Bahan/Pakan, Benih /Bibit Hijauan Pakan Ternak	321.000.000	282.201.100	87,91
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	289.784.900	224.520.233	77,48
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	289.784.900	224.520.233	77,48
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.594.112.285	28.017.829.827	97,98
1	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.233.750.000	2.222.995.000	99,52
2	Pembangunan,Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	24.191.260.485	23.826.818.961,00	98,49
3	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	1.894.301.800	1.722.269.367	90,92
4	Pembangunan ,Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	274.800.000	245.746.499	89,43
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanamn (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	152.041.600	113.339.807	74,55
2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	25.000.000	19.760.000	79,04

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
	Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			
V	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan desa	348.260.800	316.943.288	91,01
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	68.520.800	67.606.051	98,67
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian	284.571.600	240.810.102	84,62
4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapangan Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	133.137.800	123.385.781	92,68
	JUMLAH	38.529.794.675	36.164.169.744	93,86

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Pengeluaran Per kapita Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dengan cara sebagai berikut

1. Perluasan areal tanam di lahan perkebunan/lahan hortikultura serta optimalisasi tumpang sari.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperpendek umur padi varitas caredek merah dari 140 HST menjadi 120 HST dengan tujuan dapat ditanam 2,5 kali dalam setahun.
2. Meningkatkan produksi benih bersertifikat dengan mengembangkan luas areal penangkaran padi sawah, melakukan pembibitan tanaman buah-buahan, melakukan pemeliharaan kebun induk kopi dan cengkeh.
3. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan bantuan benih bersertifikat dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP.

4. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit pada ternak.
5. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas tanam dengan membangun irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi air tanah dalam , irigasi air tanah dangkal dan irigasi sprinkler.
6. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung, dam parit dan long storage
7. Membangun dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk menambah luas areal tanam sehingga dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman.
8. Fasilitasi sarana pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan alsintan
9. Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bimtek, worksop, sekolah lapang.
10. Penyediaan sarana dan prasarana untuk petugas tekhnis/penyuluh/petugas IB
11. Meningkatkan skala usaha petani melalui kewirausahaan tani dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
12. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.
13. Meningkatkan penanganan dan pengawasan untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif
14. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara khusus kepada petugas ataupun kelompok tani.
15. Meningkatkan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak dan meningkatkan kelahiran ternak melalui optimalisasi reproduksi dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan menyediakan sarana IB seperti N2 cair,dan semen beku.
16. Untuk memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka Dinas Pertanian berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan mengusulkan Unit Usaha Produk Hewan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan

sertifikat nilai control veteriner (NKV). Sertifikat NKV sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu syarat bagi unit usaha untuk melakukan ekspor.

17. Pembangunan rumah potong hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
18. Meningkatkan promosi produk unggulan dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek.
19. Meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan melakukan penangkaran ayam kukuk balenggek.
20. Melaksanakan bimtek Good Handling Practise (GHP) untuk penanganan pasca panen.
21. Mendorong petani mengikuti AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AOTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
22. Meningkatkan kualitas pakan ternak dengan pengembangan bank pakan ternak.
23. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan Puskesmas.
24. Peningkatan kualitas ternak untuk perbaikan genetic sapi melalui Transfer Embrio (TE).
25. Perbaikan mutu pakan sapi dengan menyediakan bahan pakan olahan maupun bahan pakan dengan membangun bank pakan
26. Penambahan bibit sapi indukan
27. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dengan membangun/renovasi Puskesmas, pengembangan teknologi pengolahan pakan, membangun/meningkatkan jalan produksi peternakan
28. Meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan ruang data yang dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, computer, jaringan internet dan lain-lain. Selain itu juga meningkatkan kegiatan dempot di BPP untuk menjadi lahan percontohan sebagai salah satu cara untuk mendiseminasikan teknologi pertanian ke petani

29. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas seperti obat-obatan, peralatan ternak dan peralatan kesehatan hewan.
30. Mendorong peternak untuk menggunakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungjawaban asuransi.
31. Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan
32. Pengembangan integrasi ternak dan tanaman.
33. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian yang bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian
34. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan meningkatkan luas lahan pertanian organik.

8. PDRB SEKTOR PERTANIAN

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB sektor pertanian mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual kepada pihak lain.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Data PDRB diperoleh dari BPS Kab. Solok. Menurut BPS penyusunan PDRB melalui dua pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran.

Untuk mengukur persentase capaian IKU dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Realisasi pencapaian target PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel. 8.1.

PDRB Sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Sektor Pertanian	3.724.358	3.829.230	102,82

Sumber: Solok Dalam Angka tahun 2023

Berdasarkan tabel 8.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target PDRB Sektor Pertanian dengan nilai Rp. 3.724.358,- dan terealisasi Rp. **3.829.230,-** sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja PDRB Sektor Pertanian pada sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat dapat tercapai 102,82% dan masuk dalam kategori sangat baik. Data PDRB Sektor pertanian yang digunakan adalah Data PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan atas dasar harga konstan 2010.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Perkembangan capaian target PDRB Sektor Pertanian beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 8.2. berikut:

Tabel. 8.2.

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rp)	Capaian (%)
1.	PDRB Sektor Pertanian	3.585.300	3.676.300	3.829.230	95,15	101,6	102,82	4.004.391	95,62

Sumber: Solok Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 8.2 dapat dilihat bahwa Realisasi PDRB Sektor Pertanian tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** dengan nilai **Rp. 3.829.230** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan 102,82%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai Rp. 4.004.391,- maka capaian kinerja telah mencapai **95,62%**.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Solok. PDRB Sektor pertanian mengalami peningkatan dari Rp. 3.676.300,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.829.230 pada tahun 2022 dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 3,37%. Untuk itu terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian ke depan perlu upaya untuk peningkatan produksi dan kualitas komoditi pertanian melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan produksi dan kualitas komoditi pertanian.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan PDRB Sektor Pertanian Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 8.3 di bawah ini:

Tabel 8.3.

Perbandingan PDRB Sektor Pertanian

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	PDRB Sektor Pertanian	Juta rupiah	1.404.190.900	40.189.080,98	3.829.230

Sumber:

1. *Kabupaten Solok Dalam Angka 2022*
2. *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022*
3. *Statistik Indonesia 2022*

Dari tabel 8.3 dapat dilihat bahwa PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok sebesar Rp. 3.829.230 juta, PDRB Provinsi Sumatera Barat Rp. 40.189.080,98 juta dan PDRB Nasional Rp. 1.404.190.900 juta. Jika dilihat perbandingannya maka kontribusi PDRB sektor pertanian Kabupaten Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 9,53% dan 0,27% terhadap PDB Nasional.

Untuk perbandingan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.4.

Perbandingan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok dengan Kabupaten Lainnya di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pertanian (Juta Rupiah)
1	Pasaman Barat	5.155.500,00
2	Agam	4.595.700,00
3	Lima Puluh Kota	3.829.681,03
4	Solok	3.829.230,00
5	Pesisir Selatan	3.740.889,55
6	Pasaman	3.191.040,00
7	Tanah Datar	3.055.370,00
8	Padang Pariaman	3.039.937,03
9	Dharmasraya	2.299.420,00
10	Sijunjung	1.955.137,83
11	Mentawai	1.518.000,00
12	Solok Selatan	1.237.470,00

Sumber: Pasaman Barat Dalam Angka 2023, Agam Dalam Angka 2023, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2023, Solok Dalam Angka 2023, Pesisir Selatan Dalam Angka 2023, Pasaman Dalam Angka 2023, Tanah Datar Dalam Angka 2023, Padang Pariaman Dalam Angka 2023, Dharmasraya Dalam Angka 2022, Sijunjung Dalam Angka 2023, Mentawai Dalam Angka 2023, Solok Selatan Dalam Angka 2023

Dari tabel 8.4 dapat dilihat bahwa dari 12 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat nilai PDRB sektor pertanian yang tertinggi adalah Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 5.155.500 juta, diikuti oleh Kabupaten Agam sebesar Rp. 4.595.700 juta dan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 3.829.681,03 juta. Nilai PDRB sektor pertanian Kabupaten Solok empat terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Untuk pencapaian PDRB sektor pertanian Kabupaten Solok yang lebih baik lagi perlu upaya untuk lebih meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN KINERJA

Keberhasilan tercapainya target PDRB Sektor pertanian Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan produksi dari beberapa komoditi pertanian. Menurut BPS pendekatan yang digunakan dalam

memperkirakan nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi pertanian merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi nilai PDRB Sektor Pertanian. Untuk melihat perkembangan produksi komoditi pertanian pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada Tabel 8.5 berikut ini:

Tabel 8.5.

Perkembangan produksi komoditi pertanian tahun 2021-2022

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Padi sawah	Ton	179.316,10	171.335,32	4,66
Jagung	Ton	2.062,40	2.874,20	-28,24
Ubi Kayu	Ton	8.958,60	9.004,80	-0,51
Ubi Jalar	Ton	54.524,20	45.225,10	20,56
Kacang Tanah	Ton	229,5	229,1	0,17
Talas	Ton	416,0	430,3	-3,32
Bawang Daun	Ton	8.901,00	6.412,90	38,80
Bawang Merah	Ton	188.555,86	188.549,35	0,00
Bawang Putih	Ton	770,80	1.744,63	-55,82
B a y a m	Ton	538,9	436,7	23,40
B u n c i s	Ton	13.080,90	9.925,00	31,80
C a b e keriting	Ton	34.254,96	25.997,44	31,76
Cabe Rawit	Ton	2.699,49	2.947,17	-8,40
Jamur	Kw	26,05	17,1	52,34
Kacang Panjang	Ton	755,49	721,2	4,75
Kangkung	Ton	510,75	397,4	28,52
Kentang	Ton	19.554,10	8.014,50	143,98
K e t i m u n	Ton	438,3	315,25	39,01
Kubis	Ton	143.889,70	134.881,23	6,68
Labu siam	Ton	790,2	507,78	55,61
Petsai/sawi	Ton	2.106,30	2.379,90	-11,50
Semangka	Ton	38,1	17,65	115,25
Stroberi	Ton	71,55	42,9	66,78
Terung	Ton	5.338,00	2.608,50	104,64
Tomat	Ton	84.086,65	49.503,00	69,86
Wortel	Ton	14.653,00	15.563,30	-5,85
Alpoket	Ton	52.934,20	43.280,66	22,30
Apel	Ton	29,2	17,5	66,86
Belimbing	Ton	21,05	14,63	44,18
Duku	Ton	33,3	52,25	-36,33
Durian	Ton	7.816,78	3.936,70	98,56
Jambu Air	Ton	261,93	237,14	10,47
Jambu Biji	Ton	522,24	653,08	-20,04

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Jengkol	Ton	814,1	523,03	55,66
Jeruk Besar	Ton	11,8	7,3	61,64
Jeruk siam/keprok	Ton	1.939,15	4.378,90	-55,72
Mangga	Ton	826,38	434,19	90,32
Manggis	Ton	1.617,95	839,45	92,73
Melinjo	Ton	212,5	272,5	-22,02
Nangka	Ton	566,65	467,35	21,23
Nenas	Ton	2,56	2,1	21,90
Pepaya	Ton	1.873,30	1.343,12	39,48
Pisang	Ton	7.013,15	6.381,25	9,90
Rambutan	Ton	1775,4	860,64	106,30
Salak	Ton	93,3	78,1	19,46
Sawo	Ton	1132,55	791,99	43,00
Sirsak	Ton	595,4	843,85	-29,45
Sukun	Ton	51,75	94,9	-45,47
Buah naga	Ton	1184	341,78	246,40
Lengkeng	Ton	22,1	3,9	466,67
Jahe	Ton	659,34	457,5	44,12
Laos	Ton	534,56	368,97	44,87
Kunyit	Ton	734,13	512,95	43,11
Kapulaga	Ton	350,94	298,04	17,75
Kelapa	Ton	2.459,42	2.078,81	18,31
Karet	Ton	2.322,10	2.734,48	-15,08
Kopi Arabika	Ton	1.320,42	1.294,10	1,96
Kopi Robusta	Ton	3.171,70	3.104,03	2,18
Cengkeh	Ton	657,72	639,73	2,81
Kulit Manis	Ton	2.949,46	215,45	1268,98
Tebu	Ton	754,15	766,04	-1,55
Cokelat	Ton	1.912,05	1.885,66	1,40
Tembakau	Ton	29,55	13,85	113,36
Pala	Ton	14,83	13,42	10,51
Enau	Ton	78,57	124,21	-36,74
Kemiri	Ton	1.274,75	985,24	29,38
Teh	Ton	980,08	923,98	6,07
Kapuk	Ton	186,54	24,36	665,76
Pinang	Ton	399,75	216,79	84,40
Daging Sapi	Ton	1.057,42	1.184,94	-10,76
Daging Kerbau	Ton	6,756	8,01	-15,66
Daging Kambing	Ton	24,768	50,7	-51,15
Daging Ayam Buras	Ton	358,89	375,17	-4,34

Komoditi	Satuan	Produksi 2022	Produksi 2021	% Peningkatan 2022/2021
Daging Ras Pedaging	Ton	3.547,76	3.270,14	8,49
Daging Ras Petelur	Ton	46,723	51,5	-9,28
Daging Itik	Ton	64,32	68,18	-5,66
Telur Ayam Ras	Ton	326,71	360,11	-9,27
Telur Ayam Buras	Ton	122,35	127,9	-4,34
Telur Itik	Ton	600,52	636,54	-5,66
Susu Sapi	Ton	206,55	68,85	200,00
Susu Kerbau	Ton	29,27	49,18	-40,48
Total	Ton	875.099,74	777.848,23	12,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Solok, 2022

Dari tabel 8.5 dapat dilihat bahwa produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 meningkat 12,50% dibandingkan dengan produksi tahun 2021. Produksi bawang merah memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Sektor pertanian. Kabupaten Solok telah ditetapkan sebagai kawasan sentra bawang merah di Sumatera Barat dan nasional. Perkembangan produksi bawang merah paling banyak di Kecamatan Lembah Gumanti dengan total produksi tahun 2022 sebanyak 115.077,60 ton atau sebesar 61,05 % dari keseluruhan produksi bawang merah di Kab. Solok sebesar 188.555,86 ton. Agar produksi bawang merah terus meningkat setiap tahun perlu dilakukan upaya peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas.

Untuk komoditi pangan produksi padi juga memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Sektor Pertanian setelah bawang merah. Produksi padi Kabupaten Solok tahun 2022 sebesar 179.316,1 ton. Untuk produksi peternakan berupa daging dan telur mengalami penurunan. Peningkatan produksi hanya terjadi pada produksi daging ayam ras dan susu sapi. Penurunan produksi terjadi karena turunnya populasi ternak yang disebabkan oleh:

1. Adanya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dapat menyerang ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan kerbau. Kasus PMK tidak saja terdapat di Kabupaten Solok tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. PMK dapat berpengaruh langsung terhadap system produksi ternak dan penurunan fertilitas ternak sehingga berpengaruh terhadap penambahan populasi ternak. PMK juga dapat menyebabkan kematian pada ternak. Hal ini yang menyebabkan penurunan populasi

pada ternak ruminansia yang berdampak pada peningkatan produksi daging.

2. Penurunan populasi pada unggas karena adanya kasus infeksi saluran pernafasan (CRD) yang menyebabkan kematian pada ternak.

Peningkatan produksi komoditi pertanian pada tahun 2022 belum optimal. Belum seluruh komoditi mengalami peningkatan produksi. Peningkatan produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dipengaruhi oleh peningkatan luas tanam, luas panen dan produktifitas sedangkan untuk sektor peternakan peningkatan produksi dipengaruhi oleh jumlah populasi ternak. Untuk itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian.

Adapun kebijakan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk peningkatan produksi adalah:

1. Meningkatkan penggunaan benih bersertifikat padi sawah dengan pengembangan areal penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 16,2 Ha dan varitas cisokan seluas 45,4 Ha. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG). Selain penangkaran dilakukan fasilitasi bantuan benih padi bersertifikat untuk kelompok tani dengan luas areal 2.380 Ha.
2. Penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha.
3. Pengembangan ubi jalar seluas 1 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi pada kelompok tani.
4. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas areal tanam dengan membangun irigasi perpompaan besar 2 unit, irigasi air tanah dalam 4 unit, irigasi tanah dangkal 3 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier 23 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan Indeks Pertanaman dan produktifitas.
5. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung 1 unit.

6. Pengembangan kawasan bawang merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 71,25 Ha dan bimbingan teknis penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
7. Pengembangan kawasan cabe merah melalui fasilitasi sarana produksi seluas 9,5 Ha. serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi cabe merah.
8. Pengembangan kawasan kentang melalui fasilitasi sarana produksi seluas 33 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kentang.
9. Pengembangan kawasan manggis melalui fasilitasi sarana produksi seluas 8 Ha serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP) berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripin. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi manggis.
10. Pengembangan kawasan durian melalui fasilitasi sarana produksi seluas seluas 37,5 Ha yang berasal dari APBN 30 Ha dan APBD Propinsi Sumatera Barat 7,5 Ha dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripin yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP). Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi durian.
11. Pengembangan kawasan pisang melalui fasilitasi sarana produksi budidaya dan sarana pasca panen. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pisang. Bantuan fasilitasi sarana produksi ditargetkan seluas 20 Ha yang berasal dari APBN dan bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripin yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
12. Pengembangan kawasan pepaya melalui bantuan bibit dari pembibitan hortikultura di Aripin yang alokasi anggaran berasal dari APBD Kabupaten Solok.
13. Pengembangan kawasan alpukat melalui fasilitasi sarana produksi seluas 70 Ha yang berasal dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan bantuan bibit dari pembibitan Aripin serta penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi alpukat.

14. Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
15. Pengembangan kawasan tahunan berupa intensifikasi areal kopi arabika seluas 200 Ha dengan bantuan berupa pupuk organik 400 liter dan knapsack sprayer 40 unit dan pelatihan PHT Pengendalian OPT Kopi dan perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi .
16. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
17. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha , Klinik PHT Kakao, Pembinaan Regu OPT Tanaman Perkebunan (Kakao).
18. Melakukan pengendalian OPT dengan bekerjasama dengan petugas PHP Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan pada kelompok tani.
19. Melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu (SL-PHT)
20. Meningkatkan kelahiran anak sapi melalui kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan target 6.700 dosis dan kelahiran 2.750 ekor .
21. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor
22. Penanggulangan penyakit hewan menular seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), gangguan saluran pernafasan pada unggas (CRD) .
23. Untuk meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan memberikan bantuan ayam kukuk balenggek pada kelompok penangkar ayam kukuk balenggek dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek untuk menarik minat masyarakat membudidayakan ayam kukuk balenggek.
24. Penyediaan alsintan untuk kelompok tani.
25. Mendorong petani untuk menerapkan tekhnologi budidaya sesuai SOP GAP dengan melakukan pembinaan dan pelatihan.
26. Penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan dan pelatihan.

27. Meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dan tenaga teknis reproduksi ternak serta memberdayakan penyuluh swadaya.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dan penggunaan sumber daya manusia. Pada tahun 2022 alokasi anggaran Dinas Pertanian sebesar Rp. 52.862.927.439,- dengan realisasi anggaran Rp. 49.740.198.476,- atau 94,09%. Untuk mendukung pencapaian target kinerja kinerja PDRB Sektor Pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di alokasikan anggaran sebesar Rp. 38.529.794.675 ,- dengan realisasi anggaran Rp. 36.164.169.744,- atau 93,86% dengan sisa anggaran Rp. 2.365.624.931 ,- atau 6,14%.

Untuk melihat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja PDRB Sektor Pertanian Tahun 2022 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase pencapaian sasaran strategis adalah 102,82%
2. Persentase pencapaian kinerja anggaran adalah 93,86%

Untuk melihat tingkat efisiensi sumber daya anggaran terhadap pencapaian target kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8.6.

Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Pada Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
				Traget	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Sektor Pertanian	3.724.358	3.829.230	102,82	1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
							2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
							3 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kotora	177.041.600	133.099.807	75,18

							4	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,7 2
							5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,8 8
Rata-rata capaian dari 1 indikator						102,8 2		Total Per sasaran	38.529.794.67 5	36.164.169.74 4	93,8 6
Tingkat Efisiensi						15,2					
Tingkat Efektifitas						109,5 4					

Berdasarkan tabel 8.6. dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja anggaran 93,86% dengan tingkat efisiensi 15,2% dan tingkat efektifitas 109,5%, sedangkan persentase pencapaian indikator sasaran 102,8%. Dari capaian kedua indikator tersebut dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran sudah optimal untuk mencapai sasaran strategis.

Selain anggaran untuk pencapaian indikator sasaran strategis juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pertanian. Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh 103 orang PNS , 38 orang P3K dan 54 orang tenaga harian lepas. Pada tahun 2022 terjadi pengurangan jumlah pegawai sebanyak 17 orang dari jumlah pegawai tahun 2021. Penurunan jumlah pegawai karena adanya pensiun, meninggal dunia dan mutasi pegawai serta pegawai harian lepas yang mengundurkan diri. Dinas pertanian telah mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pencapaian kinerja dan memanfaatkan SDM yang ada.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Sektor Pertanian di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
 - Bantuan alat mesin pertanian berupa handtraktor sebanyak 2 unit, mesin potong rumput 10 unit dan cultivator 10 unit.
 - Pengadaan ayam kukuak balenggek sebanyak 240 ekor betina dan 32 ekor jantan, bantuan pakan 400 kg, bantuan obat-obatan/vitamin dan bantuan bahan kandang untuk 4 kelompok peternak dan lomba ayam kukuk balenggek sebanyak 1 event
 - Pengembangan padi organic seluas 3 Ha
 - Pengembangan markisah seluas 0,5 Ha dengan memberikan bantuan sarana produksi berupa bantuan pupuk, kapur dolomit, fungisida, pestisida, tiang beton bertulang dan tali.
 - Melaksanakan Sekolah lapang GAP bawang merah dan buah naga serta SL GHP bawang merah.
 - Perluasan kopi arabika dengan memberikan bantuan bibit kopi sebanyak 12.240 batang.
 - Kegiatan pembibitan manggis, pepaya, alpukat, durian dan pisang bertujuan untuk dapat menghasilkan produksi benih unggul hortikultura yang bersertifikat.

- Kegiatan pengembangan kentang dengan memberikan bantuan sarana produksi seluas 10 Ha dan pengembangan cabe merah dengan memberikan bantuan sarana produksi kepada kelompok tani seluas 5 Ha
 - Pengembangan penangkaran padi sawah varitas anak daro seluas 41,4 Ha dan varitas cisokan seluas 4 Ha dan menyalurkan benih padi dari hasil penangkaran ke kelompok tani. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyediaan benih padi bersertifikat dan mendukung peningkatan produksi bareh solok yang telah bersertifikat Indikasi Geografis (IG).
 - Pengembangan ubi jalar 1 Ha dengan memberikan bantuan benih ubi jalar ke kelompok tani.
 - Penyediaan semen beku, N2 cair, container dan palstik glove untuk inseminasi buatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelahiran anak sapi dan pelaksanaan bimbingan teknologi pembuatan konsentrat/pakan ternak sapi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani untuk membuat pakan ternak sapi yang berkualitas.
 - Pembangunan gudang pakan ternak dan penyediaan sarana untuk pengolahan pakan ternak.
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
- Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 4 unit, pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 3 unit, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 5 unit. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan areal luas tanam dengan pengembangan sumber air dan mempertahankan ketersediaan sumber ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi.
 - Renovasi gedung BPP 3 sebanyak 3 unit yaitu BPP Kubung, Tigo Lurah dan lembang Jaya bertujuan untuk meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat melakukan koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis.
 - Pembangunan uv dryer untuk padi sebanyak 1 unit yang berfungsi untuk mempercepat pengeringan padi dan meningkatkan kualitas gabah.
 - Kegiatan pembangunan jalan pertanian sebanyak 151 unit bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan

pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian.

3. Program pengendalian dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kegiatan dilakukan berupa pembebasan terhadap penyakit hewan menular seperti melakukan vaksinasi rabies terhadap hewan pembawa rabies, penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak dan meningkatkan fasilitas pelayanan Puskesmas dengan merenovasi Puskesmas Sumani, menyediakan sarana pendukung untuk Puskesmas berupa:

- Peralatan reproduksi berupa alat USG dan refrigerator
- Peralatan pemeriksaan klinis berupa thermometer, handscond, masker, stetoskop
- Peralatan pengambilan sampel berupa disposable syringe
- Sarana transportasi dan komunikasi roda dua puskesmas sebanyak 26 unit
- Peralatan kantor puskesmas berupa icebox, filling cabinet, lemari obat, computer PC, laptop, printer, kamera, kursi kerja, meja kerja
- Obat-obatan untuk pelayanan kesehatan hewan di puskesmas

4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan melaksanakan SL-PHT pada tanaman perkebunan, penyediaan sarana untuk pengendalian OPT tanaman pangan dan pendampingan melaksanakan kegiatan AUTP.

5. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatan berupa bimbingan teknis bagi petani dan petugas, pelatihan petani dan petugas dan pelaksanaan Sekolah lapang serta pembinaan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan untuk memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian.

Selain program/kegiatan yang alokasi anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Solok juga terdapat kegiatan yang alokasi anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN Kementerian Pertanian. Adapun kegiatan yang alokasi anggaran berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN yaitu:

A. Kegiatan yang didanai oleh APBN Tahun Anggaran 2022

1. Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Kegiatan berupa penyaluran bantuan benih padi bersertifikat untuk areal sawah seluas 289 Ha dan pembangunan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan sebanyak 1 unit .
 2. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan
Kegiatan yang dilaksanakan berupa:
 - a. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian dengan membangun irigasi perpompaan besar 1 unit, irigasi perpompaan menengah 1 unit, embung 1 unit dan rehabilitasi jaringan irigasi 18 unit. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan produksi melalui peningkatan luas tanam dan produktifitas.
 - b. Pengelolaan system penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian dengan melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan alat mesin pertanian
 - c. Fasilitasi pupuk dan pestisida dengan melakukan penyusunan E-RDCK untuk pendaftaran penerimaan pupuk bersubsidi dan pelaksanaan verifikasi, validasi penerima pupuk subsidi.
 - d. Fasilitasi pembiayaan pertanian untuk persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian.
 3. Program nilai tambah dan daya saing industry. Kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan kawasan pisang 20 Ha, kawasan kentang 20 Ha, kawasan bawang merah 65 Ha dan kawasan Durian 30 Ha.
 4. Program nilai tambah dan daya saing industry dengan kegiatan berupa pengembangan kawasan tahunan berupa bantuan sarana produksi untuk intensifikasi kopi arabika seluas 200 Ha, penanaman serih wangi seluas 20 Ha dan pengembangan desa pertanian organic berbasis komoditi perkebunan 1 unit (17,94 ha).
 5. Peningkatan kelahiran ternak melalui Kegiatan SIKOMANDAN (Sapi/Kerbau Komoditas Andalan Negeri). Kegiatan yang dilakukan berupa fasilitasi sarana Inseminasi Buatan (IB) dan pemberian Sertifikat NKV pada unit usaha produksi ternak.
- B. Kegiatan yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022

1. Kegiatan pengembangan kawasan manggis seluas 8 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
2. Kegiatan pengembangan kawasan durian seluas 7,5 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
3. Kegiatan pengembangan kawasan alpukat seluas 70 Ha melalui fasilitasi bantuan bibit dan pupuk serta bimtek penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) Good Agricultural Practices (GAP).
4. Kegiatan pengembangan kawasan bawang merah seluas 3,75 Ha, cabe merah 4,5 Ha dan kentang 3 Ha melalui fasilitasi bantuan benih dan pupuk.
5. Bantuan benih jagung hibrida seluas 270 Ha.
6. Bantuan power thresher sebanyak 13 unit
7. Pengadaan UV Dryer 1 unit.
8. Kegiatan pelatihan pengendalian OPT kopi, klinik PHT kakao dan pembinaan regu OPT tanaman kakao yang bertujuan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman sehingga dapat mendukung peningkatan produktifitas.
9. Pengendalian OPT tanaman perkebunan dengan Pestisida Nabati (Pesnab) tanaman kakao seluas 20 Ha.
10. Perluasan kopi arabika berupa bantuan sarana berupa bibit sebanyak 72.734 batang, pupuk kompos dan pupuk NPK, perluasan kopi robusta 7 Ha berupa bantuan bibit sebanyak 7.000 batang. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kopi.
11. Perluasan tanaman cengkeh seluas 212 Ha berupa bantuan bibit cengkeh sebanyak 39.480 batang dan pupuk kompos sebanyak 15.240 kg.
12. Perluasan tanaman pinang dengan memberikan bantuan bibit pinang sebanyak 22.300 batang.
13. Bantuan bibit puyuh sebanyak 40.000 ekor, ayam 12.000 ekor dan itik 6.000 batang serta penandaan dan pendataan ternak

sebanyak 1.480 penandaan yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Propinsi Sumatera Barat.

14. Peningkatan kualitas ternak melalui Transfer Embrio (TE) sebanyak 8 aplikasi dan resifien 56 ekor untuk perbaikan genetic sapi.
15. Register kandang sapi.

Program dan kegiatan serta anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Solok untuk mencapai target PDRB Sektor Pertanian, pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel. 8.8.

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
I	PROGRAM PENYEDIAAN dan PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.279.751.890	4.923.561.241	78,40
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	428.620.800	337.713.904	78,79
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	4.072.080.620	3.558.784.501	87,39
3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.779.050.470	1.027.062.836	57,73
II	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.883.897.185	28.242.350.060	97,78
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	289.784.900	224.520.233	77,48
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	28.594.112.285	28.017.829.827	97,98
III	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten /Kota	2.354.613.000	2.116.413.414	89,88

NO.	PROGRAM	APBD KABUPATEN & DAK		%
	KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
	SUB KEGIATAN			
IV	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	177.041.600	133.099.807	75,18
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	177.041.600	133.099.807	75,18
V	Program Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	834.491.000	748.745.222	89,72
	JUMLAH	38.529.794.675	36.164.169.744	93,86

Sumber: Dinas Pertanian, 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas komoditi pertanian dengan cara sebagai berikut

1. Perluasan areal tanam di lahan perkebunan/lahan hortikultura serta optimalisasi tumpang sari.
2. Melakukan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperpendek umur padi varitas caredek merah dari 140 HST menjadi 120 HST dengan tujuan dapat ditanam 2,5 kali dalam setahun.
3. Meningkatkan produksi benih bersertifikat dengan mengembangkan luas areal penangkaran padi sawah, melakukan pembibitan tanaman buah-buahan, melakukan pemeliharaan kebun induk kopi dan cengkeh.
4. Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan memberikan bantuan benih bersertifikat dan melaksanakan pendampingan serta bimbingan teknis dalam penerapan budidaya yang baik sesuai GAP.
5. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit pada ternak.
6. Pengembangan sumber air untuk penambahan luas tanam dengan membangun irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, irigasi air tanah dalam , irigasi air tanah dangkal dan irigasi sprinkler.
7. Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplai air irigasi dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen pada musim kemarau dengan membangun embung, dam parit dan long storage

8. Membangun dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk menambah luas areal tanam sehingga dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman.
9. Fasilitasi sarana pertanian dengan memberikan bantuan pupuk dan alsintan
10. Penguatan kelembagaan petani dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui bimtek, worksop, sekolah lapang.
11. Penyediaan sarana dan prasarana untuk petugas teknis/penyuluh/petugas IB
12. Meningkatkan skala usaha petani melalui kewirausahaan tani dengan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
13. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian untuk melindungi lahan pertanian pangan agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.
14. Meningkatkan penanganan dan pengawasan untuk pencegahan pemotongan sapi betina produktif
15. Meningkatkan kualitas SDM dengan melaksanakan sosialisasi dan bimtek secara khusus kepada petugas ataupun kelompok tani.
16. Meningkatkan populasi ternak dengan memberikan bantuan ternak dan meningkatkan kelahiran ternak melalui optimalisasi reproduksi dengan Inseminasi Buatan (IB) dengan menyediakan sarana IB seperti N2 cair,dan semen beku.
17. Untuk memberikan jaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) maka Dinas Pertanian berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Unit Usaha Produk Hewan dan mengusulkan Unit Usaha Produk Hewan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan sertifikat nilai control veteriner (NKV). Sertifikat NKV sebagai bukti telah terpenuhinya persyaratan hygiene sanitasi unit usaha produk hewan dan menjadi salah satu syarat bagi unit usaha untuk melakukan ekspor.
18. Pembangunan rumah potong hewan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
19. Meningkatkan promosi produk unggulan dengan mengikuti pameran tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional dan melaksanakan lomba ayam kukuk balenggek.

20. Meningkatkan populasi ayam kukuk balenggek dengan melakukan penangkaran ayam kukuk balenggek.
21. Melaksanakan bimtek Good Handling Practise (GHP) untuk penanganan pasca panen.
22. Mendorong petani mengikuti AOTP (Asuransi Usaha Tani Padi) dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi) dengan melakukan sosialisasi kepada kelompok tani.
23. Meningkatkan kualitas pakan ternak dengan pengembangan bank pakan ternak.
24. Meningkatkan pelayanan Puskesmas dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan Puskesmas.
25. Peningkatan kualitas ternak untuk perbaikan genetic sapi melalui Transfer Embrio (TE).
26. Perbaikan mutu pakan sapi dengan menyediakan bahan pakan olahan maupun bahan pakan dengan membangun bank pakan
27. n bibit sapi indukan
28. Pengembangan sarana dan prasarana peternakan dengan membangun/renovasi Puskesmas, pengembangan teknologi pengolahan pakan, membangun/meningkatkan jalan produksi peternakan
29. Meningkatkan fungsi BPP sebagai tempat koordinasi data, pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian dan konsultasi agribisnis dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan ruang data yang dilengkapi dengan sarana informasi teknologi, computer, jaringan internet dan lain-lain. Selain itu juga meningkatkan kegiatan demplot di BPP untuk menjadi lahan percontohan sebagai salah satu cara untuk mendiseminasikan teknologi pertanian ke petani
30. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan Puskesmas seperti obat-obatan, peralatan ternak dan peralatan kesehatan hewan.
31. Mendorong peternak untuk menggunakan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan/atau kehilangan melalui skema pertanggungjawaban asuransi.
32. Meningkatkan kapasitas pengetahuan petugas inseminator dan petugas pemeriksa kebuntingan

33. gan integrasi ternak dan tanaman.
34. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jalan pertanian yang bertujuan untuk memperlancar akses mobilitas kegiatan pertanian, memperlancar pendistribusian bibit, pupuk serta saprodi ke lokasi tanaman dan mempercepat pengiriman hasil pertanian
35. Mengembangkan pertanian ramah lingkungan dengan membangun Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dan meningkatkan luas lahan pertanian organic.

9. PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN PADA USAHA MIKRO DAN KECIL

Pengertian Persentase peningkatan pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil adalah perbandingan antara jumlah pendapatan UKM pada Tahun N, dikurangi dengan Pendapatan UKM Tahun N-1 dibagi dengan Pendapatan Tahun N-1 dikali dengan seratus.

Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil dapat diukur dengan formula perbandingan antara jumlah pendapatan UMK pada Tahun N, dikurangi dengan Pendapatan UMK Tahun N-1 dibagi dengan Pendapatan UMK Tahun N-1 dan dikali dengan seratus.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut:

Tabel. 9.1

Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,4	0,03	1,25

Sumber: DKUKMPP 2022

Berdasarkan tabel 9.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai karena terjadinya inflasi**, dimana pada Tahun 2022 target Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 2,4% dan terealisasi sebanyak **0,03** dengan capaian kinerja sebesar **1,25%**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 9.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	0,22	0,21	0,03	12,94	12,35	1,25	5,2	0,58

Sumber: DKUKMPP 2022

Berdasarkan tabel 9.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebanyak 5,2% maka capaian kinerja sebesar 0,58%.

C. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan Terjadinya inflasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga secara tidak langsung juga berdampak pada pendapatan atau omzet pelaku usaha di Kabupaten Solok.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya sebagai berikut:

Tabel 9.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	2,4	0,03	1,25%	5.370.294.4	4.726.665.5	88,02%
				73	48	
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						11,98%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						1,42%

Berdasarkan Tabel 9.1 dapat dijelaskan Efisiensi dan Efektifitas pada anggaran dimana serapan anggaran sebesar 88,02% maka terdapat efisiensi 11,98%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 1,25% maka efektifitas sebesar 2,42%.

E. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Solok adalah **(diantaranya peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana atau program dan kegiatan lainnya)**

Tabel. 9.5

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGEMBANGAN UKM			
1.	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rp. 5.117.273.863,-	Rp. 4.532.710.594,-	88,58
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
1.	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 253.020.610,-	Rp. 193.954.954,-	76,66

JUMLAH	Rp. 5.370.294.473,-	Rp. 4.726.665.548,-	88,02
---------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------

Sumber: Laporan Keuang Kabupate Solok Tahu 2022

F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Solok adalah

1. Memberikan fasilitasi kepada UMKM agar meningkatnya produksi para pelaku UMKM.
2. Memberikan akses pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan omset para pelaku UMKM.
3. Penambahan anggaran untuk program dan kegiatan.

10. PDRB SEKTOR PERDAGANGAN

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor termasuk sektor yang berkontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 10.1 sebagai berikut:

Tabel. 10.1

PDRB Sektor Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PDRB Sektor Perdagangan	1.196.292	1.223.140	102,24

Sumber: Solok dalam angka 2023, BPS

Berdasarkan tabel 10.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target PDRB Sektor Perdagangan sebesar Rp. 1.196.292 dan terealisasi sebesar Rp. 1.223.140 dengan capaian kinerja sebesar 102,24%

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 10.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)
-----------	--------------------------	-----------------------	--------------------	--

		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rp)	Capaian
1.	PDRB Sektor Perdagangan	1.111.300	1.158.400	1.223.140	N/A	100,51	102,24	1.371.224	89,2%

Sumber: Solok dalam angka 2023, BPS

Berdasarkan tabel 10.2 dapat dilihat bahwa Realisasi PDRB Sektor Perdagangan tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar Rp. 1.371.224 maka capaian kinerja telah mencapai 89,2%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan PDRB Sektor Perdagangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 10.3 di bawah ini:

Tabel. 10.3

Perbandingan PDRB Sektor Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	PDRB Sektor Perdagangan	30.577.856.900	1.223.140

Sumber: BPS Tahun 2023

Dari tabel 10.3 dapat dijelaskan bahwa PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Solok Tahun 2022 berada dibawah Provinsi Sumatera Barat.

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Solok adalah :

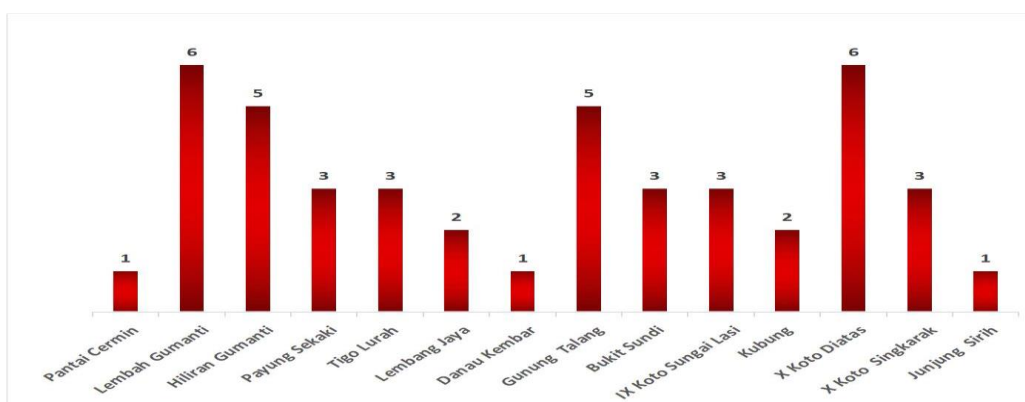
1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Kegiatan yang dilaksanakan berupa Pembangunan/Revitalisasi pasar nagari sebanyak 9 unit.
2. Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Melaksanakan pemantauan harga barang pokok dan penting;
 - Melaksanakan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah;

- Melaksanakan pasar murah subsidi bahan pokok.
- 3. Program Pengembangan Ekspor
 - Mengikuti even-even/bazar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam rangka promosi produk IKM.
- 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Melaksanakan Tera dan Tera Ulang
- 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Mengikuti even-even/bazar dalam rangka promosi produk IKM
- 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Pembuatan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - Fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku IKM;
 - Fasilitasi pelatihan dalam rangka peningkatan SDM pelaku IKM;
 - Mengikuti pameran-pameran nasional dalam rangka promosi hasil kerajinan Kab. Solok;
 - Melakukan pendataan IKM yang ada di Kab. Solok

Terdapat 42 pasar di Kabupaten Solok pada tahun 2022 yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kecamatan dengan jumlah pasar paling banyak adalah Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Lembah Gumanti, yaitu sebanyak 6 pasar. Pasar tradisional A adalah pasar yang didirikan oleh suatu nagari dan merupakan aset nagari yang bersangkutan. Pasar tradisional B adalah pasar yang didirikan secara berserikat yang dimiliki oleh beberapa nagari dalam suatu wilayah kecamatan. Pasar khusus adalah pasar agropolitan dan pasar tani. 5797 badan usaha di Kabupaten Solok pada tahun 2022.

Tabel 10.4

Banyak Pasar di Kabupaten Solok Tahun 2022

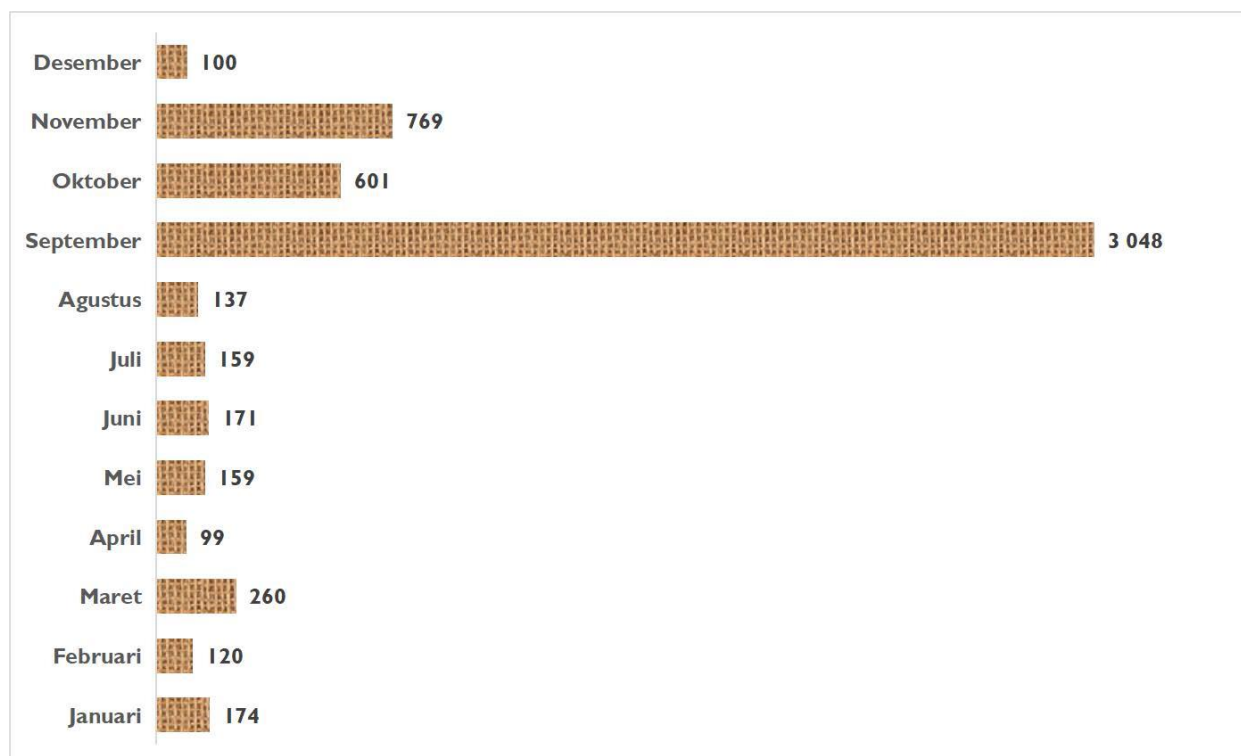


Sumber: DKUKMPP Kab. Solok

Tabel 10.5

Banyaknya Perusahaan yang Telah Diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan

Kabupaten Solok, 2022



Sumber: DKUKMPP Kab. Solok

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya sebagai berikut:

Tabel 9.4

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran PDRB Sektor Perdagangan

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
PDRB Sektor Perdagangan	1.196.292	1.223.140	102,24	682.078.964	606.750.917	88,95%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						11,05%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						114,94%

Pada indikator PDRB Sektor Perdagangan terjadi Efisiensi anggaran dimana serapan anggaran sebesar 88,95% maka terdapat efisiensi 11,05%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,24% maka efektifitas sebesar 114,94%

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel. 10.6**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.137.882.200	1.878.037.419	87,85
2	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	620.654.350	594.794.250	73,41
3	Program Pengembangan Ekspor	201.562.924	179.750.888	81,34
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	203.253.990	163.738.980	78,03
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	247.041.360	217.433.050	88,01
JUMLAH		682.078.964	606.750.917	88,95

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Solok Tahun 2022.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Solok adalah berupaya untuk meningkatkan produksi dan kualitas UMKM dan IKM dengan cara sebagai berikut

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM pelaku IKM.
2. Fasilitasi bantuan peralatan bagi IKM dalam rangka peningkatan nilai produksi.
3. Mengikuti event-event yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka promosi produk-produk IKM.
4. Melaksanakan pemantauan harga barang pokok dan penting.
5. Melaksanakan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan.
6. Melaksanakan operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi daerah;
7. Melaksanakan pasar murah subsidi bahan pokok.
8. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Definisi yang digunakan untuk pengunjung sesuai dengan rekomendasi UNWTO, yaitu setiap orang yang melakukan perjalanan ke tujuan utama di luar lingkungan biasanya, kurang dari satu tahun, untuk tujuan utama apa pun (bisnis, liburan, atau tujuan pribadi lainnya) selain untuk dipekerjakan oleh entitas penduduk di negara yang dikunjungi

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 11.1 sebagai berikut:

Tabel. 11.1

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,80	0,82	102,5

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 11.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,80% dan terealisasi sebesar **0,82%** dengan capaian kinerja sebesar **102,5%**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 11.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (%)	Capaian
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,74	0,78	0,82	92	101,29	102,5	1.00	82%

Sumber: Kabupaten Solok Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 11.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami **peningkatan** sebesar **0,04%**, untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

peningkatan sebesar **1,21%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 1.00% maka capaian kinerja sebesar **82%**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 11.3 di bawah ini:

Tabel. 11.3

Perbandingan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2,97* 3.479.438.000.000	1,115* 2.037.909.660.000	0,82* 86.880.000.000

Sumber: Statistik Indonesia 2023, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2023, Kabupaten Solok Dalam Angka 2023

Dari tabel 11.3 dapat dijelaskan bahwa Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Solok Tahun 2022 masih dibawah Provinsi Sumbar, dan jika dibandingkan dengan Nasional persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih jauh dari realisasi capaian didalam PDB, walaupun demikian Sektor Pariwisata masih berkontribusi dalam menunjang PDB Nasional.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya target Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok

Tabel. 11.3a Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Solok Tahun 2022

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN SOLOK																						
NO.	NAMA OBJEK WISATA	JUMLAH (ORANG) PERTAHUN																		KET		
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022								
		Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah	Wisman	Wisnus	Jumlah						
1	Taman Janjang Saribu Sulit Air	-	-	-	-	312	312	21	1.932	1.953	5	2.630	2.635	-	1.705	1.705	-	1.901	1.901	-	1.879	1.879
2	Puncak Batu Galeh Sulik Aia	-	-	-	-	528	528	-	2.050	2.050	-	2.744	2.744	-	1.902	1.902	-	1.957	1.957	-	1.963	1.963
3	Miniatur Nagari Sulik Aia	-	-	-	-	594	594	-	1.683	1.683	-	2.171	2.171	-	1.878	1.878	-	2.077	2.077	-	2.010	2.010
4	Air Terjun Timbulun Sulik Aia	-	-	-	-	283	283	-	1.500	1.500	-	1.580	1.580	-	1.374	1.374	-	1.431	1.431	-	1.435	1.435
5	Teluk Indah Kacang	30	82.082	82.112	24	90.201	90.225	30	99.221	99.251	-	329.052	329.052	-	146.481	146.481	-	92.332	92.332	-	80.037	80.037
6	Pesanggrahan Singkarak	134	147.247	147.381	238	268.734	268.972	161	509.744	509.905	450	509.747	510.197	-	184.641	184.641	-	89.030	89.030	-	118.521	118.521
7	Katapiang Indah Tikalak	17	1.840	1.857	11	1.989	2.000	22	5.177	5.199	10	8.716	8.726	-	4.539	4.539	-	38.514	38.514	-	28.178	28.178
8	Panorama Tanjung Alai	4	975	979	6	1.003	1.009	12	2.103	2.115	-	3.951	3.951	-	2.148	2.148	-	6.155	6.155	-	16.156	16.156
9	Pincuran Ruyung Aripun	-	741	741	-	864	864	-	1.950	1.950	-	2.517	2.517	-	1.742	1.742	-	791	791	-	2.350	2.350
10	Angin Berembus Aripun	2	18.685	18.687	7	23.214	23.221	8	35.527	35.535	-	45.840	45.840	-	21.642	21.642	-	21.437	21.437	-	30.889	30.889
11	Air Panas Padang Belimbing	-	983	983	-	1.010	1.010	-	6.119	6.119	-	7.993	7.993	-	2.895	2.895	-	20.831	20.831	-	15.097	15.097
12	Rest Area Kacang	15	10.025	10.040	25	11.020	11.045	28	15.122	15.150	8	19.753	19.761	-	13.788	13.788	-	5.945	5.945	-	6.335	6.335
13	Villa Puruak Saniang Baka	-	703	703	-	756	756	-	1.850	1.850	-	2.386	2.386	-	1.766	1.766	-	-	-	-	-	-
14	Puncak Gobah Aripun	-	-	-	14	531	545	23	21.900	21.923	8	28.490	28.498	8	12.887	12.895	-	-	-	-	-	-
15	Cinangkiek Singkarak	-	-	-	28	684	712	51	6.332	6.383	64	8.073	8.137	-	45.303	45.303	-	45.660	45.660	-	35.120	35.120
16	Villa Terapung Kacang	-	-	-	-	284	284	-	1.291	1.291	-	1.665	1.665	-	1.386	1.386	-	-	-	-	-	-
17	Danu Tuo Koto sani	-	-	-	-	197	197	-	2.200	2.200	-	4.738	4.738	-	2.111	2.111	-	4.633	4.633	-	3.472	3.472
18	Selayang Pandang Aripun	-	-	-	-	167	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557	557	-	285	285
19	Borobudur Aripun	-	9.233	9.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Puncak Gagoan Paninggahan	-	-	-	8	436	444	11	2.501	2.512	-	4.530	4.530	-	1.694	1.694	20	13.924	13.944	-	7.589	7.589
21	Mesjid Tuo Kayu Jao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.832	3.832	-	2.643	2.643	-	16.106	16.106	-	8.056	8.056
22	Aie Angek Bukit Gadang	-	-	-	34	689	723	8	1.900	1.908	-	2.491	2.491	-	2.525	2.525	-	8.123	8.123	118	7.014	7.132
23	Aie Angek Bukit Kil	-	-	-	24	90.003	90.027	37	78.976	79.013	3	1.936	1.939	-	2.299	2.299	-	17.301	17.301	90	4.885	4.975
24	Taman Arosuka	-	-	-	-	879	879	19	8.562	8.581	10	101.949	101.959	-	41.300	41.300	-	85.467	85.467	-	59.750	59.750
25	Kampung Budaya Jawi-Jawi	-	-	-	50	583	633	36	4.011	4.047	45	15.059	15.104	4	4.623	4.627	-	35	35	-	1.940	1.940
26	Kebun Teh Aie Batumbiak	-	-	-	23	154	177	29	69.109	69.138	20	20.052	20.072	-	8.058	8.058	-	64.707	64.707	-	150.550	150.550
27	Taman Hutan Kota Wisata (THKW)	-	1.139	1.139	-	1.201	1.201	17	5.366	5.383	10	6.944	6.954	-	2.973	2.973	-	10.183	10.183	-	-	-
28	Pendakian Gunung Talang	17	17.976	17.993	50	15.602	15.652	47	56.938	56.985	35	71.915	71.950	-	47.244	47.244	-	-	-	-	-	-
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Bukik Bulek)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.936	16.936	-	17.199	17.199
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Kapuwang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.234	25.234	-	8.512	8.512
	Pendakian Gunung Talang(Jalur Seroja)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.858	2.858	-	5.865	5.865
29	Aie Angek Batu Bajanjang	-	-	-	-	-	-	-	1.765	1.765	2	1.685	1.687	-	1.094	1.094	-	2.591	2.591	-	-	-
30	Dermaga Danau Diatah	53	16.101	16.154	18	18.231	18.249	53	49.935	49.988	20	63.987	64.007	-	20.901	20.901	-	5.974	5.974	-	7.287	7.287
31	Panorama Danau Dibawah	70	21.645	21.715	34	30.010	30.044	37	49.502	49.539	25	63.918	63.943	-	22.459	22.459	-	20.811	20.811	-	10.422	10.422
32	Alahan Panjang Resort	81	48.802	48.883	25	28.282	28.307	45	50.046	50.091	70	64.706	64.776	49	20.552	20.601	2	23.289	23.291	50	56.945	56.995
33	Bukit Indah Alahan Panjang	-	-	-	-	220	220	-	1.734	1.734	-	2.276	2.276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Desa Wisata Tabek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.788	5.788	2	1.173	1.175	-	525	525	13	641	654
35	Danu Talang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	66.850	66.855	-	18.189	18.189	-	42.153	42.153
36	Villa 1000 Ban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.374	2.374	-	2.033	2.033	-	1.344	1.344
37	Lereng Green View	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.436	1.436	-	12.110	12.110	-	22.972	22.972
38	Puncak Happy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	704	704	-	-	-	-	-	-
39	Panorama Bukit Cambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805	805	-	-	-	-	-	-
40	Timbulun 7 Salirik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.097	1.097	-	2.094	2.094	-	226	226
41	Aie Angek Garara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.401	8.401	-	1.501	1.501
42	Sentral Park	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.286	1.286	45	6.772	7.717
43	Pulai Indah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.327	6.327	-	6.649	6.649
44	Moosa Edufarm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.058	6.058	-	3.950	3.950
45	Solok Radio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.339	49.339	-	28.882	28.882
46	Kebun Strobery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.029	52.029	-	47.855	47.855
47	Villa Bukik Jirak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.878	1.878	-	1.516	1.516
48	Batu Barajuki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.820	5.820	-	4.570	4.570
49	Pincuran Putri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.280	7.280	-	857	857
	JUMLAH	423	378.177	378.600	619	588.661	589.280	695	1.096.046	1.096.741	785	1.413.114	1.413.899	68	700.992	701.060	22	820.159	820.181	316	860.529	860.845

Sumber: Data Kunjungan Wisata Kabupaten Solok (Disparbud)

Salah satu peningkatan kunjungan dapat dilihat dari kenaikan jumlah wisman yang datang ke Kabupaten Solok, dimana di tahun 2021 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 22 orang dan di tahun 2022 sebanyak 316 orang, sedangkan jumlah wisatawan nusantara di tahun 2021 adalah 820.159 orang dan terjadi peningkatan 860.529 orang di tahun 2022.

Pencatatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Solok telah dilaksanakan di 49 objek wisata yang ada di Kabupaten Solok dengan

menggunakan beberapa sistem perhitungan diantaranya adalah menggunakan tiket masuk, buku tamu, data kelompok pengelola.

Meningkatnya pertumbuhan industri dan usaha kepariwisataan terutama dalam sektor akomodasi dan makan minum sebagai akibat *multiplier effect* pembangunan di sektor pariwisata. Hal ini sesuai dengan data kontribusi sektor makan minum dan akomodasi terhadap PDRB Kab. Solok yang tahun ini mengalami kenaikan dari 78.800.000.000 pada tahun 2021 menjadi 86.880.000.000 di tahun 2022.

Tabel. 11.3b

Data Pertumbuhan Ekraf Pariwisata Tahun 2021-2022

No	Jenis	2021	2022
1.	Objek Wisata		
	e. Alam	105	111
	f. Budaya	69	75
	g. Buatan	10	15
	h. Alam & Buatan	2	4
2.	Kelompok Sadar Wisata	44	
3.	Hotel		
	d. Bintang	-	1
	e. Non Bintang	9	5
	f. Penginapan Lainnya		20
4.	Rumah Makan	89	89
5.	Desa Wisata	17	17
6.	Usaha/ Industri Pariwisata Lainnya		
	d. Kuliner	56	56
	e. Cinderamata	47	47
	f. Fashion	2	2

Sumber: Data Ekraf Disparbud

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan

Ditandai dengan adanya program dan kegiatan yang bersifat non fisik khususnya dalam hal peningkatan Kapasitas SDM kepariwisataan baik yang berasal dari APBD Kab. Solok, APBD Provinsi maupun dari APBN (DAK non fisik pelayanan kepariwisataan). Juga ditandai dengan tumbuhnya pokdarwis di berbagai destinasi wisata sebagai pengelola lokasi tsb. Saat ini dari data yang ada di Disparbud terdapat 44 pokdarwis yang sudah diterbitkan SK-nya oleh Kepala Disparbud Kab. Solok.

Untuk Peningkatan Kapasitas SDM yang dilaksanakan disparbud antara lain:

1. Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/ Pondok wisata (DAK non Fisik Kepariwisataaan)
 2. Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata (DAK non Fisik Kepariwisataaan)
 3. Pelatihan Pemandu Wisata Budaya (cagar budaya: museum, keraton, dan candi)
 4. Pelatihan Digitalisasi Branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, dan fotografi
 5. Pelatihan pemandu wisata trekking
 6. Pelatihan Pembuatan Cendramata di destinasi wisata unggulan di Kabupaten Solok
3. Terlaksananya kegiatan pariwisata secara kontinue baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta/masyarakat Untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Disparbud, yaitu
- a) Festival 5 Danau(Arak Jamba, Indang Kolosal, Pameran Pokdarwis, Penampilan Kesenian)
 - b) Gowes di Alahan panjang Resort
 - c) Camping Ground di Danau Talang
 - d) Pendakian Gunung Talang dan Camp Bersih
 - e) Gowes Salingka Danau
 - f) Paralayang, Silaturahmi Silek Tuo, serta Pameran UMKM dan Ekraf
 - g) Talang Trail Run

Sedangkan untuk promosi sektor pariwisata sudah dilaksanakan baik secara konvensional (brosur, pamflet dan pariwisata) dan melalui media sosial (fb, IG, website, dsb)

4. Berkembangnya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Hal ini terlihat dari adanya agenda-agenda atau kegiatan terkait dengan peningkatan terhadap Kapasitas SDM Destinasi wisata yaitu melalui berapa kegiatan berikut:

- a) Focus group discussion (FGD) Pengelolaan destinasi wisata
- b) Workshop Edukasi Geopark untuk komunitas sekolah
- c) Workshop Menulis legenda Geopark
- d) Lomba Menulis Legenda Geopark singkarak danau Kembar
- e) Penulisan Buku Penunjang daya tarik wisata (Inovasi)
- f) Sosialisasi Geopark

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Dalam efisiensi penggunaan sumber daya baik yang bersifat penganggaran dan pemanfaatan SDM telah dilaksanakan oleh Disparbud Kabupaten Solok diantaranya mengoptimalkan anggaran yang disediakan untuk pembangunan destinasi wisata dengan mengutamakan azas manfaat bukan kemewahan sehingga dapat dimanfaatkan destinasi wisata tsb pasca pembangunannya dan tidak menunggu tahun berikutnya untuk kelanjutan penganggarnya lagi.

Sedangkan dalam efisiensi penggunaan SDM telah dilaksanakan dengan menoptimalkan SDM dan melakukan evaluasi terhadap THL yang akan dikontrak sesuai dengan kinerja masing-masing serta berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 11.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	0,80	0,82	102,5%	12.024.438.774	8.664.347.004	72,06%
Rata-rata capaian						72,06%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						27,94%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						142,24 %

Berdasarkan Tabel 11.4 diketahui bahwa Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB terjadi efisiensi keuangan sebesar 27,94% dengan efektifitas 142,24%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Target kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam RPJM 2021-2026 adalah “ kontribusi PDRB pada sektor akomodasi dan makan minum “ di bidang kepariwisataan. Dalam mendukung capaian tersebut tentunya lebih difokuskan pada promosi kepariwisataan baik secara publikasi maupun secara langsung berupa mengadakan beberapa kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam mendukung kontribusi akomodasi dan makan minum tersebut.

Untuk Event dan Festival menarik pengunjung yang dapat dilaksanakan tahun ini berupa beberapa kegiatan yang seperti berikut:



Pendakian Gunung Talang dan Camp Bersih



Gowes Wisata salingka Dana



Paralayang, Silaturahmi Silek Tuo dan pameran UMKM dan Ekraf

Tentunya kunjungan wisatawan tersebut membutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa destinasi yang baik, dukungan penampilan seni dan budaya daerah serta SDM yang mempunyai kapasitas untuk itu. Berdasarkan indikator penunjang tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Solok telah melakukan kegiatan dan program sesuai

dengan kebutuhan untuk daya dukung kemajuan pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Solok kedepannya

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 11.5

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	URUSAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	11.298.508.224	7.962.727.055	70,48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG BUDAYA	725.930.550	701.619.949	96,65
1	Program Pengembangan Kebudayaan	219.416.385	214.020.970	97,54
	- Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	219.416.385	214.020.970	97,54
	pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat	219.416.385	214.020.970	97,54
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	411.620.945	400.971.159	97,41
	Pembinaan Kesenian Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Solok/Kota	411.620.945	400.971.159	97,41
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	411.620.945	400.971.159	97,41
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	94.893.220	86.627.820	91,29
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	94.893.220	86.627.820	91,29
	Penetapan Cagar Budaya	94.893.220	86.627.820	91,29
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.572.577.674	7.261.107.106	68,68

4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.352.612.307	4.051.891.004	93,09
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.279.591	179.626.488	92,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	193.279.591	179.626.488	92,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.324.678.876	3.080.043.284	92,64
	Penyedia gaji dan tunjangan ASN	3.324.678.876	3.080.043.284	92,64
	Administrasi umum Perangkat Daerah	393.144.162	386.651.233	98,35
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.394.900	8.360.000	99,58
	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	30.525.000	27.300.000	89,43
	peralatan perlengkapan rumah tangga	5.744.250	5.714.250	99,48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.716.700	38.706.100	99,97
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.678.712	30.671.500	99,98
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.084.600	275.899.383	98,86
	Penyedia jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	110.063.363	102.657.300	93,27

	Penyedia Jasa Surat Menyurat	2.870.000	2.870.000	100,00
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.393.363	97.987.300	92,97
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000	1.800.000	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	331.446.315	302.912.699	91,39
	Penyedia Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.706.630	237.219.799	89,96
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	54.973.685	52.992.900	96,40
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.766.000	12.700.000	99,48
5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.090.945.942	1.150.353.040	28,12
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.090.945.942	1.150.353.040	28,12
	pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.090.945.942	1.150.353.040	28,12
6	Program Pemasaran Pariwisata	807.137.280	789.355.389	97,80
	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten/ Kota	807.137.280	789.355.389	97,80

	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan media lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri	53.458.800	51.794.400	96,89
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaetn/Kota	678.640.530	662.799.339	97,67
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	75.037.950	74.761.650	99,63
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.321.882.145	1.269.507.673	96,04
	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.321.882.145	1.269.507.673	96,04
	Pengembangan Kompetensi sdm Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	749.195.100	723.254.042	96,54
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	572.687.045	546.253.631	95,38
	JUMLAH	12.024.438.774	8.664.347.004	72,06

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Solok Tahun 2022.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Solok adalah

1. Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan stakeholder terkait di dalam dan luar negeri
2. Peningkatan pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital

3. Meningkatkan Paket wisata yang dipromosikan/dipasarkan
4. Fasilitasi peningkatan daya saing destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksebilitas, Atraksi) dan 2P (pemasaran dan pertumbuhan ekonomi)
5. Meningkatkan pembangunan daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata
6. Meningkatkan pengembangan program Geopark singkarak , Geosite Gunung Talang
7. Memberikan Kemudahan untuk pengelolaan dan pemeliharaan di Destinasi unggulan daerah
8. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
9. Meningkatkan pertumbuhan jumlah pelaku parekraf sesuai dengan budaya, teknologi, kreativitas dan inovasi masyarakat
10. Mendorong dan meningkatkan standarisasi parekraf yang terdaftar di HKI
11. Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata sesuai standar CHSE
12. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekraf
13. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pentahelix pariwisata dan ekraf
14. Melaksanakan bimtek, Sosialisasi , pelatihan dan Workshop pemangku adat
15. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kelembagaan Adat
16. Membina kampung budaya / Desa Wisata
17. Melakukan Pendataan dan Penetapan Benda Cagar Budaya
18. Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi, Pelatihan terhadap Penggiat Budaya
19. Meningkatkan Akses/Event pendukung Kesenian Tradisional
20. Melakukan Pendataan dan Pembinaan Kesenian Tradisional
21. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kesenian

12. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka adalah situasi dimana orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat diukur dengan formulasi Jumlah Pengangguran Terbuka/Angkatan Kerja x 100.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 12.1 sebagai berikut:

Tabel. 12.1

Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,53	5,89	69,98

Sumber: Solok Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel 12.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 tidak tercapai, dimana pada Tahun 2022 target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,53% dan terealisasi sebesar 5,89 dengan capaian kinerja sebesar 69,98%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 12.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (%)	Capaian%
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,65	4,67	5,89	80,15	98,26	69,98	4,05	54,57

Sumber: LKJiP DPMPTSPNAKER 2022

Berdasarkan tabel 12.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,22% dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 28,28%, serta jika realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan target sebesar 4,05% maka capaian kinerja telah mencapai 54,57%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 12.3 di bawah ini:

Tabel. 12.3

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,86%	6,28%	5,89%

Sumber: Kab. Solok Dalam Angka 2023

Dari tabel 12.3 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok (5,89%) berada di bawah/redah jika dibandingkan dengan Provinsi (6,28%) dan jika dibandingkan secara Nasional (5,86%) Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok berada di atas/ tinggi sebesar 0,02%.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 12.4 di bawah ini:

Tabel 12.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2022 (%)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	1.39
2	Kab. Solok Selatan	3.71
3	Kab. Lima Puluh Kota	3.72
4	Kota Solok	3.90
5	Kab. Pesisir Selatan	4.61
6	Kota Padang Panjang	4.84
7	Kab. Sijunjung	4.87
8	Kota Bukittinggi	4.90
9	Kab. Agam	4.93
10	Kota Sawahlunto	5.00
11	Kota Payakumbuh	5.16
12	Kota Pariaman	5.19

13	Kab. Pasaman	5.38
14	Kab. Solok	5.89
15	Kab. Tanah Datar	5.91
16	Kab. Padang Pariaman	6.60
17	Kab. Dharmasraya	6.23
18	Kab. Pasaman Barat	6.33
19	Kota Padang	11.69

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

Pada Tabel 12.4 dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupate/Kota di Sumatera Barat bahwa Kabupaten Solok berada tingkat 14, dimana tingkat TPT yang paling rendah Kabupaten Mentawai dan yang paling tinggi Kota Padang.

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Tingginya angkatan kerja sementara peluang untuk bekerja sangat kurang/minim sekali.
2. Kurangnya minat bagi angkatan kerja untuk membuka lapangan usaha mandiri.
3. Waktu BPS melaksanakan pencacahan Sakernas disaat musim hujan, sehingga sampel yang diambil waktu buruh harian lepas banyak yang tidak pergi bekerja.
4. Kurang nya pencari kerja terdaftar.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Sat	Kinerja			Keuangan		
		Target 2022	Real 2022	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
% Kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	4,53	5,89	69,98	592.984.320	506.910.125	85,48
Tingkat Efisiensi = 2							
Tingkat Efektifitas = 81,87%							

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 12.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	16,315,700	15,999,950	98
1.	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	16,315,700	15,999,950	98
B	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	144.622.010	126,851,725	88
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	127,546,010	111,538,625	87
2.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17,076,000	15,313,100	90
C	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	65.633.305	60.746.00	93
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	55.048.805	51.245.350	93,09
2.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kab/Kota	10,584,500	9,500,650	90
D	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	366,413,305	364.058.450	99
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran PKB untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 daerah Kab/Kota	346.413.605	344.499.500	99
2.	Kegiatan Pelaksanaan Operasional lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	19.999.700	19.558.950	98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Solok adalah

1. Mengoptimalkan upaya sosialisasi informasi peluang usaha
2. Melaksanakan kegiatan Job fair
3. Mengoptimalkan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online

13. INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel serta yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 13.1 sebagai berikut:

Tabel. 13.1

Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,20)	B (60,42)	100,37

Sumber: LHE Reformasi Birokrasi oleh KEMENPANRB Tahun 2022

Berdasarkan tabel 13.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai B (60,20) dan terealisasi B (60,42) atau melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 100,37%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 13.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (59,61)	CC (59,14)	B (60,42)	NA	98,90	100,37	A (80,00)	75,53%

Sumber: LHE Reformasi Birokrasi oleh KEMENPANRB Tahun 2022

Berdasarkan tabel 13.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan

beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai A (80,00) maka capaian kinerja telah mencapai 75,53%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 13.3 di bawah ini:

Tabel. 13.3

Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B

Sumber: LHE Reformasi Birokrasi oleh KEMENPANRB Tahun 2022

Dari tabel 13.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok Tahun 2022 sama dengan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sumatera Barat yaitu B.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN PENINGKATAN KINERJA

Tercapainya target Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Dilaksanakannya kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.
2. Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peta Proses Bisnis kepada seluruh Perangkat Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Solok telah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
4. Melakukan revisi kebijakan gratifikasi tahun 2016.
5. Melakukan survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan masyarakat.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya adalah

Tabel 13.4

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Level Maturitas Angka Kelahiran Total (TFR)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	B (60,20)	B (60,42)	100,37 %	222.114.655	207.702.400	93,51%
				Rata-rata capaian		
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						6,49%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						107,34%

Berdasarkan Tabel 18.4 diketahui bahwa Indikator Indeks Reformasi Birokrasi terjadi efisiensi keuangan sebesar 6,49% dengan efektifitas 107,34%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel. 13.5

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
A	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	102.503.000	99.007.200	96,59
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	119.611.655	108.695.200	90,87
JUMLAH		222.114.655	207.702.400	93,51

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Solok adalah

- a. Meningkatkan pelaksanaan internalisasi reformasi birokrasi pada seluruh pegawai, sehingga dapat mewujudkan perubahan birokrasi ke

arah yang lebih efektif dan efisien.

- b. Mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksinya, yang mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap budaya kerja, *Core Values* ASN BerAkhlaq, area perubahan dalam Reformasi Birokrasi dan mengukur tingkat keberhasilannya.
- c. Melakukan identifikasi kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis secara berkala, menyusun peta keterkaitan, serta melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
- d. Menetapkan peta proses bisnis yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal.
- e. Melaksanakan *assessment* kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN.
- f. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat unit kerja.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan Whistle-Blowing System dan menyelesaikan drat benturan kepentingan.
- h. Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah. Serta mendorong seluruh Perangkat Daerah melaksanakan survei dan menginformasikan hasilnya kepada *stakeholders* untuk meningkatkan kualitas layanan.

14. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA

Nilai Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran untuk menilai dan mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 14.1 sebagai berikut:

Tabel. 14.1

Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (69,00)	B (66,95)	97,03

Sumber: LHE SAKIP KEMENPANRB Tahun 2022

Berdasarkan tabel 14.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai B (69,00) dan terealisasi nilai B (66,95) dengan capaian kinerja sebesar 97,03%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 14.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B (66,57)	B (66,60)	B (66,95)	NA	96,52	97,03	A (80,00)	83,69%

Sumber: LHE SAKIP KEMENPANRB Tahun 2022

Berdasarkan tabel 14.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan nilai A (80,00) maka capaian kinerja sebesar 83,69%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 14.3 di bawah ini:

Tabel. 14.3

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	B

Sumber: LHE SAKIP KEMENPANRB Tahun 2022

Dari tabel 14.3 dapat dilihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok Tahun 2022 berada dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu BB.

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Terdapat beberapa kelemahan pada aspek perencanaan yaitu:
 - a. 1 OPD tidak menyampaikan dokumen perencanaan kinerja tahun 2022.
 - b. Terdapat 1 sasaran dimana rumusan tujuan/sasaran strategis Perangkat Daerah belum berorientasi hasil.
 - c. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, relevan dan cukup.
 - d. Penjabaran kinerja belum menggambarkan kerangka logis dalam mencapai kinerja.
2. Kelemahan pada aspek kinerja:
 - a. Masih terdapat IKU yang tidak dilengkapi formulasi perhitungan
 - b. Belum terdapat pedoman mengenai pengumpulan dan pengukuran data kinerja yang lengkap.
 - c. Pengukuran kinerja belum digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
 - d. Pemantauan kinerja masih dilakukan secara manual.
3. Kelemahan Pelaporan Kinerja:

Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.
4. Kelemahan pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal:

- a. Laporan evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *output* dan *outcome* pada level Pemda maupun Perangkat Daerah.
- c. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan SAKIP di Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi internal SAKIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya sebagai berikut:

Tabel 18.4

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	B (69,00)	B (66,95)	97,03	107.082.500	92.692.119	86,56%
				Rata-rata capaian		86,56%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						13,44%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						112,20%

Berdasarkan Tabel 18.4 diketahui bahwa Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Efisiensi anggaran yang terserap sebesar 86,56% sehingga terjadi efisiensi 13,44%. Dalam hal efektifitas, dengan serapan anggaran 86,56% berhasil meraih kinerja senilai 97,03%, sehingga tingkat efektifitas sebesar 112,20%

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Solok adalah **(di antaranya peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana atau program dan kegiatan lainnya)**

Tabel. 14.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Realisasi (%)
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	18.954.250	13.941.415	73,55%
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA	119.611.655	108.695.200	90,87
JUMLAH		107.082.500	92.692.119	86,56

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Solok adalah:

1. Memperbaiki rumusan Sasaran Strategis beserta indikatornya pada level OPD agar berorientasi pada hasil dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan Tujuan/Sasaran Strategis tersebut.
2. Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama agar lebih relevan dengan Tujuan dan Sasaran, serta melengkapi dengan formulasi perhitungannya.
3. Mereviu kembali dokumen Penjenjangan Kinerja dengan mengacu kepada PermenPANRB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Menyusun pedoman SAKIP Kabupaten Solok dengan memastikan minimal aspek Perencanaan, Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja serta Evaluasi Internal secara komprehensif.
5. Melakukan reviu kembali terhadap penetapan target yang diperjanjikan tiap tahunnya yang selaras dengan hasil capaian.
6. Menerapkan kebijakan *reward and punishment* dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi.
7. Mengebangkan aplikasi *e Sakip* sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap Perangkat Daerah.
8. Menjadikan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya.
9. Mondorong pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP, untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Solok.

10. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat agar hasil evaluasi akuntabilitas dapat memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk perbaikan implementasi Akuntabilitas Kinerja

15. NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Nilai LPPD dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui hasil evaluasi LPPD dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan sampai saat ini nilai LPPD Kabupaten Solok belum disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri sampai saat laporan ini disusun sehingga Indikator Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah belum dapat dijelaskan capaian kerjanya.

16. OPINI BPK

Opini BPK adalah hasil akhir pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Opini BPK berupa sebuah pernyataan yang menyimpulkan serangkaian audit yang telah dilaksanakan dengan 4 kategori sebagai berikut:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 16.1 sebagai berikut:

Tabel. 16.1

Opini BPK

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	WTP	WTP	Tercapai

Sumber Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/ 2022

Berdasarkan tabel 16.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Opini BPK dengan Opini WTP dan terealisasi dengan Opini WTP.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 16.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Tercapai i	Tercapai i	Tercapai i	WTP	Tercapai

Sumber Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/ 2022

Berdasarkan tabel 16.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Opini BPK tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir terealisasi sesuai target yang ditetapkan dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir dapat dipertahankan, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) dengan Opini WTP sudah tercapai.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Opini BPK Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 16.3 di bawah ini:

Tabel. 16.3

Perbandingan Opini BPK

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber Lap.hasil pemeriksaan atas lap.keuangan (BPK-RI)/ 2022

Dari tabel 16.3 dapat dijelaskan bahwa Opini BPK Kabupaten Solok Tahun 2022 WTP sama dengan Opini BPK Provinsi Sumatera Barat yaitu WTP.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya target Opini BPK Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Penerapan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) maupun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang memberikan jaminan kehandalan dan keakuratan penatausahaan hingga pelaporan keuangan.
2. Semakin intensifnya pendampingan dari Badan Keuangan Daerah terhadap OPD dalam penatausahaan keuangan dan aset sehingga Laporan Keuangan dapat disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Laporan Keuangan OPD yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dihimpun dari 40 OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022 yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang didukung dengan:
 - Pemanfaat Sistem Informasi Keuangan Daerah sehingga Penyusunan Laporan Keuangan Daerah OPD sudah sistimatis.
 - Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD oleh Badan Keuangan Daerah.
4. Laporan Keuangan OPD tepat waktu didukung oleh 40 OPD yang telah menyampaikan Laporan Keuangan OPD Tahun 2022 yang tepat waktu, selanjutnya di konsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dengan cara rekonsiliasi data laporan keuangan secara berkala yang terdiri atas data keuangan dan aset.
5. Penyusunan APBD Tahun 2022 telah sesuai dengan Jadwal dan Proses Penyusunan APBD berdasarkan Permendagri Nomor: 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, sehingga penyusunan anggaran bisa dilakukan tepat waktu, didukung beberapa dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Edaran Bupati Solok tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 Nomor: 910/941/BKD-2021 Tanggal 3 November 2021.
 - 2) Peraturan Bupati Solok Nomor: 18 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022.
 - 3) Keputusan DPRD Kab. Solok Nomor: 189-23-2022 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2023 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok tentang Rancangan Peraturan Daerah Kab. Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah Tanggal 28 November 2022.

- 4) Untuk Dana Desa, Badan Keuangan Daerah dan DPMN selaku koordinator selalu berkoordinasi agar penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) tersalur tepat waktu ke rekening Kas Umum Daerah dan masing-masing rekening kas Nagari.
 - 5) Adanya rekonsiliasi barang milik daerah yang dilakukan setiap semester.
 - 6) Dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas temuan barang milik daerah, telah dilaksanakan koordinasi dengan OPD dan Instansi Vertikal.
6. Dilaksanakannya Reviu atas Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%	4.632.627.69	3.793.786.0	81,89%
				5	65	
Rata-rata capaian						81,89%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						18,11%
Tingkat Efektifitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						122,11%

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian opini BPK Kabupaten Solok pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan capaian kinerja 100% dengan penyerapan anggaran 81.06% maka terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 18,11% dan tingkat efektifitas 122,11%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Dalam mencapai target Opini BPK Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Solok melakukan kegiatan diantaranya:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPATK dan Bedahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok melalui Bimbingan Teknis.
2. Melakukan Pembinaan secara bekal kepada pengelola keuangan.
3. Melakukan evaluasi berkala.

Program dan kegiatan anggaran yang dilakukan untuk mencapai target Opini BPK di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 16.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.744.503.590,00	2.251.417.316,00	80.69
1.	Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	1.673.311.300,00	1.387.549.447,00	82.92
2.	Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	1,071.192.290,00	863.867.869,00	80.65
B	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.861.599.605,00	1.515.844.249,00	81.43
1.	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	1.861.599.605,00	1.515.844.249,00	81.43
C	Program Penyelenggaraan Pengawasan	26.524.500	26.524.500	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	26.524.500	26.524.500	100
JUMLAH		4.606.103.195	3.767.261.565	81,79

Sumber: Laporan Keuangan Daerah kabupaten Solok Tahun 2023

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Opini BPK Kabupaten Solok adalah

1. Mempertahankan kesesuaian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Konsisten terhadap efektivitas system pengendalian intern.
4. Akan menindaklanjuti sejumlah catatan dari pemeriksa.
5. Menyampaikan Laporan Keuangan dengan lebih cepat.
6. Meningkatkan keterampilan Pengelola Keuangan pada masing-masing OPD dalam melaksanakan penatausahaan keuangan dan menjalankan aplikasi SIPD.
7. Meningkatkan kualitas pendampingan dan pembinaan keuangan oleh Badan Keuangan Daerah.
8. Meningkatkan kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam menjalankan Reviu atas Laporan Keuangan.

17. INDEKS PROFESIONALITAS SDM

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang professional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan public, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur di dalam Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran IP ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Tujuan IP ASN adalah memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran IP ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat IP ASN adalah:

- a. Bagi Pegawai, digunakan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitassebagai Pegawai ASN

- b. Bagi Instansi Masyarakat, digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional
- c. Bagi Masyarakat, digunakan sebagai instrument control sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak professional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan public

Prinsip IP ASN:

- a. Koheren, kriteria yang digunakan sebagai standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari system merit
- b. Kelayakan, Standar Pengukuran IP ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data riil yang melekat secara individual pada setiap ASN
- c. Akuntabel, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya
- d. Multi-Dimensional Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari beberapa dimensi

Kriteria Pengukuran IP ASN diukur melalui 4 dimensi:

- a. Dimensi Kualifikasi

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan pengukuran, dengan rincian bobot per indikator sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
Kualifikasi	Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS	25%	
	S-3		25
	S-2		20
	S-1/D-V		15
	D-III		10
	SLTA/D-II/D-I Sederajat		5
	Dibawah SLTA		1

Berdasarkan SE MenpanRB Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas PNS berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur Pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar.

- b. Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS

dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen). Indikator yang digunakan yaitu Riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- 1) Diklat kepemimpinan
- 2) Diklat Fungsional
- 3) Diklat Teknis
- 4) Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus dan sejenisnya

Rincian bobot per indikator dirangkum sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
KOMPETENSI	Riwayat Pengembangan kompetensi	40%	
	Diklat Kepemimpinan (PNS yang menduduki JPT, JA dan JP)		15
	SUDAH		15
	BELUM		0
	Diklat Fungsional (PNS yang menduduki jabatan fungsional)		15
	SUDAH		15
	BELUM		0
	Diklat Teknis (PNS yang menduduki JPT, JA, JP dan Jabatan Fungsional)		15
	Telah mencapai pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		15
	Telah mencapai pelatihan teknis dibawah 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatan		Proporsional. Contoh: PNS mendapatkan 10JP maka bobot yang didapatkan adalah
	Diklat Teknis (PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana)		22,5
	Telah mencapai pelatihan teknis sebanyak 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		22,5
	Telah mencapai pelatihan teknis dibawah 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 tahun terakhir		Proporsional. Contoh: PNS mendapatkan 10JP maka bobot yang didapatkan adalah
	Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya (PNS yang menduduki JPT, JA, JP dan Jabatan Fungsional) dalam 2 tahun terakhir		10
	SUDAH		10
	BELUM		0
	Seminar/ Workshop/ Magang/ Kursus/ sejenisnya (PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana) dalam 2 tahun terakhir		17,5
	SUDAH		17,5
	BELUM		0
	Keikutsertaan dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/ surat tugas dan sejenisnya		

c. Dimensi Kinerja

Digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat

individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan pengukuran

Rincian bobot per indikator sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
KINERJA	Riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP)	30%	
	91-100		30
	76-90		25
	61-75		15
	51-60		5
	50 kebawah		1

d. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/ informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5 % (lima persen) dari keseluruhan pengukuran

Rincian bobot per indikator sebagai berikut:

Dimensi	Indikator	Bobot Dimensi	Bobot per Indikator
DISIPLIN	Data/ Informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima	5%	
	Tidak Pernah		5
	Ringan		3
	Sedang		2
	Berat		1

Rumus pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dikalikan nilai masing-masing jawaban dimensi. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

- IPi = Indeks Profesionalisme ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
- IP2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
- IP3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
- IP4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

NO	RENTANG NILAI	KATEGORI
1.	91-100	Sangat Tinggi
2.	81-90	Tinggi
3.	71-80	Sedang
4.	61-70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian Indeks Profesionalitas ASN terakhir berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XII Pekanbaru Nomor 1617/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Laporan Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru, dilihat pada tabel 17.1 sebagai berikut:

Tabel. 17.1

Indeks Profesionalitas SDM

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas SDM	62	45,80	73,87

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru

Berdasarkan tabel 17.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Profesionalitas SDM sebesar 62 dan terealisasi sebesar 45,80 dengan capaian kinerja sebesar 73,87%.

Untuk nilai IP ASN per dimensi penilaian adalah sebagai berikut:

JUMLAH PNS SAAT PENILAIAN	DIMENSI KUALIFIKASI	DIMENSI KOMPETENSI	DIMENSI KINERJA	DIMENSI DISIPLIN	TOTAL NILAI
4650	13,31	10,5	16,99	4,99	45,80
	DARI TOTAL BOBOT DIMENSI	DARI TOTAL BOBOT DIMENSI	DARI TOTAL BOBOT DIMENSI	DARI TOTAL BOBOT DIMENSI	DARI TOTAL BOBOT
	25	40	30	5	100
CAPAIAN PER DIMENSI	53,24%	26,25%	56,63%	99,80%	45,80%

Dapat dilihat dari masing-masing bobot dimensi persentase capaian terendah IP ASN Kabupaten Solok berada pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 26,25%

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 17.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Profesionalitas SDM	44,39	45,86	45,80	96,08	77,73	73,87	74	61,89

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru

Berdasarkan tabel 17.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Profesionalitas SDM tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** sebesar **0,06** nilai indeks dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** sebesar **3,86** %, penyebab penurunan capaian kinerja disebabkan oleh masih kurang pemahaman pengelola keuangan serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 74 maka capaian kinerja telah mencapai **61,69** %.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Profesionalitas SDM Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 17.3 di bawah ini:

Tabel. 17.3

Perbandingan Indeks Profesionalitas SDM

No.	Indikator Kinerja	Nasional (BKN Regional XII)	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Profesionalitas SDM	53,20	50,22	45,80

Sumber: Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Pekanbaru

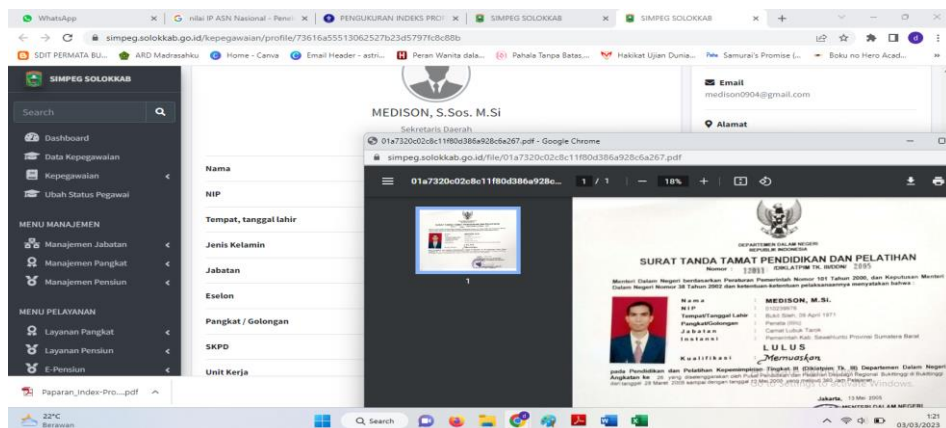
Dari tabel 17.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas SDM Kabupaten Solok Tahun 2022 masih berada dibawah rata-rata IP ASN Nasional (BKN Regional XII Pekabbaru) dan Provinsi. Untuk data IP ASN Nasional (BKN Regional XII Pekanbaru) merupakan data n-1 atau data tahun 2021 yang di rilis BKN yaitu sebesar 53,20. Sedangkan data IP ASN Provinsi pada tahun 2021 adalah sebesar 50,22. Dan IP ASN Kabupaten Solok adalah 45.80. Ketiga indeks tersebut termasuk dalam kategori **sangat rendah**, yaitu dengan rentang nilai 60 kebawah

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

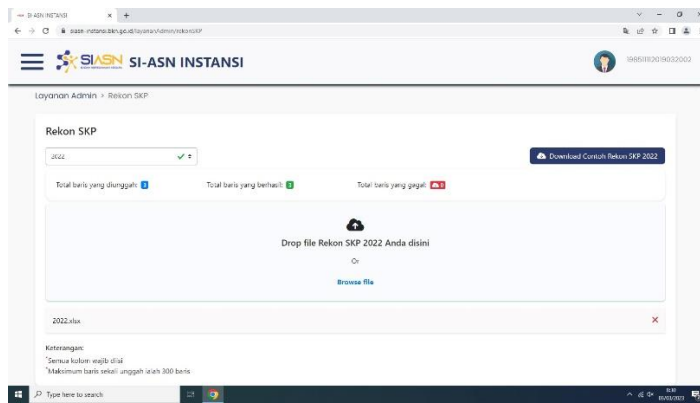
Tercapainya/ tidak tercapainya target Indeks Profesionalitas SDM Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Belum dibentuknya tim pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sehingga proses inventarisasi, pengumpulan dokumen, dan penginputan dokumen ke dalam aplikasi menjadi tidak maksimal.
2. Proses update data melalui SIMPEG belum maksimal dan sinkronisasi data SIMPEG dan SAPK belum bisa berjalan sepenuhnya karena keterbatasan wewenang user dan setiap dimensi memiliki cara yang berbeda untuk proses updatenya, misalnya: dimensi kualifikasi harus melalui Pencantuman Gelar, dimensi kinerja melalui e-LAPKIN, dimensi Disiplin harus entry manual, dan dimensi Kompetensi juga harus manual. Ditambah adanya migrasi system dari SAPK ke SI- ASN di akhir tahun 2022 sehingga kelanjutan proses pemutakhiran data menunggu teknis lebih lanjut dari BKN.

Contoh update data melalui SIMPEG

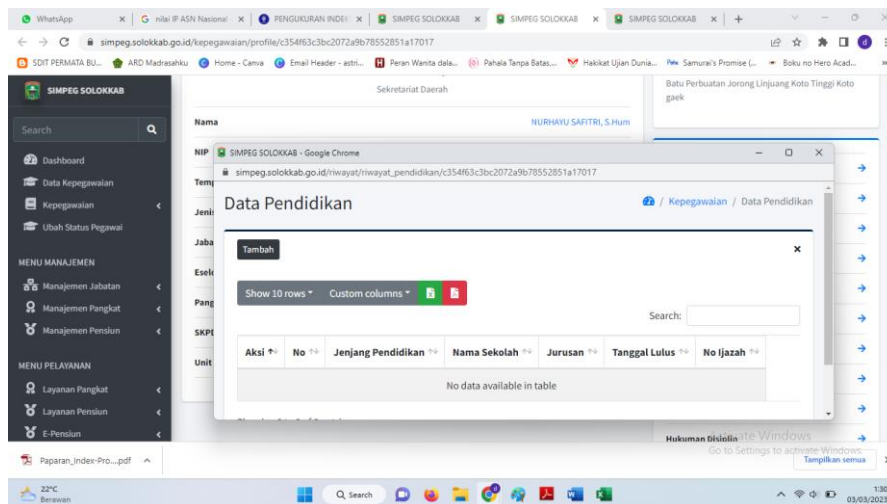


Screenshoot e-LAPKIN



3. Rendahnya partisipasi PNS untuk mengumpulkan dokumen yang terkait dengan perhitungan IP ASN karena tidak adanya sanksi maupun reward bagi pegawai yang telah mengumpulkan dokumen dengan lengkap

Contoh data yang tidak diupload di SIMPEG



4. Terdapat beberapa pelatihan atau seminar yang tidak mengeluarkan sertifikat kepersertaan. Hal ini berdampak kepada tidak terakumulasinya kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti oleh ASN tersebut ke dalam pengukuran IP ASN.
5. Proses pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan belum berjalan maksimal. Alokasi Anggaran yang ada disesuaikan untuk prioritas sesuai keadaan tahun berjalan. Contoh untuk tahun 2022 anggaran pengembangan kompetensi ASN lebih difokuskan untuk urgensi pelaksanaan Latsar CPNS di Lingkungan Kabupaten Solok sehingga pelaksanaan diklat PIM belum bisa direalisasikan

Dari beberapa penyebab diatas, berikut dirumuskan alternatif solusi yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok perlu membentuk Tim Pengukuran Indek Profesionalitas ASN
2. Memberikan reward dan punishment terhadap ASN yang disiplin dalam mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
3. Selalu melakukan update secara berkala terhadap pegawai yang telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis maupun seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lain yang sejenis di aplikasi SAPK, sekarang aplikasi SI-ASN.
4. Meningkatkan daya Tarik ASN dalam mencari informasi dan mengikuti pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya terutama dengan pengembangan kompetensi yang bersifat e-learning.
5. Meningkatkan performa aplikasi SIMPEG baik dari segi update data mandiri oleh masing-masing pegawai yang memudahkan BKPSDM untuk melakukan rekapitulasi data pengembangan diri maupun dari segi Sinkronisasi data dengan SI-ASN yang sudah dirilis di penghujung tahun 2022 yang lalu.
6. Mensiati keterbatasan Anggaran dengan mengikuti diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis yang diadakan dan difasilitasi secara Rupiah Murni oleh pemerintah pusat, serta mendorong agar PNS untuk mengikuti seminar atau workshop secara daring atau e-learning.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator indeks Profesionalitas ASN sabagai berikut:

Tabel. 17. 4

Efisiensi dan Efektifitas Indikator indeks Profesionalitas ASN

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
indeks Profesionalitas ASN	62	45,80	73,87	3.464.178.054	2.578.822.876	74,44%
				Rata-rata capaian		74,44%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						25,56%

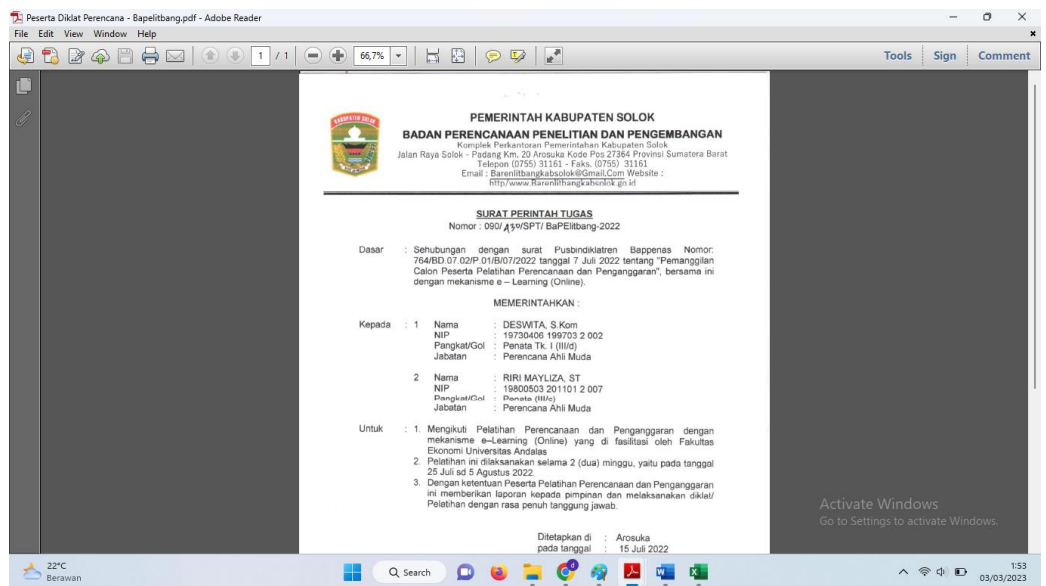
Tingkat Efektifitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100% 99,23%

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Solok pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya waktu dan sumber daya anggaran serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Dengan capaian kinerja 73,87% dengan penyerapan anggaran 74,44% maka terjadi efisiensi sumber daya keuangan sebesar 25,56% dan tingkat efektifitas 99,23%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

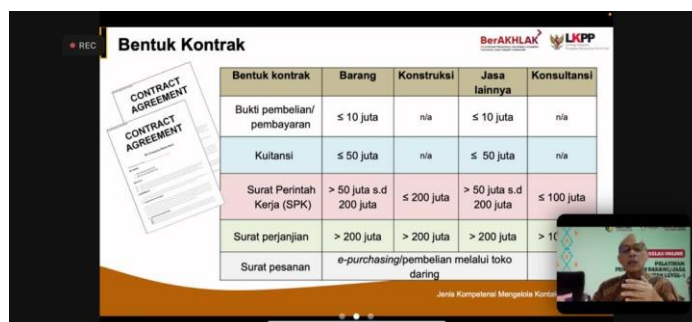
Dalam rangka mencapai target IP ASN Kabupaten Solok pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya:

1. Memfasilitasi PNS untuk mengikuti diklat secara e-learning, sehingga dapat berkontribusi dalam pemghematan anggaran



2. Melaksanakan diklat PBJ di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok dengan metode blended learning (gabungan antara klasikal dan tatap muka)

Screenchhoot diklat PBJ secara daring



Screen shoot diklat PBJ secara tatap muka



3. Melaksanakan diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Solok.

Dokumentasi pelaksanaan PPNS Tahun 2022



Tabel. 17.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	1.551.079.530	1.092.016.000	79,47
1.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.551.079.530	1.092.016.000	79,47
B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA (BAPELITBANG)	396.741.849	367.311.359	92.58

1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	396.741.849	367.311.359	92.58
C	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BKD)	815.650.675	674.428.637	82,69
1.	Sub Kegiatan Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/ kota	576.544.550	507.638.107	88.05
2.	Sub Kegiatan Pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang pemerintah kabupaten/ kota	239.106.125	166.790.530	69.76
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (DISDIKPORA)	504.728.000	313.966.380	62,21
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195.978.000	131.100.500	66.90
2.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	304.830.500	179.283.380	58.81
	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.919.500	3.582.500	91.40
E	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (DISDIKPORA)	195.978.000	131.100.500	66.90
1.	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195.978.000	131.100.500	66.90
JUMLAH		3.464.178.054	2.578.822.876	74,44

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Solok tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas SDM Kabupaten Solok adalah

1. Pemerintah Kabupaten Solok perlu membentuk TIM Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN seperti diamanatkan oleh Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019. Jika memungkinkan, anggota tim tidak hanya terdapat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tetapi juga tersebar di setiap OPD. Apabila di setiap OPD telah terdapat anggota tim pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, maka akan memudahkan pegawai dalam mengetahui informasi mengenai dokumen apa saja yang akan dikumpulkan dan sejauh mana pentingnya Indeks Profesionalitas ASN bagi ASN itu sendiri dan bagi masyarakat dalam menikmati pelayanan public. Selanjutnya tim

pengukuran Indeks Profesionalitas ASN juga dapat berperan dalam mengawal kualitas dokumen yang akan dikumpulkan tersebut.

2. .memberikan reward terhadap ASN yang disiplin dalam mengumpulkan dokumen yang terkait dengan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan punishment terhadap ASN yang lalai dalam memenuhi permintaan dokumen. Hal ini sangat penting agar ASN termotivasi dalam memenuhi dokumen yang diminta untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas masing-masing, dengan mengikuti pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi Pendidikan, menghindari hukuman disiplin, dan meningkatkan kinerja secara nyata.
3. Selalu melakukan update secara berkala terhadap pegawai yang telah menyelesaikan pelatihan diklat kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis maupun seminar, workshop, bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lain yang sejenis di aplikasi SI-ASN. Ini berlaku bagi tim pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
4. Meningkatkan daya Tarik ASN dalam mencari informasi dan mengikuti pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya terutama pengembangan kompetensi yang bersifat e-learning dan yang penting **memiliki sertifikat kepersertaan** diklat, bimbingan teknis, workshop atau pun seminar
5. Meningkatkan performa SIMPEG lebih maksimal agar setiap pegawai dapat melakukan update data secara mandiri, serta membuat sinkronisasi antara SIMPEG dengan aplikasi pengukuran IP ASN yang ada (SI-ASN)

18. LEVEL MATURITAS SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Maturitas yang rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

Nilai Maturitas SPIP didapatkan berdasarkan *Quality Assurance* yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya Level Maturitas SPIP Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 18.1 sebagai berikut:

Tabel. 18.1

Level Maturitas SPIP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Level Maturitas SPIP	3	3	100

Sumber: Inspektorat kab. Solok, 2022

Berdasarkan tabel 18.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Level Maturitas SPIP pada Level 3 dan terealisasi sebesar 3 dengan capaian kinerja sebesar 100%

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 18.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian
1.	Level Maturitas SPIP	3	3	3	100	100	100	4	75%

Sumber: Inspektorat kab. Solok, 2022

Berdasarkan tabel 18.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Level Maturitas SPIP tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya **dapat dipertahankan** pada level 3 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir juga dapat dipertahankan pada level 3 serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) pada Level 4 maka capaian kinerja telah mencapai 75%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Level Maturitas SPIP Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 18.3 di bawah ini:

Tabel. 18.3

Perbandingan Level Maturitas SPIP

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Level Maturitas SPIP	N/A	3	3

Sumber: BPKP

Dari tabel 18.3 dapat dijelaskan bahwa Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok Tahun 2022 pada Level 3, telah menyamai capaian Level Maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya target Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi atas implementasi SPIP oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.
2. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman bagi OPD terhadap Manajemen Risiko dan pengendaliannya.
3. Pendampingan penyusunan RTP oleh APIP terhadap OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
4. Evaluasi terhadap dokumen RTP yang disusun OPD

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektivitas sumber daya adalah berupa serapan anggaran pada sub kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 18.4

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Level Maturitas SPIP

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Level Maturitas SPIP	60,20	60,42	100,36 %	102.503.00	99.007.200	96,59%
				Rata-rata capaian		96,59%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						3,41%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						103,90%

Pada Tabel 18.4 dapat dilihat Efisiensi terjadi pada anggaran dimana serapan anggaran sebesar 96,59% maka terdapat efisiensi 3,41%. Dengan

serapan anggaran 96,59% mencapai tingkat capaian kinerja lebih tinggi yaitu sebesar 100,36% sehingga nilai efektivitas adalah 104,99%

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP pada Tahun 2022 diantaranya meningkatkan kualitas SDM APIP dengan mengikutkan diklat dan seminar, melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Level Maturitas SPIP di Kabupaten Solok adalah:

Tabel.18.5

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	241.753.000,00	235.624.800,00	97,46%
1.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	241.753.000,00	235.624.800,00	97,46%
1.1	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	102.503.000,00	99.007.200,00	96,59%

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP Kabupaten Solok adalah:

1. Melakukan Penilaian Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah dan OPD secara berkelanjutan. Penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pengkomunikasian risiko dan RTP, implementasi RTP, serta pemantauan dan evaluasi risiko dan RTP.
2. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *Area of Improvement* (AOI), antara lain melakukan evaluasi atas efektifitas implementasi dan kebijakan pada seluruh sub unsur, serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi.
3. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem

informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *on line, real time*, sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan secara *up date* dan efektif untuk pengambilan keputusan.

Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

19. NILAI SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Berikut Domain dan Aspek penilaian SPBE:

Domain	Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1	kebijakan SPBE	13%
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2	Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3	Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6	Audit TIK	4,5%
Domain 4	Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8	Layanan Publik	18%

Sumber: KEPMENPANRB 108 2023

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2-5,0	Memuaskan
2	3,5-<4,2	Sangat Baik
3	2,6-<3,5	Baik
4	1,8-<2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Sumber: KEPMENPANRB 108 2023

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 19.1 sebagai berikut:

Tabel. 19.1

Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	3,12	124,8

Sumber: *KEPMENPANRB 108 2023*

Berdasarkan tabel 19.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 Realisasi melebihi target yang ditetapkan (Tercapai), dimana pada Tahun 2022 target Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,5 dan terealisasi sebesar 3,12 dengan capaian kinerja sebesar 124,8%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 19.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,5	2,82	3,12	100	122,6	124,8	3,4	9,47

Sumber: *KEPMENPANRB 108 20223*

Berdasarkan tabel 19.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 0,3 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 2,2%, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 3,4 maka capaian kinerja sebesar 91,7%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 19.3 di bawah ini:

Tabel. 19.3

Perbandingan Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,24	3,18	3,12

Sumber: *KEPMENPANRB 108 2023*

Dari tabel 19.3 dapat dijelaskan bahwa Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok Tahun 2022 adalah sebesar 3,12. Nilai tersebut berada sedikit dibawah nilai SPBE provinsi, yang mana nilai SPBE provinsi sebesar 3,18. Namun jika dibandingkan dengan nilai SPBE Nasional nilai SPBE Kabupaten Solok lebih tinggi sebesar 0,88.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya target Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Keterlibatan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait



2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang sesuai agenda pada program kerja Tim.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kode Pos 27364
Website : setda.solokkab.go.id. Email : diskominfo@solokkab.go.id

Nomor : 555/ 123 /Diskominfo-2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Sifat : Biasa
Perihal : **Undangan**

Arosuka, * Juli 2022
Kepada Yth.
Sdr. 1. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/
di Lingkungan Pemkab.
Solok
2. Camat Se-Kabupaten Solok
di-

Tempat

Dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, bersama ini kami undang Saudara untuk dapat hadir pada :

Hari : Selasa s/d Rabu
Tanggal : 19 s/d 20 Juli 2022
Tempat : Ruang Rapat Solok Nan Indah
Acara : Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sekaligus Optimalisasi Pengelolaan Website dan Medsos SKPD.

Demi kelancaran acara tersebut diminta kepada Saudara untuk hadir bersama Sekretaris Badan/ Dinas/ Kantor selaku Pejabat Penghubung SP4N LAPOR! dan Operator Website SKPD dengan membawa perlengkapan **satu unit laptop** per SKPD/ Instansi.

Selama pelaksanaan kegiatan, panitia hanya menyediakan konsumsi bagi peserta, sedangkan biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD masing-masing, untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi melalui panitia yakni Kasi Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Solok (Sdri. ELNITA, SH, M.Ikom No. Hp. 085263531390).

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, dan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

MEDISON, S.Sos, MESI
NIP. 19710409 1992203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Solok (sebagai laporan) di Arosuka
2. Arsip.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya adalah berupa serapan anggaran pada indikator Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai berikut:

Tabel 18.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian

Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	3,12	124,8	1.047.000. 000	1.047.000. 000	100%
				Rata-rata capaian		100%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						-
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						124,8 %

Pada indikator Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) target Rp. 1.047.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.047.000.000 atau sebesar 100% (dengan tingkat efisiensi sebesar 0% (dua koma dua persen) dan tingkat efektifitas 124,8%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Untuk meningkatkan SPBE Kabupaten Solok Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Solok melakukan kegiatan yaitu:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok adalah **(diantaranya peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana atau program dan kegiatan lainnya)**

Tabel. 19.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS			100
1.	Kegiatan Penerapan inovasi WISI sebagai program inovatif pada dimensi smart living	56.000.000	56.000.000	
2.	Kegiatan Optimalisasi penggunaan Sisfo Izin sebagai program inovatif pada dimensi Smart Governance	86.000.000	86.000.000	
3.	Kegiatan Penerapan inovasi Pustaka Bergilir sebagai program inovatif pada dimensi smart society	45.000.000	45.000.000	

4.	Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan UKM Online sebagai program inovatif pada dimensi Smart Economy	60.000.000	60.000.000	
5.	Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan aplikasi jsni sebagai program inovatif pada dimensi Smart Branding	35.000.000	35.000.000	
6.	Kegiatan Penerapan inovasi Bank Sampah sebagai program inovatif pada dimensi smart Environment	35.000.000	35.000.000	
B	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SPBE			
1.	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan secara optimal Pelayanan Administrasi secara elektronik	230.000.000	230.000.000	
2.	Kegiatan Pengembangan dan Penerapan secara optimal Pelayanan Publik secara elektronik	500.000.000	500.000.000	

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Solok adalah

1. Menyusun dokumen revisi perbup SPBE
2. Menyusun Dokumen Proses Bisnis SPBE
3. Menyiapkan dokumen Dukung manajemen SPBE

20. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Pengertian indikator dan formulasi indikator

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 20.1 sebagai berikut:

Tabel. 20.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,45	3,39	98,26

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kab. Solok Tahun 2022

Berdasarkan tabel 20.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,45 dan terealisasi sebesar **3,39** dengan capaian kinerja sebesar 98,26 %

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 20.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,4	3,07	3,39	94,44	90,17	98,26	3,65	92,87

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kab. Solok Tahun 2022

Berdasarkan tabel 20.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami **peningkatan** sebesar **0,32** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami **peningkatan** sebesar **8,09 %**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 3,65 maka capaian kinerja sebesar **92,87**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 20.3 di bawah ini:

Tabel. 20.3

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,60	3,39

Sumber: Laporan IKM Prov. Sumbar Tahun 2022

Dari tabel 20.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Solok Tahun 2022 berada dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,60.

D. ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Kurang kompetensi SDM dibidang pelayanan sehingga petugas belum maksimal memahami arti pentingnya melayani konsumen.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
3. Pelaksanaan survei hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan dalam tahun yang sama.
4. Masih ada beberapa perangkat daerah yang tidak melakukan survei kepuasan masyarakat.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,45	3,39	98,26 %		170.427.117	97,59%
				174.626.900		
				Rata-rata capaian		97,59%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						2,41%
Tingkat Efektifitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						100,68%

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Solok pada Tahun 2022 melaksanakan beberapa kegiatan dan program diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah.
2. Melakukan evaluasi secara berkala kepada Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Solok sebagai berikut:

Tabel. 20.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	174.626.900	170.427.117	97,59
	Kegiatan Penataan Organisasi	174.626.900	170.427.117	97,59
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	174.626.900	170.427.117	97,59

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Solok adalah

1. Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat diwajibkan perangkat daerah untuk membuat rencana tindak lanjut.
2. Mendorong setiap perangkat daerah untuk melakukan survei minimal 2 kali dalam satu tahun.
3. Mendorong perangkat daerah untuk memberlakukan survei kepuasan masyarakat secara online, sehingga tidak ada lagi perangkat daerah yang tidak melakukan survei kepuasan masyarakat.
4. Melakukan pendampingan terhadap perangkat daerah dalam melakukan survei kepuasan masyarakat.

21. INDEKS INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain itu pelaksanaan inovasi perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi hal yang massif untuk dapat diterapkan.

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik

penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Untuk itu, langkah awal yang dilakukan salah satunya adalah melalui penilaian inovasi daerah melalui supervisi secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah berikut dampaknya.

Metode Penilaian Inovasi Daerah dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \text{ISP} + \text{rata - rata ISI}$$

$$\text{ISP} = \sum_{i=1}^{16} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i$$

$$\text{rata - rata ISI} = \frac{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^{36} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i \text{ Inovasi ke } j}{n}$$

$$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

n : Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah

i : Nomor Indikator

j : Nomor Inovasi

ISP : Indikator Satuan Pemda

ISI : Indikator Satuan Inovasi

Skor total maksimum adalah 250

Dengan proporsi aspek sebagai berikut:

Satuan Pemda sebesar 40, dengan 16 merupakan Skor Jumlah Inovasi dan Satuan Inovasi Daerah sebesar 60

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 21.1 sebagai berikut:

Tabel. 21.1

Indeks Inovasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Inovasi Daerah	62	54	87,10

Sumber: Kepmendagri 2021

Berdasarkan tabel 21.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Inovasi Daerah sebesar 62 dan terealisasi sebesar **54** dengan capaian kinerja sebesar **87,10%**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 21.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Inovasi Daerah	1.512	36,27	54	NA	60,45	87,10	70	77,14

Sumber: Kepmendagri 2021

Berdasarkan tabel 21.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Inovasi Daerah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **Peningkatan** sebesar **17,73** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **26,65**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 70 maka capaian kinerja sebesar **77,14%**. Penyebab meningkatnya kinerja pada Indeks Inovasi Daerah sudah banyak Perangkat Daerah yang melakukan Inovasi dan mendapat penghargaan dari pihak luar.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 21.3 di bawah ini:

Tabel. 21.3

Perbandingan Indeks Inovasi Daerah

No.	Indikator Kinerja	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Inovasi Daerah	70,49	31,633

Sumber: Kepmendagri 2021

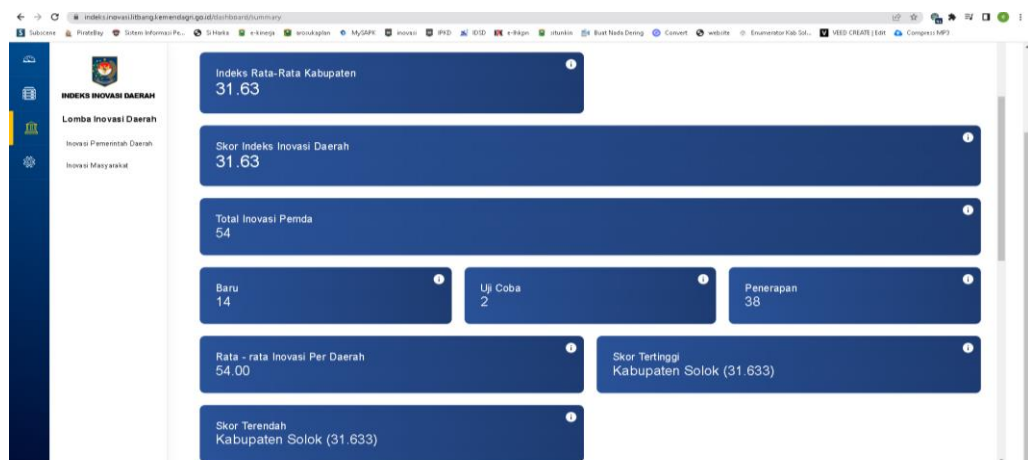
Dari tabel 21.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Total Inovasi Pemda 54, dengan uraian berupa 14 Inovasi bersifat baru, 2 bersifat ujicoba, dan 38 berupa Inovasi

Penerapan, dengan rata-rata Inovasi per Daerah adalah 54, dan dengan skor 31,633 % dan jika dibandingkan dengan Indeks Inovasi Daerah Provinsi sebesar 70,49 Kabupaten Solok di bawahnya.

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Secara jumlah Inovasi Kabupaten Solok telah banyak namun belum terdokumentasi dengan baik.
2. Jumlah laporan Inovasi yang disampaikan oleh pihak OPD masih kurang.



E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya kegiatan indeks Inovasi Darah sebagai berikut:

Tabel 21.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Indeks Inovasi Daerah**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Inovasi Daerah	62	54	87,10%	522.118.3	485.927.63	93,07%
				60	5	
Rata-rata capaian						93,07%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						93,59%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						33,99%

Dari tabel 21.4 dapat dilihat bahwa untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah dianggarkan sebanyak 522.118.360 dan terserap sebanyak

485.927.635 atau 93,07% dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 87,10% maka didapat tingkat efektifitas sebesar 93,59%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 21.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
A	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	522.118.360,-	485.927.635,-	93,07
1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan ENVIROMENTAL HEALT RISK ASSESMENT / EHRA) Strategi Sanitasi Kabupaten / SSK	522.118.360,-	485.927.635,-	93,07

Sumber: fungsional bulan desember 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Solok adalah

1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap OPD-OPD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Solok tentang Inovasi Daerah dan pentingnya Inovasi Daerah sebagai salah satu target dalam penilaian kinerja daerah.
2. Melakukan MoU antara Kepala Daerah dan Kepala OPD terkait penerapan Inovasi Daerah.

22. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Umur panjang dan hidup sehat
2. Pengetahuan
3. Standar hidup layak

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dilihat pada tabel 22.1 sebagai berikut:

Tabel. 22.1

Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,99	70.02	100.04%

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

Berdasarkan tabel 22.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,99 dan terealisasi sebesar **70.02** dengan capaian kinerja sebesar **100.04%**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 22.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,08	69,24	70.02	NA	99,58	100.04	72,00	97.25

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

Berdasarkan tabel 22.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Pembangunan Manusia tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **0.78** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **100.04%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 72 maka capaian kinerja sebesar **97.25%**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 22.3 di bawah ini:

Tabel. 22.3

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72.91	73.26	70.02

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

Dari tabel 22.3 dapat dijelaskan bahwa rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok Tahun 2022 masih berada di bawah UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 73.26 dan UHH Nasional sebesar 72.91. Apabila dibandingkan dengan 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota se Sumatera Barat IPM di Kabupaten Solok berada pada peringkat 7 (tujuh)

Tabel 22.4

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia	
		2022	2021
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	73.26	72.65
	Kabupaten		
1	Agam	73.29	72.57
2	Dharmasraya	72.30	71.76
3	Padang Pariaman	71.63	70.76
4	Pesisir Selatan	70.84	70,03
5	Tanah Datar	70.29	72.46
6	Lima Puluh Kota	70,28	69,68
7	Kab.Solok	70.02	69.24
8	Solok Selatan	69.71	69.23
9	Sijunjung	68.69	67.86

10	Pasaman Barat	68,25	67.94
11	Pasaman	67.41	66.77
12	Kepulauan Mentawai	62.19	61.35
	Kota		
13	Padang	83.29	82.90
14	Bukittinggi	81.42	80.70
15	Payakumbuh	79.53	79.08
16	Solok	79.23	78.41
17	Padang Panjang	78.78	77.97
18	Pariaman	77.65	77.07
19	Sawahlunto	73.73	72.88

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN KINERJA

Tercapainya target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok dar bidang kesehatan tahun 2022 disebabkan oleh.

1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup Kabupaten Solok pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0.4 tahun dari 69.79 pada tahun 2021 menjadi 69.19 pada tahun 2022, dengan capaian kinerja **100.26%**.

Peningkatan capaian UHH ini disebabkan karena:

- a. Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
Dibandingkan dari tahun 2021 angka kematian ibu menurun dari 148/100.000 KH (10 orang) menjadi 78,95/100.000 KH (5 orang) pada tahun 2022 dan jumlah kematian bayi masih di angka yang sama dengan tahun 2021 yaitu 64 orang atau 10.10/1.000 KH.
- b. Menurunnya Prevalensi Stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun) dan Balita
Prevalensi stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 13.5 pada tahun 2021 menjadi 12.95 pada tahun 2022, begitu juga dengan prevalensi Balita stunting juga mengalami penurunan dari 2021 dari 16.20 menjadi 15.14 pada tahun 2022. Penurunan angka prevalensi stunting ini menunjukkan adanya peningkatan status gizi pada Baduta dan Balita.
- c. Menurunnya angka kesakitan

- Dapat dilihat dengan capaian prevalensi penyakit seperti prevalensi tuberculosis, prevalensi hipertensi, prevalensi diabetes mulitus dan prevalensi HIV
- d. Peningkatan capaian SPM
Pada tahun 2021 rata-rata capaian SPM Bidang kesehatan 73.19% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 95.30%.
 - e. Penyelidikan epidemiologi dan penanganan KLB/Wabah
Semua kejadian KLB/Wabah dan bencana sudah dilakukan penanganan sesuai standar.
2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
- a. Untuk Indikator Angka Rata-rata lama Sekolah pada Tahun 2021 mencapai target yang telah dilaksanakan disebabkan oleh:
 - a) Sudah meratanya pendidikan kesemua golongan.
 - b) Sudah meratanya sebaran sekolah diwilayah Kabupaten Solok.
 - c) Terlaksananya seluruh program yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan.
 - d) Dukungan anggaran di setiap program.
 - b. Motivasi masyarakat usia diatas 25 tahun dimasa lampau yang masih kurang untuk bersekolah

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya dalam rangka peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Solok dari elemen kesehatan (UHH) sebagai berikut:

a. Keuangan

APBD Dinas Kesehatan tahun 2022 yang dialokasi untuk peningkatan capaian UHH sebesar Rp. 69.416.976.825,00 dengan realisasi sebesar Rp. 60.653.614.284,91 atau 87.38%. Sementara capaian kinerja untuk UHH ini 100.26%

Efisiensi Anggaran = Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran

$$100.26\% - 87.38\% = 12.88\%$$

b. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan PMK No 43 Tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di Puskesmas. Pada tahun 2022 persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya

manusia sesuai standar 85%. Apabila dibandingkan dengan capaian UHH 100.26% maka terdapat efektifitas sumber daya manusia sebesar 15.28%

$$\text{Efektivitas SDM} = \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

$$100.26\% - 85\% = 15.26\%$$

c. Sarana, prasarana dan alat kesehatan

Ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan dapat dievaluasi/update melalui aplikasi ASPAK aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan). Pada tahun 2022 persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya 66.19%. Apabila dibandingkan dengan capaian UHH 100.26% maka terdapat efektifitas sumber daya manusia sebesar **33.81%**

$$\text{Efektivitas Sarana dan Prasarana} = \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}$$

$$100.26\% - 66.19\% = 33.81\%$$

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok untuk bidang kesehatan antara lain

Tabel. 22.4
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu)	2.009.636.305,00	1.089.971.912,00	54,24
2	Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi)	2.142.423.600,00	1.959.595.150,00	91,47
3	Penurunan Prevalensi Stunting	4.008.557.197,00	3.453.224.052,00	86,15
4	Penurunan Angka Kesakitan	15.162.814.587,00	12.871.662.743,00	84,89
5	Peningkatan terhadap standar pelayanan	46.093.545.136,00	41.279.160.427,91	89,56
6	Harapan Lama Sekolah	469.684.304.770	446.838.196.534	95,14
		539.101.281.595,00	507.491.810.818,91	94,14

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Solok Tahun 2022

Berbagai upaya dan kegiatan sudah dilakukan untuk meningkatkan capaian UHH di Kabupaten Solok, Kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara umum meliputi:

1. Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat
2. Memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
3. Melakukan koordinasi kerja samanya dengan lintas terkait (pemerintah dan swasta) dalam upaya peningkatan pembangunan di bidang kesehatan.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Solok di bidang kesehatan adalah

1. Peningkatan akses melalui pemenuhan tenaga kesehatan, peningkatan sarana pelayanan primer (puskesmas, klinik pratama praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat dan bahan habis pakai), serta inovasi untuk pelayanan di daerah terpencil dan sangat terpencil dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak atau telemedicine.
2. Peningkatan mutu baik fasilitas penyelenggara layanan maupun sumber daya manusia kesehatan melalui penyediaan Standar Prosedur Operasional (SOP), akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan melalui diklat atau bimtek.
3. Penguatan sistem rujukan baik di tingkat Kabupaten, Regional maupun Nasional untuk menjamin mutu layanan dan efisiensi pembiayaan. Sistem rujukan adalah suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan
4. Penguatan dukungan pelayanan kesehatan dari lintas sektor baik itu berupa regulasi, infrastruktur maupun pendanaan
5. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
6. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
7. Pengadaan Sarana UKS
8. Pengadaan Meubeleur siswa

9. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
10. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah
11. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
12. Penyelenggaraan Assesment Nasional (AN) Literasi dan Numerasi Berbasis Komputer
13. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).
14. Memaksimalkan Penyelenggaraan kegiatan kesetaraan/ non formal melalui PKBM dan SKB
15. Peningkatan Kapasitas Operator Sekolah
16. Penyediaan beasiswa bagi siswa dikdas yang kurang mampu
17. Menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi (PT)

23. HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka **Harapan Lama Sekolah** didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah kemungkinan anak tersebut akan mungkin bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Adapun tujuan dari harapan lama sekolah yaitu untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut:

$$EYS_a^t = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana:

- EYS_a^t : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;
 E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;
 P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;
 FK : Faktor koreksi.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah masyarakat kabupaten Solok tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 23.1 sebagai berikut:

Tabel. 23.1

Harapan Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
-----	-------------------	----------------	-------------------	-------------

1	Harapan Lama Sekolah	13,7	13,30	97,08
---	----------------------	------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 23.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Harapan Lama Sekolah adalah 13,7 Tahun dan terealisasi sebesar **13,30** dengan capaian kinerja sebesar **97,08%**

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 23.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Tahun)	Capaian (%)
1.	Harapan Lama Sekolah	13,04	13,05	13,30	100,07	100,07	100,24	15	88,66

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Berdasarkan tabel 23.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Harapan Lama Sekolah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan**. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah masyarakat kabupaten solok berada pada angka 13,04 tahun. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,01 yaitu menjadi 13,05. Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada 2022 sebesar 0,25 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **peningkatan**. Pada tahun 2020 capaian berada pada angka 100,07 persen. Pada tahun berikutnya capaian juga berda pada angka 100,07 persen. Peningkatan yang lebih terjadi pada tahun 2022 sebesar **100,24 persen**. Jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) adalah 15 Tahun maka capaian kinerja sebesar **88,66 persen**.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 23.3 di bawah ini:

Tabel. 23.3

Perbandingan Harapan Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Harapan Lama Sekolah	13,10	14,10	13,30

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Dari tabel 23.3 dapat dijelaskan bahwa Harapan Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2022 berada pada 13,30 tahun masih berada pada angka capaian provinsi Sumatera Barat yakni 14,10 tahun dan berada diatas angka Harapan Lama Sekolah secara nasional yaitu 13,10 tahun.

Pada tabel berikut terlihat perbandingan angka harapan lama sekolah kab/kota, provinsi, dan nasional:

TABEL 23.4

**PERBANDINGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KAB/KOTA, PROVINSI, DAN NASIONAL TAHUN 2022**

NO	Provinsi/Kabupaten/ Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Jenis Kelamin (Tahun)					
		Laki-laki		Perempuan		Rata-Rata	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	13.12	13.12	12.82	12.82	12.97	12.97
2	Pesisir Selatan	13.32	13.34	14.15	14.17	13.74	13.76
3	Solok	12.37	12.61	13.65	13.92	13.01	13.27
4	Sijunjung	12.19	12.21	13.36	13.62	12.78	12.92
5	Tanah Datar	13.59	13.87	14.65	14.89	14.12	14.38
6	Padang Pariaman	13.49	13.61	14.34	14.61	13.92	14.11
7	Agam	13.44	13.44	14.59	14.59	14.02	14.02
8	Lima Puluh Kota	12.93	13.03	13.87	13.88	13.40	13.46
9	Pasaman	12.53	12.80	13.50	13.73	13.02	13.27
10	Solok Selatan	12.48	12.58	13.35	13.36	12.92	12.97
11	Dharmasraya	12.36	12.43	12.63	12.76	12.50	12.60
12	Pasaman Barat	13.03	13.21	14.28	14.29	13.66	13.75
13	Kota Padang	16.33	16.34	16.87	16.88	16.60	16.61
14	Kota Solok	13.98	13.99	14.77	14.78	14.38	14.39
15	Kota Sawah Lunto	13.16	13.41	13.76	13.78	13.46	13.60
16	Kota Padang Panjang	14.72	14.72	16.02	16.02	15.37	15.37

17	Kota Bukittinggi	14.49	14.50	15.42	15.43	14.96	14.97
18	Kota Payakumbuh	14.19	14.20	14.66	14.68	14.43	14.44
19	Kota Pariaman	14.45	14.56	15.42	15.44	14.94	15.00
	SUMATERA BARAT	13.70	13.71	14.61	14.62	14.16	14.17
	INDONESIA/ NASIONAL	12.95	12.96	13.22	13.28	13.09	13.10

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/40/457/1/angka-harapan-lama-sekolah-hls-menurut-jenis-kelamin.html>

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Belum tercapinya target Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Masih banyaknya masyarakat usia diatas 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a) Ekonomi keluarga yang kurang mendukung
 - b) Akses kesekolah yang belum begitu mudah terutama pada daerah yang tergolong tertinggal
2. Motivasi masyarakat usia diatas 25 tahun dimasa lampau yang masih kurang untuk bersekolah.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang ada untuk memenuhi target angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Solok masih terbatas. Urusan pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan keuangan atau finansial. Terkait dengan dukungan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. Saat ini kabupaten Solok memiliki 361 Sekolah Dasar Negeri dan swasta. Dukungan personil guru sebanyak 3.250 orang. Dari jumlah tersebut. Sebagian besar diisi oleh guru-guru yang berstatus sebagai honor sekolah meskipun lebih dari 90% guru-guru tersebut sudah memiliki kualifikasi Strata Satu (S-1). Selanjutnya pada jenjang SMP kabupaten Solok memiliki tenaga guru sebanyak 1.190 orang dengan jumlah sekolah negeri dan swasta sebanyak 73 SMP. Pada umumnya sudah berkualifikasi S-1 namun masih banyak juga yang berstatus sebagai honorer. Dari gambaran data ringkas diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten Solok yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi masyarakat untuk bersekolah.

Untuk sumber daya keuangan Efisiensi dan Efektifitas sumber daya Indikator Rata-rata Lama Sekolah dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 23.5

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Rata-rata Lama Sekolah**

Berdasarkan Tabel 2.4 diketahui bahwa Indikator Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2022 target kinerja sebesar 13,7 dan terealisasi sebesar 13,30 dengan capaian kinerja sebesar 97,08% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 469.684.304.770 dan terealisasi sebanyak Rp. 446.838.196.534 dengan capaian **95,14%** dan terjadi efisiensi sebesar **4,86%** maka didapat efektifitas 104,04%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Solok adalah

Tabel. 26.6

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS				
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,775,580	100.00	55,638,510.00	85.89
2	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	360,121,376,161	100.00	345,522,190,629	95.95
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,700,000	100	14,700,000.00	100

4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,500,000	-	-	-
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,950,000	100.00	49,737,000.00	84.37
6	Penyediaan bahan Logistik Kantor	53,131,750	100.00	32,108,140.00	60.43
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,335,973	100.00	21,010,552.00	63.03
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390,991,000	100.00	293,967,874.00	75.19
9	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2,000,000	100.00	1,913,000.00	95.65
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,009,140	100.00	27,531,119.00	52.94
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324,114,000	100.00	298,148,150.00	91.99
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63,725,000	100.00	54,289,169.00	85.19
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,700,000	100.00	3,383,700.00	38.89
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1,800,000	100.00	1,800,000.00	100
	TOTAL REALISASI BAGIAN SEKRETARIAT	361,201,108,604	92.86	346,376,417,843	73.54
15	Penambahan Ruang Kelas Baru	367,492,100.00	100.00	346,209,235.00	94.21
16	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,536,147,400	100.00	1,510,334,998.00	98.32
17	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	3,025,331,300	100.00	2,943,844,021.00	97.31
18	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3,321,644,000	100.00	3,280,384,770.00	98.76
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7,418,812,500	100.00	7,228,093,477.00	97.43
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,556,823,100.00	100.00	1,355,182,972.00	87.05
21	Pengadaan Mebel Sekolah	1,370,174,000	100.00	1,178,556,500.00	86.02
22	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	573,423,200	100.00	515,527,500.00	89.90
23	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	5,747,056,000	100.00	5,695,188,064.00	99.10
24	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik	262,497,344	100.00	232,584,820.00	88.60

25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	7,724,710	100.00	5,703,000.00	73.83
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195,978,000	100.00	142,200,500.00	72.70
27	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	457,556,985	100.00	423,623,107.00	92.58
28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	44,239,932,037	100.00	39,825,016,486.00	90.02
	TOTAL REALISASI BIDANG SD	70,080,592,676	100.00	64,682,449,450	90.42
29	Pembangunan Laboratorium	976,930,500	100.00	783,196,450.00	80.17
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,840,655,397	100.00	1,794,742,155.00	97.51
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,200,604,000	100.00	2,598,373,200.00	81.18
32	Pengadaan Mebel Sekolah	1,211,667,500	100.00	1,149,803,500.00	94.89
33	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	299,990,000	100.00	296,647,000.00	98.89
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,792,862,000	100.00	1,651,942,000.00	92.14
35	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	380,804,330	100.00	283,942,050.00	74.56
36	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	156,438,000	100.00	112,518,000.00	71.92
37	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	304,830,500	100.00	179,283,380.00	58.81
38	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	384,866,500	100.00	317,341,500.00	82.45
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,561,438,283	100.00	14,694,452,144	94.43
	TOTAL REALISASI BIDANG SMP	26,111,087,010	100.00	23,862,241,379	85.71
40	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,490,722,100	100.00	1,479,536,268.00	99.25
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	3,919,500	100.00	3,582,500.00	91.40
42	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,879,030,500	100.00	5,850,507,500.00	99.51
43	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	286,402,080	100.00	260,722,716.00	91.03
44	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	3,387,326,100	100.00	3,095,241,559.00	91.38
	TOTAL REALISASI BIDANG PAUD dan KESETARAAN	11,047,400,280	100.00	10,689,590,543	87.60

45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	565,564,800	100.00	562,732,835.00	99.50
46	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	401,981,200	100.00	395,679,500.00	98.43
47	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	63,698,000	100.00	63,567,900.00	99.80
48	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	212,872,200	100.00	205,517,084.00	96.54
	TOTAL REALISASI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,244,116,200	100.00	1,227,497,319	98.57
	TOTAL REALISASI DISDIKPORA TAHUN 2022	469,684,304,770		446,838,196,534	95.14

Sumber: Data Laporan Keuangan Disdikpora Tahun 2022

Berdasarkan tabel laporan keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yakni sebesar 95, 14 persen. Dari jumlah anggaran yang tersedia di tahun 2022 sebanyak Rp. 469.684.304.770 dapat direalisasikan sebanyak 446.838.196.534.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Agar capaian sesuai bahkan melebihi target pada tahun berikutnya maka perlu disusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah:

1. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Pengadaan Sarana UKS
4. Pengadaan Meubeleur siswa
5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
6. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah
7. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
8. Penyelenggaraan Assesment Nasional (AN) Literasi dan Numerasi Berbasis Komputer
9. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).
10. Memaksimalkan Penyelenggaraan kegiatan kesetaraan/ non formal melalui PKBM dan SKB
11. Peningkatan Kapasitas Operator Sekolah
12. Penyediaan beasiswa bagi siswa dikdas yang kurang mampu
13. Menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi (PT)

24. ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah: rata rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (umur 15 Th- 49 Th) per 1000 wanita.

Untuk mendapatkan TFR terlebih dahulu diketahui *ASFR (Age Specifik Fertility Rate)* atau angka kelahiran menurut kelompok umur yaitu banyak kelahiran setiap seribu wanita pada kelompok umur tertentu seperti daftar dibawah ini.

Tabel. 24.1

ASFR (AGE SPECIPIK FERTILITY RATE) TAHUN 2022

N O	Kelompok Umur Wanita	Jumlah Wanita	Jumlah Kelahiran	ASFR
1	15 – 19	15.904	6	0
2	20 – 24	18.684	900	48
3	25 – 29	15.490	1.423	92
4	30 – 34	13.200	1.589	120
5	35 – 39	14.434	1.512	105
6	40 – 44	14.460	854	59
7	45 – 49	12.714	7	0
Total		104.886	6.291	424

Sumber data DPPKB&P3A, Disduk Capil dan Dinas Kesehatan Kab. Solok

Rumus ASFR = Jumlah kelahiran per kelompok Umur Wanita kali 1000. Jadi angka ASFR sebagai berikut:

ASFR:

$$1. \frac{6}{15.904} \times 1000 = 0,37$$

$$2. \frac{900}{18.684} \times 1000 = 48,16$$

$$3. \frac{1.423}{15.490} \times 1000 = 91,86$$

$$4. \frac{1.589}{13.200} \times 1000 = 120,37$$

$$5. \frac{1.512}{14.434} \times 1000 = 104,75$$

$$6. \frac{854}{14.460} \times 1000 = 59,05$$

$$7. \frac{7}{12.714} \times 1000 = 0,55$$

$$\text{TFR} = 5 (\sum \text{ASFR}_i) / 1000$$

$$\begin{aligned} \text{TFR} &= 5 (0,37 + 48,16 + 91,86 + 120,37 + 104,75 + 59,05 + 2,25) / 1000 \\ &= 5 (462,34) / 1000 \\ &= \underline{2,12} \end{aligned}$$

TFR dipengaruhi oleh UNMET NEED.

UNMET NEED adalah wanita usia subur (WUS) yang ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan anak lagi tapi tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Tabel. 24.2

Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB

No	Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB	Tahun 2021
1	IAT (Ingin Anak Ditunda)	3.962
2	TIAL (Tidak Ingin Anak Lagi)	3.016
3	PUS (Pasangan Usia Subur)	53.631

Sumber: DPPKBP3A

$$\begin{aligned} \text{Unmet Need} &= \frac{3.962 + 3.016}{53.631} \times 100 \\ &= \frac{6.978}{53.454} \times 100 = 13,01 \end{aligned}$$

Realisasi pencapaian target *Total Fertility Rate (TFR)* pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rumus:

$$\text{Capaian TFR} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Realisasi pencapaian meningkatnya Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 24.1 sebagai berikut:

Tabel 24.3

Total Fertility Rate (TFR)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,63	2,12	119,39

Berdasarkan tabel 24.3 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Angka Kelahiran

Total (TFR) sebesar 2,63 dan terealisasi sebesar 2,12 dengan capaian kinerja sebesar **119,39%** atau sangat baik.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel 24.4

Perkembangan Angka Kelahiran Total Fertility Rate (TFR)

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Rasio)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Rasio)	Capaian
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,8	2,31	2,12	95,81	87,83	119,39	2,30	107,83

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan tabel 24.4 dapat dilihat bahwa Angka Kelahiran Total (TFR) tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **penurunan** sebesar 0,19 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar 31,56%, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 2,30 dengan capaian kinerja 107,83% atau telah tercapai target akhir dari RPJMD.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Solok dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 24.5

Perbandingan Total Fertility Rate (TFR)

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,2	2,46	2,12

Sumber: BPS Sumbar (Data Nasional dan provinsi mengacu data tahun 2022)

Berdasarkan tabel 24.5 dapat dilihat bahwa TFR Kabupaten Solok pada Tahun 2022 (2,12) lebih baik jika atau berada dibawah jika dibandingkan dengan TFR Provinsi Sumatera Barat (2,46) dan TFR secara Nasional (2,2).

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN MENURUNKAN ANGKA TFR DALAM PROGRAM PELAYANAN KB

Tercapainya target Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Pemahaman PUS tentang manfaat ber-KB Cukup baik.
2. Meskipun Tenaga penyuluh KB masih kurang, tapi kinerjanya cukup baik.
3. Kapasitas Kader KB dalam pelayanan telah ditingkatkan sehingga kemampuan dalam memberikan KIE sudah baik.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB telah memadai.
5. *Coverage area* (keterjangkauan wilayah) pelayanan KB semakin luas, sampai mencapai daerah-daerah sulit atau terisolir di Kabupaten Solok, sehingga masyarakat yang dilayani semakin banyak.
6. Ketersediaan anggaran (DAK) cukup mendukung.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pencapaian target *Total Fertility Rate (TFR)* di Kabupaten Solok pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Meskipun Tenaga penyuluh KB masih kurang, tapi dengan mengoptimalkan fungsi kader KB disetiap wilayah pelayanan.
2. Anggaran yang tersedia digunakan dengan tepat sasaran.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB telah memadai.
4. Penguatan kemitraan dengan jejaring seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PKK, TNI, BNN, IBI dll.

Tabel 24.6

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator Level Maturitas Angka Kelahiran Total (TFR)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	2,63	2,12	119,39 %	6.312.125.134	5.286.525.167	83,75%
Rata-rata capaian						83,75%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						16,25%

Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%	142,56 %
---	--------------------

Berdasarkan Tabel 24.4 diketahui bahwa Indikator Level Maturitas Angka Kelahiran Total (TFR) terjadi efisiensi keuangan sebesar 5,39% dengan efektifitas 142,56%.

F. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Program dan Kegiatan serta anggaran untuk mencapai target Total Fertility Rate (TFR) adalah sebagai berikut:

Tabel. 24.7

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	4.056.632.784	3.548.504.547	87,47
1.	Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal	1.138.525.850	950.975.500	68.68
2.	Kegiatan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB(PKB/PLKB)	355.200.000	348.300.000	98.06
3.	Kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan Alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.911.044.484	1.665.383.947	87.15
4.	Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah kabupaten/Kota	651.862.450	583.842.100	89.57

	dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB			
II	Program Pengendalian penduduk	305.752.550	347.456.198	97,53
5.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pemerintah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas penduduk	87.289.450	130.937.150	98,98
6.	Kegiatan , Pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kabupaten/Kota	218.463.100	216.510.049	96,68
7.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam pelaksanaa pelayanan dan pembinan kesertaan Ber-KB	552.000.000	347.456.198	97,53
III	Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga sejahtera (KS)	1.949.739.800	1.390.564.422	71,32
8.	Kegiatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	1.949.739.800	1.390.564.422	71,32
Total		6.312.125.134	5.286.525.167	83,75

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023.

Berdasarkan tabel 24.6 dapat dilihat bahwa dari ketersediaan anggaran untuk program pembinaan keluarga berencana sebanyak 6.312.125.134, terealisasi 5.286.525.167,-

G. RENCANA TINDAK LANJUT YANG DILAKUKAN DALAM MEMPERTAHANKAN TOTAL FERTILITY RATE (TFR) PROGRAM PELAYANAN KB

1. Kegiatan KIE yang telah dilaksanakan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan, terutama terhadap calon-calon potensial PUS (Pasangan Usia Subur).
2. Meningkatkan kompetensi Kader.
3. Optimalisasi pemanfaatan dana DAK (APBN) sesuai dengan kondisi daerah.
4. Perlunya penambahan tenaga penyuluh KB yang direkrut oleh BKKBN.
5. Penguatan kemitraan lintas sektor.
6. Dukungan komitmen dari Pemerintah Daerah.

25. USIA HARAPAN HIDUP

Usia Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH merupakan salah satu dimensi dasar dalam membentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia) selain pengetahuan dan standar hidup yang layak.

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam menilai kinerja kesehatan oleh pemerintah. Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Apabila ditemukan UHH yang rendah disuatu daerah maka pemerintah harus mengadakan lebih banyak program pembangunan, kesehatan dan program sosial lainnya seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. Usia Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Beberapa penelitian menyatakan bahwa UHH dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. BPS melaporkan UHH penduduk Indonesia saat lahir mencapai 71,85 tahun pada tahun 2022, angka tersebut meningkat 0.28 tahun dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 71.57 tahun.

Berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya UHH suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu . Usia Harapan Hidup (UHH) dapat diukur dengan formulasi Expectation of life (Eo). Dimana data yang digunakan adalah:

1. Jumlah kematian penduduk antara usia x dan x+1
2. Penduduk yang bertahan hidup pada usia tepat x tahun

Constructing Life Table dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 25.1
Constructing Life table

x	I_x	d_x	q_x	L_x	T_x	e^o_x
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	100.000	2.256	0.02256	98.109	7.324.402	73.24402
1	97.744	155	0.00158			
65+		21				

Ket:

- x = umur penduduk
- q_x = peluang penduduk meninggal antara umur x dan x+1
- I_x = penduduk yang bertahan hidup pada umur tepat x
- d_x = jumlah kematian penduduk antara umur x dan x+1
- L_x = Tahun kehidupan (years lived) antara umur x dan x+1
- T_x = Tahun total kehidupan (total years lived) setelah umur tepat x
- x^o_x = Harapan hidup (expectation of life) jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat x

Cara menghitung q₀ =

$$q_x = \frac{d_x}{I_x} \quad q_0 = \frac{2256}{100000} = 0.02256$$

Cara Menghitung I_x, I_d dan q_x berikutnya

$$L_{x+1} = I_x * (1 - q_x) \quad \Rightarrow \quad I_1 = 100000 * (1 - 0.02256) = 97.744$$

Cara Menghitung L_x dan T_x

$$L_x = \frac{l_x + l_{x+1}}{2} \quad L_0 = \frac{100000 + 97744}{2} = 98.109$$

$$T_x = \sum_{i=x}^w L_i = 7.324.402$$

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian target angka usia harapan hidup pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 25.2

Angka Usia Harapan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Usia harapan hidup	69.01	69.19	100.26

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

Berdasarkan tabel 25.2 dapat dijelaskan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69.19 tahun mengalami peningkatan 0,4 tahun dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 68.79 tahun. Capaian kinerja pada tahun 2022 tercapai, dimana tahun 2022 target Usia Harapan Hidup (UHH) adalah 69.01 tahun dan teralisasi sebesar 69.19 tahun dengan capaian kinerja 100.26%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM

Tabel. 25.3

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Tahun)	Capaian
1.	Usia Harapan Hidup	68.58	68.79	69.19	100.11	100	100.26	69,87	99.02

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

Berdasarkan tabel 25.3 dapat dilihat bahwa Realisasi Usia Harapan Hidup tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **69.19 tahun** dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **100.26%** serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) adalah 69,87 tahun maka capaian kinerja sebesar **99.02%**

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Usia Harapan Hidup Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 25.4 di bawah ini:

Tabel. 25.4

Perbandingan Usia Harapan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Usia Harapan Hidup	71.85	69.90	69.19

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru.html>

Dari tabel 25.4 dapat dijelaskan bahwa rata-rata Usia Harapan Hidup Kabupaten Solok Tahun 2022 masih berada di bawah UHH Provinsi Sumatera Barat sebesar 69.90 dan UHH Nasional sebesar 71.85. Apabila dibandingkan dengan 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se Sumatera Barat UHH di Kabupaten Solok berada pada peringkat 7 (tujuh) yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel. 25.5

Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Wilayah	Angka Harapan Hidup (Tahun)		
		2022	2021	2020
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	69,90	69,59	69,47
	Kabupaten			
1	Agam	72.89	72.53	72,37
2	Dharmasraya	71.90	71.53	71,33
3	Pesisir Selatan	71,25	70,86	70,86
4	Tanah Datar	70.49	70.12	69,94
5	Lima Puluh Kota	70,08	69,84	69,79
6	Padang Pariaman	69,34	68,97	68,79
7	Kab.Solok	69,19	68,79	68,58
8	Solok Selatan	68.38	68.01	67,81
9	Pasaman Barat	68,25	67.94	67,82
10	Pasaman	67.95	67.59	67,40
11	Sijunjung	66,70	66,36	66,21
12	Kepulauan Mentawai	64,93	64,73	64,73

	Kota			
13	Bukittinggi	74,82	74,50	74,38
14	Payakumbuh	74,14	73,84	73,74
15	Kota Solok	74,06	73,73	73,61
16	Padang	73,93	73,69	73,65
17	Padang Panjang	73,03	72,82	72,82
18	Pariaman	70,67	70,67	70,28
19	Sawahlunto	70,40	70,10	70,00

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/26/362/1/umur-harapan-hidu-saat-lahir-metode-baru-html>

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya target Usia Harapan Hidup Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Dibandingkan dari tahun 2021 angka kematian ibu menurun dari 148/100.000 KH (10 orang) menjadi 78,95/100.000 KH (5 orang) pada tahun 2022 dan jumlah kematian bayi masih di angka yang sama dengan tahun 2021 yaitu 64 orang atau 10.10/1.000 KH.

Adanya jaminan persalinan untuk ibu hamil, bersalin dan bayi menjadi faktor salah satu menurunnya Angka Kematian Ibu. Penurunan AKI dan AKB dapat dicapai dengan menciptakan calon ibu yang sehat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat seperti mempersiapkan ibu layak hamil, terdeteksi komplikasi kehamilan sedini mungkin di pelayanan kesehatan, persalinan di fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk bayi yang dilahirkan yang sudah dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Solok

Pelayanan rujukan sebagai upaya penyelamatan Ibu dan Bayi yang mengalami komplikasi diperkuat dengan membangun jejaring RS, dimana RS vertikal dan propinsi melakukan pendampingan tata kelola klinis dan tata kelola manajemen. Selain itu untuk memperkuat sistem layanan kesehatan didorong dengan pemenuhan sarana dan parasaran ibu dan bayi di fasilitas kesehatan serta memperkuat sistem rujukan yang telah dilakukan di RS TNI/POLRI/Swasta

Pilar-pilar dalam upaya penurunan AKI dan AKB ini tidak akan terwujud tanpa adanya kenvergensi, konsolidasi dan koordinasi

kesehatan Ibu dan Bayi baik di tingkat pusat, propinsi, kab/kota sampai nagari dan jorong melalui lintas sektor dan program

2. Menurunnya Prevalensi Stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun) dan Balita

Prevalensi stunting pada Baduta (Bawah Dua Tahun) di Kabupaten Solok mengalami penurunan dari 13.5 pada tahun 2021 menjadi 11.95 pada tahun 2022, begitu juga dengan prevalensi Balita stunting juga mengalami penurunan, berdasarkan EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) pada tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Solok 16.20 turun menjadi 15.14 pada tahun 2022, sedangkan berdasarkan SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) prevalensi stunting turun dari 40.1 pada tahun 2021 menjadi 24.2 pada tahun 2022. Penurunan angka prevalensi stunting ini menunjukkan adanya peningkatan status gizi pada Baduta dan Balita.

Balita/Baduta yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang tidak maksimal, menjadi anak yang lebih rentan terhadap penyakit dan dimasa depan dapat beresiko pada menurunnya produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan mempelebar ketimpangan. Masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak.

3. Menurunnya angka kesakitan

Angka kesakitan/morbiditas adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan yang dimaksud adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Capaian angka kesakitan Kabupaten Solok pada tahun 2021 adalah 16.66 mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 11.39, hal ini menggambarkan bahwa capaian kinerja untuk angka kesakitan Kabupaten Solok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang digunakan untuk menentukan keberhasilannya antara lain adalah Angka Prevalensi Penyakit. Prevalensi adalah gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada jangka waktu tertentu di kelompok masyarakat tertentu, diantaranya:

- Prevalensi Tuberculosis:
Prevalensi Tuberculosis di Kab. Solok pada tahun 2022 sebesar 12.98/100.000 penduduk, angka prevalensi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Kemenkes 30.47/100.000 penduduk. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk prevalensi Tuberculosis ini baik yaitu 157.40%
 - Prevalensi Hipertensi
Target prevalensi hipertensi pada tahun 2022 sebesar 31.40%, sementara angka prevalensi hipertensi di Kabupaten Solok 15.99% pada tahun 2022, angka tersebut menggambarkan capaian kinerja untuk prevalensi hipertensi baik karena berada dibawah target yang ditetapkan Kemenkes RI dengan capaian kinerja 146.94%.
 - Prevalensi Diabetes Melitus
Untuk prevalensi Diabetes Militus pada tahun 2022 mencapai angka 3.31% melebihi target yang ditetapkan oleh Kemenkes RI yaitu 1.6%. Walaupun ada peningkatan pada angka prevalensi Diabetes Militus ini akan tetapi capaian SPM untuk indikator ini 100%. Dapat diartikan bahwa semua penderita DM di Kabupaten Solok mendapat pelayanan sesuai standar
 - Prevalensi HIV
Prevalensi HIV di Kabupaten Solok 2022 mencapai 2.38/100.000 penduduk melebihi target yang ditetapkan Kemenkes RI yaitu 1.75/100.000 penduduk. Sama halnya dengan Diabetes Militus capaian SPM untuk indikator ini juga 100%, dimana semua penderita HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
4. Peningkatan capaian SPM
Pada tahun 2021 rata-rata capaian SPM Bidang kesehatan 73.19% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 95.30%. SPM bidang kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) indikator yaitu pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap ibu hami, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes militus, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, penderita tuberculosis dan orang dengan resiko terinfeksi HIV.
 5. Penyelidikan epidemiologi dan penanganan KLB/Wabah

Semua kejadian KLB/Wabah dan bencana sudah dilakukan penanganan sesuai standar. Pada tahun 2022 terdapat KLB/wabah terdapat beberapa Kejadian Luar Biasa antara lain:

- KLB DBD (kematian) di Puskesmas Jua Gaek
- KLB Campak di Puskesmas Singkarak dan Tnjung Binkung
- KLB Keracunan di SDN 13 Sumani di wilayah kerja Puskesmas Singkarak

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target angka usia harapan hidup di Kabupaten Solok pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Tabel. 25.6

Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Indikator UHH (Usia harapan Hidup)

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
UHH (Usia harapan Hidup)	69.01	69.19	100.26	69.416.976.82	60.653.614.28	87,38%
				5	4.91	
Rata-rata capaian						83,75%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						12,88%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						114,74%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi anggaran untuk capaian UHH (Usia harapan Hidup) Kabupaten Solok tahun 2022 yaitu sebesar **12.88%** dengan Efektifitas **114,74%**.

2. Efektifitas sarana dan prasarana

Kondisi sarana, prasarana dan alat kesehatan dapat dilihat melalui aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan).

Tabel. 25.7

Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UPT Puskesmas

NO	Puskesmas	Status	Kelengkapan
----	-----------	--------	-------------

			Sarana	Parasara na	Alat Kesehatan	Kumulas i
1	Simpang Tanjung Nan IV		80	37.04	64.22	69.39
2	Singakarak	Rawata n	66.67	40.74	62.78	62.52
3	Talang Babungo	Rawata n	80	50.91	61.77	69.8
4	Bukit Sileh	Rawata n	100	25.45	55.67	74.82
5	Alahan Panjang	Rawata n	66.67	44.44	64.41	63.54
6	Sulit Air	Rawata n	88.89	31.48	54.48	69.38
7	Muara Panas	Rawata n	95	38.18	52.71	72.4
8	Sirian	Rawata n	77.78	51.85	51.22	64.56
9	Talang	Rawata n	93.33	27.78	48.58	68.88
10	Sirukam	Rawata n	82.22	27.78	45.44	62.06
11	Selayo		88.89	42.59	42.05	65.53
12	Tanjung Bingkung		82.22	27.78	40.28	60
13	Jua Gaek		100	44.44	35.97	68.83
14	Batu Bajanjang	Rawata n	100	38.89	32.02	66.7
15	Panningahan	Rawata n	93.33	35.19	34.09	63.82
16	Kayu Jao		84.44	40.74	38.28	61.61
17	Paninjuan		91.11	37.04	31.59	61.9
18	Sungai Lasi		93.33	50	31.28	64.18
19	Sungai Nanam		100	53.7	30.81	67.69
						66.19

Sumber: Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Dari tabel 25.7 dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam memberikan pelayanan

kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada tahun 2022 sebesar **66.19%**. Dapat disimpulkan terdapat efektivitas sarana dan prasarana sebesar **33.81%**. Up date ASPAK ini dijadikan dasar oleh Kementerian Kesehatan untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan setiap tahunnya

Efektivitas Sarana dan Prasarana = Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran

$$100.26\% - 66.19\% = 33.81\%$$

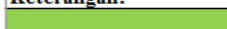


3. Efektifitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

Berdasarkan PMK No 43 Tahun 2019 terdapat 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan yang harus tersedia di Puskesmas. Pada tahun 2022 dapat dilihat sebaran SDMK Kab. Solok sebagai berikut:

Tabel. 25.8 Tenaga Kesehatan UPT Puskesmas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat distribusi SDMK

Nama Fasyankes	Status Pusk		Jenis	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesling	Promkes	Farmasi	Gizi	ATLM	Status
	rawat inap	non rawat inap		Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	Standar PMK 43 Tahun 2019	
SUNGAI NANAM		√	Pedesaan	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
SURIAN	√		Terpencil	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
ALAHAN PANJANG	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
TALANG BABUNGO	√		Terpencil	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
SIRUKAM	√		Terpencil Sangat	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
BATU BAJANJANG	√		Terpencil	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
BUKIT SILEH	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
SIMPANG TANJUNG NANAN		√	Pedesaan	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
TALANG	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
JUA GAEK		√	Pedesaan	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
KAYU JAO		√	Pedesaan	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
MUARA PANAS	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
SUNGAI LASI		√	Terpencil	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
TANJUNG BINGKUNG		√	Pedesaan	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
SELAYO		√	Perkotaan	1	1	5	4	1	2	1	1	1	
SULIT AIR	√		Terpencil	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
PANINJAUAN		√	Terpencil	1	1	5	4	1	1	1	1	1	
SINGKARAK	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
PANINGGAHAN	√		Pedesaan	2	1	8	7	1	1	1	2	1	
Jumlah				30	19	128	109	19	20	19	30	19	393

Keterangan:
 = Lebih
 = Sesuai
 = Kurang

yang belum merata pada masing-masing puskesmas karena terdapat kelebihan dan kekurangan tenaga di puskesmas tertentu. Persentase ketersediaan SDMK yang terdiri dari ASN, THL, Tim Nusantara Sehat dan sukarela di Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar **85%**. Dapat disimpulkan terdapat efektivitas SDMK sebesar **20.26%**

Efektivitas SDMK = Capaian Kinerja – Realisasi Anggaran

$$100.26\% - 85\% = 15.26\%$$

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian target angka usia harapan hidup pada tahun 2021 adalah:

1. Pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dengan advokasi penguatan gerakan masyarakat hidup sehat di tingkat kecamatan, pengembangan dan penggandaan media gerakan masyarakat hidup sehat, penggerakan masyarakat di semua tatanan tentang edukasi, perilaku sehat, deteksi dini penyakit, lingkungan sehat, pangan sehat dan perbaikan gizi.
2. penanggulangan stunting di tahun 2022 antara lain:
 - a. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kuarang Energi Protein (KEK) dan balita kurang gizi, pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil untuk mencegah anemia pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, pemberian vitamin A dan obat cacing pada bayi dan balita.
 - b. Program ASI Eksklusif dengan mendorong IMD (Inisiasi Menyusui Dini) melalui pemberian ASI jolong/kolustrum dan memastikan edukasi kepada ibu untuk memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan dan juga mendorong ibu untuk melakukan penerusan pemberian ASI hingga usia anak berusia 23 Bulan dengan didampingi oleh pemberian MP-ASI
 - c. Pembentukan pos gizi yang tujuannya sebagai pemberdayaan masyarakat nagari untuk meningkatkan status gizi balita yang masih kurang. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi gizi seimbang, praktek memasak yang sehat dengan menggunakan *bahan pangan lokal*, cara penyajian dan pemberian makanan pada balita sesuai usia. Pos Gizi ini merupakan salah satu UKBM/wahana pemberdayaan
 - d. Melakukan intervensi terhadap permasalahan spesifik atau pengendalian terhadap faktor yang paling dominan yang menyebabkan stunting pada balita seperti anak-anak dengan BBLR, anak laki-laki, tidak disusui secara eksklusif selama 6 bulan, orang tua yang berpendidikan rendah, ekonomi sosial yang rendah, orang tua dengan kekurangan gizi, dan sanitasi yang buruk dirumah.

- e. Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Solok yang di ikuti oleh Lintas Sektor antara lain, Dinas KB, yang terkait tentang perkembangan tumbuh kembang anak di PAUD, DPMN dengan pemberdayaan masyarakat, Dinas PUPR dengan pembangunan sarana sanitasi untuk penekanan penyakit berbasis lingkungan dan lai-lain
 - f. Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih melalui program STBM dengan pemberdayaan masyarakat sampai ke tingkat jorong
 - g. Menyediakan Jaminan Kesehatan, Jaminan Persalinan, Bantuan dan Jaminan Sosial bagi keluarga miskin melalui program Beras masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Prgram Keluarga Harapan (PKH)
 - h. Edukasi kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan promosi kesehatan tentang gizi masyarakat, kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, dll
 - i. Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil intervensi yang dilaksanakan
3. Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan pelaksanaan kunjungan keluarga, melakukan updating data PIS-PK by name by adres, melakukan intervensi lanjutan terhadap keluarga berisiko dan melakukan monitoring dan evaluasi terintegrasi seluruh program.
 - b. Pelayanan Kesehatan keluarga, antara lain pelayanan kesehatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, kesehatan reproduktif dan KB serta peningkatan kesehatan lanjut usia.
 - c. Pendidikan gizi melalui sosialisasi, pembinaan, edukasi dan konseling pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan gizi seimbang (isi piringku)
 - d. Surveilans gizi dilakukan saat penimbangan rutin di posyandu, sweeping balita yang tidak hadir ke Posyandu dan pelacakan serta konfirmasi gizi buruk dan kasus gizi lainnya.
 - e. Kegiatan upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam bentuk pembinaan pos UKK dan pembinaan kebugaran jasmani bagi

anak sekolah, pekerja, calon jemaah haji dan masyarakat serta pembinaan kelompok olahraga

4. Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit
 - a. Penyelidikan epidemiologi dan respon terhadap wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB) kurang dari 24 jam
 - b. Melakukan deteksi dini dan penemuan kasus terhadap penyakit menular dan tidak menular dengan melakukan screening terhadap kelompok beresiko seperti: HIV/AIDS, TB Paru, Hipertensi, Diabetes Militus dan penyakit menular lainnya. Melakukan deteksi dini penyakit tidak menular di posbindu PTM, Posyandu Lansia dan kegiatan-kegiatan lainnya
 - c. Pencegahan penyakit dan pengendalian faktor resiko dengan memberikan pelayanan imunisasi rutin pada bayi dan balita, BIAS (Bulan Imunisasi Anak sekolah) pada anak sekolah serta sosialisasi imunisasi kepada orang tua, guru dan stakeholder terkait
 - d. Pengendalian penyakit dengan melakukan konseling dan deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan napza, pendampingan penderita penyakit menular menahun, pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza
 - e. Pemberdayaan masyarakat dengan pembekalan kapasitas kader kesehatan untuk peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - f. Khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 upaya yang dilaksanakan adalah antara lain:
 - a) Komonikasi, informasi, edukasi, sosialisasi kampanye, publikasi tentang Covid-19
 - b) Kordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19
 - c) Peningkatan kapasitas penanggung jawab surveilens Kabupaten dan Puskesmas khususnya tracing dan mekanisme data
 - d) Penyelidikan epidemiologi kasus Covid-19
 - e) Monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian Covid-19
5. Melakukan penyediaan tenaga dengan perjanjian tenaga bagi tenaga yang tidak mencukupi dilapangan seperti tenaga promkes, sanitasi, nutrisionis dan lain-lain.

6. Peningkatan mutu pelayanan puskesmas melalui peningkatan pengetahuan petugas tentang pemahaman standar akreditasi puskesmas sehingga pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas terstandar.
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak RS Sakit di Luar Kabupaten Solok. Program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok adalah kerjasama dengan rumah sakit pemerintah di Luar kabupaten Solok dalam melayani pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan kegiatan berupa antara lain peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah dalam melayani pasien jamkesmas.

Program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 ini bersumber dari anggaran DAU dan DAK. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah disinkronisasikan/diselaraskan mulai dari jorong, puskesmas dan Dinas Kesehatan seperti:

1. Menerapkan aplikasi e-Kohort Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN). e-Kohort KIA adalah sistem pemantauan terintegrasi bagi ibu, bayi dan balita yang mencakup implementasi pencatatan-el, pemantauan-el dan aplikasi-el pelayanan KIA berbasis teknologi informasi sedangkan MPDN adalah sebuah notifikasi aplikasi mengenai kesehatan maternal yang bertujuan untuk mengurangi kematian ibu. Dengan dilakukannya integrasi aplikasi tersebut diharapkan pelaporan data pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Solok dapat tersampaikan dengan baik demi mendapatkan feedback segera guna menghadirkan keluaran pelayanan kesehatan terbaik di Kabupaten Solok dalam rangka pengendalian AKI dan AKB
2. Pembentukan pos gizi yang tujuannya sebagai pemberdayaan masyarakat nagari untuk meningkatkan status gizi balita yang masih kurang. Bentuk kegiatannya berupa sosialisasi gizi seimbang, praktek memasak yang sehat dengan menggunakan *bahan pangan lokal*, cara penyajian dan pemberian makanan pada balita sesuai usia. Pos Gizi ini merupakan salah satu UKBM/wahana pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan melibatkan lintas sektor dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Solok.
3. Dalam rangka menurunkan angka kesakitan HIV/AIDS adalah dengan mendeteksi HIV/AIDS sejak dini. Salah satu kegiatan yang dilakukan

adalah Mobile VCT berupa pencarian atau penemuan penderita HIV/AIDS secara mobile/keliling yang menyoar ke sasaran kelompok resiko. Kegiatan ini dilaksanakan okeh Dinas Kesehatan Kabupaten Solok dengan melibatkan lintas sektor terkait terutama dalam menjangkau kelompok resiko HIV/AIDS.

4. Melakukan inovasi pelayanan publik setiap tahunnya yang berkaitan langsung dengan penurunan AKI dan AKB, penurunan stunting, penurunan angka kematian dan kesakitan.
5. Untuk meningkatkan capaian SPM dan meningkatkan indeks keluarga sehat dimana salah satunya adalah peningkatan pelayanan pada penderita hipertensi dan diabetes militus dapat berobat secara teratur. Dengan sudah adanya penerapan BLUD di masing-masing puskesmas maka dibentuk apotek PRB (Program Rujuk Balik) untuk pasien yang sudah stabil di beberapa lokus puskesmas dengan mempertimbangkan jumlah kepesertaan PRB dan anggaran BLUD yang memadai untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Kegiatan integrasi PIS-PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga) dengan Perkesmas (Perawatan Kesehatan Masyarakat) dalam rangka meningkatkan fungsi keluarga dalam upaya menurunkan AKI dan AKB, penurunan stunting serta menurunkan angka kesakitan dan kematian.

Anggaran Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Usia Harapan Hidup di Kabupaten Solok pada tahun 2022 adalah

Tabel. 25.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	Penurunan AKI (Angka Kematian Ibu)	2.009.636.305,00	1.089.971.912,00	54,24
	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Hamil	1.174.184.600,00	882.692.412,00	75,17
	Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	835.451.705,00	207.279.500,00	24,81
2	Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi)	2.142.423.600,00	1.959.595.150,00	91,47

	Pengelolaan Kesehatan bayi baru lahir	180.422.000,00	106.465.400,00	59,01
	Pengelolaan Kesehatan balita	1.962.001.600,00	1.853.129.750,00	94,45
3	Penurunan Prevalensi Stunting	4.008.557.197,00	3.453.224.052,00	86,15
	Pengelolaan Gizi Masyarakat	1.107.365.313,00	934.025.000,00	84,35
	Pengelolaan Promosi Kesehatan	1.635.463.455,00	R1.421.127.166,00	86,89
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemeberdayaan Masyarakat	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	150.843.500,00	142.099.826,00	94,20
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pembangunan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	202.165.000,00	172.430.000,00	85,29
4	Penurunan Angka Kesakitan	15.162.814.587,00	12.871.662.743,00	84,89
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	35.430.000	26.639.200	75,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus	44.640.000	35.589.000	79,72
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ	119.027.200	77.956.700	65,49
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	402.703.700	262.114.750	65,09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	126.501.500	83.536.800	66,04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.583.076.881	992.971.450	62,72
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	685.117.426	532.318.000	77,70
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	78.280.200	71.696.850	91,59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	143.852.000	128.650.000	89,43
Pengelolaan Pelayanan kesehatan Kerja dan Olah raga	107.011.500	59.225.500	55,34
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya	73.485.305	61.308.550	83,43
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	126.825.000	78.560.000	61,94
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	52.835.000	29.980.000	56,74
Pengelola Upaya Kesehatan khusus	341.099.800	249.133.440	73,04
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (P2P)	1.109.669.115	862.448.575	77,72
Pengelolaan Jaminan Kesehatan	10.055.499.960	9.270.332.528	92,19
Pengambilan dan Pengiriman	14.240.000	5.400.000	37,92

	Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional			
	Invenstigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	17.830.000	4.400.000	24,68
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon wabah	45.690.000	39.401.400	86,24
5	Peningkatan terhadap standar pelayanan	46.093.545.136,00	41.279.160.427,91	89,56
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	33.011.344.008,00	30.756.475.055,00	93,17
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	11.189.042.518,00	8.951.398.186,91	80,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	624.398.110,00	593.152.102,00	95,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	248.285.500,00	178.530.800,00	71,91
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	106.475.000,00	102.635.602,00	96,39
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	914.000.000,00	696.968.682,00	76,25
		69.416.976.825,00	60.653.614.284,91	87,38

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Solok Tahun 2022

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Pada dasarnya memperpanjang Angka Harapan Hidup suatu wilayah tidak hanya tergantung pada otoritas pemerintah setempat, tetapi juga

didukung oleh perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan promosi kesehatan antara lain:

1. Mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang, merupakan satu cara untuk membantu memperpanjang UHH
2. Tetap aktif bergerak atau berolah raga setidaknya 30 menit per hari dengan jenis olah raga yang sesuai kondisi tubuh
3. Istirahat yang cukup yaitu 7-9 jam setiap malamnya
4. Jangan merokok dan kurangi konsumsi minuman beralkohol karena bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit yang dapat memicu kematian lebih cepat
5. Kelola stres dengan baik. Stres memang merupakan sesuatu yang sulit dihindari tetapi bisa dikelola dengan meluangkan waktu untuk menyegarkan pikiran dengan berlibur dan teknik relaksasi.

Rencana Tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan angka usia harapan hidup di Kabupaten Solok adalah:

1. Pelaksanaan telekonsultasi dalam rangka penurunan AKI dan AKB dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Telekonsultasi adalah suatu terobosan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui media daring.
2. Kunjungan dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis anak ke Puskesmas minimal 1 (satu) kali sebulan
3. Penguatan Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) sebagai upaya untuk meningkatkan Upaya kesehatan Masyarakat di kabupaten Solok
4. Melakukan kerjasama dengan FKTP lainnya yang ada di kabupaten Solok (Klinik Swasta, Dokter Praktek Mandiri dan Bidan Praktek Mandiri) dan pihak lain (Polres, KPPN, BPTP, Balibu, PT. Aqua dan Panti Andam Dewi) terkait pelayanan kesehatan terutama deteksi dini penyakit menular dan tidak menular berupa skrining kesehatan terutama pada kelompok umur beresiko
5. Peningkatan capaian SPM bidang kesehatan salah satunya dengan membuat ketetapan/komitmen dengan Kepala daerah terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan yang menyangkut skrining deteksi terhadap orang beresiko terutama penyakit menular (TB Paru dan HIV) dan penyakit tidak menular (Hipertensi dan Diabetes Militus) serta pengadaan Bahan Medis Pakai Habis (BMHP) terkait kegiatan skrining tersebut

6. Peningkatan SDMK melalui on job training atau refresing penanggung jawab program dan pemenuhan SDMK melalui rekrutmen (PPPK) dan permintaan tenaga melalui Program Nusantara Sehat
7. Penguatan sistem rujukan baik vertikal maupun horizontal dengan Sistem Rujukan Terpadu (Sisrute)
8. Pemenuhan ketersediaan sarana (12.43%), parasarana (60.74%) dan alat kesehatan (53.81%) melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dengan membuat usulan rencana kebutuhan.
9. Melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Solok.

26. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki. Angka RLS juga berguna untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 25 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun (Standar UNDP).

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Tobing (dalam Hastarini, 2005), mengemukakan bahwa orang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih 18 tahun, diukur dengan lamanya waktu untuk sekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah.

Untuk mengetahui angka rata-rata lama sekolah dapat digunakan formula sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Solok tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 26.1 sebagai berikut:

Tabel. 26.1

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Capaian (%)
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,90	7,89	99,87

Sumber: Data BPS Tahun 2023

Berdasarkan tabel 26.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **belum tercapai** 100 persen, dimana pada Tahun 2022 target Angka Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten Solok adalah **7,90 tahun** dan terealisasi sebesar **7,89 tahun** dengan capaian kinerja sebesar **99,87%**.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 26.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (Tahun)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (Tahun)	Capaian
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,86	7,87	7,89	100,2 5	100,1 2	100,2 5	8,10	97,40

Sumber: Data BPS Tahun 2023

Berdasarkan tabel 26.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan**. Pada tahun 2021 angka capaian sebanyak 7,86 tahun dan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan sebesar **0,01**. Sedangkan pada tahun 2022 peningkatan juga terjadi sebanyak **0,02** pada angka **7,89 tahun**. Selanjutnya capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **100,25 persen** serta jika realisasi

tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) adalah 8,10 tahun maka capaian kinerja telah mencapai **97,40 persen**.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 26.3 di bawah ini:

Tabel. 26.3
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,89	9,18	8,69

Sumber: Data BPS Tahun 2023

Dari tabel 26.3 dapat dijelaskan bahwa Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok Tahun 2022 berada pada angka 7,89 tahun atau setara kelas VII SMP. Angka tersebut masih jauh tertinggal dari capaian rata-rata provinsi Sumatera Barat sebanyak 9,18 tahun atau diatas kelas 9 SMP. Sementara pada tingkat nasional capain Angka Rata-Rata Lama Sekolah sudah mencapai angka 8,69 tahun atau hamper setara kelas IX SMP. Angka ini juga jauh meninggalkan angka capaian kabupaten Solok pada tahun 2022. Perbandingan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

PERBANDINGAN CAPAIAN ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH KAB/KOTA, PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2022

NO	Provinsi/Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
		2021	2022
1	Kepulauan Mentawai	7.20	7.48
2	Pesisir Selatan	8.27	8.43
3	Solok	7.87	7.89
4	Sijunjung	8.12	8.30
5	Tanah Datar	8.62	8.90

6	Padang Pariaman	7.88	8.16
7	Agam	8.97	8.98
8	Lima Puluh Kota	8.07	8.08
9	Pasaman	8.10	8.11
10	Solok Selatan	8.32	8.41
11	Dharmasraya	8.55	8.56
12	Pasaman Barat	8.27	8.55
13	Kota Padang	11.59	11.60
14	Kota Solok	11.04	11.35
15	Kota Sawah Lunto	10.32	10.43
16	Kota Padang Panjang	11.63	11.92
17	Kota Bukittinggi	11.34	11.63
18	Kota Payakumbuh	10.81	10.82
19	Kota Pariaman	10.67	10.78
	SUMATERA BARAT	9.07	9.18
	INDONESIA/ NASIONAL	8.54	8.69

Source Url: <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>

D. ANALISIS PENYEBAB PENURUNAN KINERJA

Belum tercapinya target Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor yaitu

1. Masih banyaknya masyarakat usia diatas 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor:
 - a) Ekonomi keluarga yang kurang mendukung.
 - b) Akses kesekolah yang belum begitu mudah terutama pada daerah yang tergolong tertinggal.
2. Motivasi masyarakat usia diatas 25 tahun dimasa lampau yang masih kurang untuk bersekolah.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi dan Efektifitas sumber daya yang ada untuk memenuhi target angka rata-rata lama sekolah di kabupaten Solok masih terbatas. Urusan pendidikan tidak bisa dilepaskan dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan keuangan atau finansial. Terkait dengan dukungan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik dan

kependidikan. Saat ini kabupaten Solok memiliki 361 Sekolah Dasar Negeri dan swasta. Dukungan personil guru sebanyak 3.250 orang. Dari jumlah tersebut. Sebagian besar diisi oleh guru-guru yang berstatus sebagai honor sekolah meskipun lebih dari 90% guru-guru tersebut sudah memiliki kualifikasi Strata Satu (S-1). Selanjutnya pada jenjang SMP kabupaten Solok memiliki tenaga guru sebanyak 1.190 orang dengan jumlah sekolah negeri dan swasta sebanyak 73 SMP. Pada umumnya sudah berkualifikasi S-1 namun masih banyak juga yang berstatus sebagai honorer. Dari gambaran data ringkas diatas dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat mempengaruhi mutu dan kualitas pendidikan di kabupaten Solok yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi masyarakat untuk bersekolah.

Selanjutnya dari sisi keuangan bahwa pendidikan yang baik dan berkualitas memang membutuhkan dukungan financial yang cukup dan memadai. Pada tahun 2022 pendanaan yang tersedia untuk pengelolaan pendidikan Rp. 65.444.910.730. Dari jumlah tersebut alokasi dana untuk pengelolaan pendidikan sekolah dasar sebanyak Rp. 39.994.963.650. Dan untuk pengelolaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak Rp. 14.463.159.800. Dari jumlah tersebut banyak dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah, manajemen sekolah, BOS Sekolah, dan Pembinaan Minat dan Bakat Siswa serta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Solok adalah **(diantaranya peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana atau program dan kegiatan lainnya)**

Tabel. 26.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI				KET
			FISIK	KEUANGAN			
			(Rp)	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS						
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64,775,580	100	55,638,510.00	85.89		

2	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	360,121,376,161	100	345,522,190,629	95.95	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14,700,000	100	14,700,000.00	100	
4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11,500,000	-	-	-	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58,950,000	100	49,737,000.00	84.37	
6	Penyediaan bahan Logistik Kantor	53,131,750	100	32,108,140.00	60.43	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33,335,973	100	21,010,552.00	63.03	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	390,991,000	100	293,967,874.00	75.19	
9	Penyediaan Jasa Surat menyurat	2,000,000	100	1,913,000.00	95.65	
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,009,140	100	27,531,119.00	52.94	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324,114,000	100	298,148,150.00	91.99	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63,725,000	100	54,289,169.00	85.19	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8,700,000	100	3,383,700.00	38.89	
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	1,800,000	100	1,800,000.00	100	
	TOTAL REALISASI BAGIAN SEKREATARIAT	361,201,108,604	92.86	346,376,417,843	73.54	
15	Penambahan Ruang Kelas Baru	367,492,100.00	100	346,209,235.00	94.21	
16	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1,536,147,400	100	1,510,334,998.00	98.32	
17	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	3,025,331,300	100	2,943,844,021.00	97.31	
18	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3,321,644,000	100	3,280,384,770.00	98.76	
19	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7,418,812,500	100	7,228,093,477.00	97.43	
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1,556,823,100.00	100	1,355,182,972.00	87.05	
21	Pengadaan Mebel Sekolah	1,370,174,000	100	1,178,556,500.00	86.02	
22	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	573,423,200	100	515,527,500.00	89.90	

23	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	5,747,056,000	100	5,695,188,064.00	99.10	
24	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta didik	262,497,344	100	232,584,820.00	88.60	
25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	7,724,710	100	5,703,000.00	73.83	
26	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	195,978,000	100	142,200,500.00	72.70	
27	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	457,556,985	100	423,623,107.00	92.58	
28	Pengelolaan Dana BOS Sekolah dasar	44,239,932,037	100	39,825,016,486.00	90.02	
	TOTAL REALISASI BIDANG SD	70,080,592,676	100	64,682,449,450	90.42	
29	Pembangunan Laboratorium	976,930,500	100	783,196,450.00	80.17	
30	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1,840,655,397	100	1,794,742,155.00	97.51	
31	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3,200,604,000	100	2,598,373,200.00	81.18	
32	Pengadaan Mebel Sekolah	1,211,667,500	100	1,149,803,500.00	94.89	
33	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	299,990,000	100	296,647,000.00	98.89	
34	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,792,862,000	100	1,651,942,000.00	92.14	
35	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	380,804,330	100	283,942,050.00	74.56	
36	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	156,438,000	100	112,518,000.00	71.92	
37	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	304,830,500	100	179,283,380.00	58.81	
38	Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah	384,866,500	100	317,341,500.00	82.45	
39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15,561,438,283	100	14,694,452,144	94.43	
	TOTAL REALISASI BIDANG SMP	26,111,087,010	100	23,862,241,379	85.71	
40	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,490,722,100	100	1,479,536,268.00	99.25	
41	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	3,919,500	100	3,582,500.00	91.40	
42	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5,879,030,500	100	5,850,507,500.00	99.51	
43	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	286,402,080	100	260,722,716.00	91.03	

44	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	3,387,326,100	100	3,095,241,559.00	91.38	
	TOTAL REALISASI BIDANG PAUD dan KESETARAAN	11,047,400,280	100	10,689,590,543	87.60	
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	565,564,800	100	562,732,835.00	99.50	
46	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	401,981,200	100	395,679,500.00	98.43	
47	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	63,698,000	100	63,567,900.00	99.80	
48	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam kegiatan Kepramukaan	212,872,200	100	205,517,084.00	96.54	
	TOTAL REALISASI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA	1,244,116,200	100	1,227,497,319	98.57	
	TOTAL REALISASI DISDIKPORA TAHUN 2022	469,684,304,770		446,838,196,534	95.14	

Sumber: Laporan Keuangan Kab. Solok Tahun 2022

Berdasarkan tabel laporan keuangan diatas dapat dijelaskan bahwa relaisasi keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 yakni sebesar 95, 14 persen. Dari jumlah anggaran yang tersedia di tahun 2022 sebanyak Rp. 469.684.304.770 dapat direalisasikan sebanyak 446.838.196.534.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Agar capaian sesuai bahkan melebihi target pada tahun berikutnya maka perlu disusun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Solok adalah:

1. Pembangunan Gedung sekolah Dikdas
2. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
3. Pengadaan Sarana UKS
4. Pengadaan Meubeleur siswa
5. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
6. Penyediaan Dana Pengembangan sekolah
7. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa
8. Penyelenggaraan Assesment Nasional (AN) Literasi dan Numerasi Berbasis Komputer
9. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Biaya Operasional sekolah).
10. Memaksimalkan Penyelenggaraan kegiatan kesetaraan/ non formal melalui PKBM dan SKB
11. Peningkatan Kapasitas Operator Sekolah

12. Penyediaan beasiswa bagi siswa dikdas yang kurang mampu
13. Menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi (PT)

27. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Pengertian indikator dan formulasi indikator

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 27.1 sebagai berikut:

Tabel. 27.1

Indeks Pembangunan Gender

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender	96,38	96,19	99,80%

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan tabel 27.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tidak tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,38 dan terealisasi sebesar **96,19** dengan capaian kinerja sebesar **99,80%**. (Data yang digunakan masih data tahun 2021 karena untuk tahun 2022 data dari BPS masih belum rilis)

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 27.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender	96,18	96,19	96,19	100,45	99,80	99,80	96,76	99,41

Sumber: Dinas PPKBP3A Kab. Solok

Berdasarkan tabel 27.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Pembangunan Gender tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami persamaan sebesar 96,19 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar

99,80 serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 96,76 maka capaian kinerja sebesar 99,41%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 27.3 di bawah ini:

Tabel. 27.3

Perbandingan Indeks Pembangunan Gender

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
1.	Indeks Pembangunan Gender	91,27	94,34	96,19

Sumber: BPS Nasional

Dari tabel 27.3 dapat dijelaskan bahwa Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok Tahun 2022 sebesar 96,19 dan IPG Provinsi sebesar 94,34 jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IPG Kabupaten Solok sebesar 96,19 dapat dilihat bahwa IPG Kab. Solok melampaui atau lebih tinggi dari angka IPG Provinsi dan IPG Nasional. (Data yang digunakan masih data tahun 2021 karena untuk tahun 2022 data dari BPS masih belum rilis)

D. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN ATAU PENURUNAN KINERJA

Tidak tercapainya target Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Belum Adanya sinergi antar OPD Kab. Solok dalam Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dilakukan dengan terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kab. Solok Tahun 2021 dan belum maksimalnya penyediaan serta, pemanfaatan data terpilah gender pada OPD Kab. Solok oleh semua OPD tersedia data terpilah.
2. Kurang pengetahuan masyarakat terutama tentang kebijakan daerah yang responsif gender.
3. Belum maksimalnya pelatihan peningkatan keterampilan terhadap perempuan dalam pengembangan industri rumahan sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian perempuan.

4. Sinergi antara OPD dan organisasi wanita di Kab. Solok dan kesadaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan bekerjasama melalui organisasi yang dibina yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Solok, Dharmawanita Persatuan (DWP) Kab. Solok, Ikatan Keluarga Anggota (IKA) DPRD Kab. Solok belum maksimal.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk pencapaian target Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Solok pada tahun 2022 telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Mengumpulkan bahan GAP dan GBS OPD dalam penerapan Perencanaan Penganggaran yang responsif Gender.
2. Memberikan pemahaman lintas OPD dalam mendukung program pemberdayaan perempuan.
3. Memberdayakan perempuan produktif dalam mengolah produk berbasis Industri Rumahan untuk meningkatkan perekonomian.
4. Pemberdayaan terhadap organisasi wanita di kabupaten Solok.

Tabel 27.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Pembangunan Gender**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	96,38	96,19	99,80%	278.433.350	261.724.415	93,99%
				Rata-rata capaian		93,99%
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						6,01%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						106,18%

Berdasarkan Tabel 27.4 diketahui bahwa Indikator Indeks Pembangunan Gender pada Tahun 2022 target kinerja sebesar 96,38 dan terealisasi sebesar 96,19 dengan capaian kinerja sebesar 99,80% sedangkan pada anggaran sebanyak Rp. 278.433.350 dan terealisasi sebanyak Rp. 261.724.415 dengan capaian **93,99%** dan terjadi efisiensi sebesar 6,01% maka didapat efektifitas **106,18%**.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

Tabel. 27.4

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
1	PROGRAM: PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	53.056.000	52.780.000	99,50%
	<i>Kegiatan:</i> Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	53.056.000	52.780.000	99,50%
	<i>Sub Kegiatan:</i> Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	53.056.000	52.780.000	99,50%
2	PROGRAM: PERLINDUNGAN PEREMPUAN	163.032.150	153.424.265	94,10
	<i>Kegiatan:</i> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.294.600	64.875.717	91,00
	<i>Sub Kegiatan:</i> Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.244.600	63.075.717	99,00
	<i>Sub Kegiatan:</i> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.050.000	1.800.000	22,00
	<i>Kegiatan:</i> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.737.550	88.548.548	96,50
	<i>Sub Kegiatan:</i> Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.737.550	88.548.548	96,50
3	PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	62,345,200	55,520,150	89,00

Kegiatan: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62,345,200	55,520,150	89,00
Sub Kegiatan: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	62,345,200	55,520,150	89,00

Sumber: DPA Dinas PPKBP3A Kab. Solok

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Solok adalah:

1. Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).
2. Meningkatkan capaian program dan kegiatan bidang PPA untuk mendukung pembangunan gender baik disektor pendidikan, kesehatan, perekonomian.
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pelatihan dan pembinaan pengembangan industri rumahan dalam membantu meningkatkan perekonomian perempuan.
4. Meningkatkan peran dan kerjasama dengan organisasi-organisasi wanita atau kemasyarakatan dan Lembaga Non Pemerintah yang ada di Kab. Solok dalam pemberdayaan perempuan

28. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin (*Headcount Index/PO*) jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). GK mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan hasil survey SPKKD (Survey Paket Komoditi Kebutuha Dasar). GK yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2020 adalah Rp547.240 (kapita/bulan). Pengertian indikator dan formulasi indikator.

Persentase penduduk miskin dapat diukur dengan formulasi:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

Dimana:

α adalah 0,1,2

z adalah garis kemiskinan

y_i adalah rata rata pengeluaran per kapita sebulan yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$

q adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n adalah jumlah penduduk.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 28.1 sebagai berikut:

Tabel. 28.1

Persentase Penduduk Miskin

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Persentase Penduduk Miskin	7,31	7,12	102,59%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel 28.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,31% dan terealisasi sebesar 7,12 dengan capaian kinerja sebesar 102,59%, terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Solok sebesar 0.89%

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 28.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target (%)	Capaian
1.	Persentase Penduduk Miskin	7,81	8,01	7,12	94,45	94,05	102,59	6,31	87,16%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok

Berdasarkan tabel 28.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Persentase Penduduk Miskin tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,89% dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar **8,54%**, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 6,31% maka capaian kinerja sebesar 87,16%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dapat dilihat pada tabel 28.3 di bawah ini:

Tabel. 28.3

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin

No.	Indikator Kinerja	Nasional	Provinsi	Kabupaten Solok
-----	-------------------	----------	----------	-----------------

1.	Persentase Penduduk Miskin	9.57%	6,04%	7,12%
----	----------------------------	-------	-------	-------

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok

Dari tabel 28.3 dapat dijelaskan bahwa Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Solok Tahun 2022 cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dan berada di bawah Nasional dengan nilai persentase penduduk miskin secara nasional sebesar 9.57%.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Tercapainya/ tidak tercapainya target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Solok tahun 2022 disebabkan oleh:

1. Berakhirnya pandemi covid 19 menyebabkan masyarakat mulai bangkit sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu perekonomian masyarakat berangsur-angsur meningkat sehingga angka kemiskinan mulai menurun.
2. Dampak pandemi Covid -19 dan inflasi akibat kenaikan harga BBM pemerintah pusat maupun daerah fokus pada perlindungan sosial melalui pemberian bantuan untuk mengurangi pengeluaran keluarga serta pemberian jaminan Sosial melalui BPJS Gratis.
3. Verifikasi dan Validasi data DTKS mulai dilaksanakan secara rutin dan berkala sehingga data lebih valid dan akurat.
4. Cepat tanggapnya Dinas Sosial dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Solok sehingga dampak terhadap resiko meningkatnya angka kemiskinan dapat diminimalisir

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Untuk melakukan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Solok pada tahun 2022, dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah:

1. Melakukan kerjasama antar instansi vertikal dan horizontal yang melibatkan OPD teknis lainnya antara lain: Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi UMKM, Dinas Sosial, dll.
2. Pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat
3. Mendorong alokasi anggaran program dan kegiatan yang lebih terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dalam bentuk

pemberian bantuan sosial, PKH, BPNT, BPJS dll baik yang bersumber dari APBD/APBN.

4. Peningkatan peran dan pemberdayaan pilar-pilar sosial di masyarakat seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), karang taruna, dll.

Tabel 28.4

**Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Persentase Angka Kemiskinan**

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Targ et	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	7,31	7,12	102,59 %	2.138.917 .195	2.023.813. 769	94,61%
Rata-rata capaian						94,61 %
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan – 100 %)						5,39%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						108,43%

Berdasarkan Tabel 28.4 diketahui bahwa Indikator Persentase Angka Kemiskinan terjadi efisiensi keuangan sebesar 5,39% dengan efektifitas 108,43%.

F. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Solok adalah:

1. Melakukan verifikasi dan validasi penerima manfaat program bantuan sosial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga tidak ada lagi data penerima progam yang ganda dan tidak tepat sasaran.
2. Melakukan pengintegrasian penyaluran bantuan social (Bansos) kepada masyarakat sehingga dapat mengurangi duplikasi penerima bantuan.
3. Pengalokasian anggaran bansos masyarakat pendukung yang berasal dari APBD Kabupaten Solok selain bansos dari provinsi dan pusat.
4. Peningkatan layanan dan rujukan kesejahteraan sosial sehingga dapat memberikan kemudahan dalam layanan rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial.
5. Adapun Capaian Pelayanan yang ada di Dinas Sosial Tahun 2022 yaitu: Penerima Bantuan PKH sebanyak 16.742 Keluarga, Penerima Bantuan

Sembako 23.783 Keluarga, Non Bansos sebanyak 118.526 Jiwa, Penerima PBI-JK sebanyak 129.109 Jiwa, JAMKESKAB 2.099 Jiwa, JKSS sebanyak 20.924 Jiwa serta Sebaran Data DTKS yang di Kabupaten Solok yaitu sebanyak 66.600 Keluarga

Tabel 28.5

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2022

No	Program dan Kegiatan		Alokasi dan Realisasi Anggaran			
			Sumber Dana	Jumlah	Realisasi	%
1	2		6	7	8	9
A	Program Pemberdayaan Sosial		APBD	309.522.700	279.346.262	90,25
	I	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota		70.997.000	69.792.300	98,30
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		70.997.000	69.792.300	98,30
	II	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		238.525.700	209.553.962	87,85
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		238.525.700	209.553.962	87,85
B	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.294.129.225	1.222.341.020	94,45
	III	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		503.619.050	466.366.008	92,60
	3	Penyediaan Permakanan		219.461.100	192.248.067	87,60
	4	Penyediaan Alat Bantu		35.767.050	32.121.000	92,60

	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		142.766.400	136.818.891	95,83
	6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		105.642.500	104.178.050	98,63
	IV	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		790.510.175	755.975.012	95,63
	7	Pemberian Layanan Kedaruratan		492.873.775	488.463.048	99,11
	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Kesehatan Dasar		41.595.000	38.771.750	93,21
	9	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		82.495.400	81.374.000	98,64
	10	Pemberian Layanan Rujukan		173.546.000	147.366.214	84,91
C	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			212.924.200	208.034.225	97,70
	V	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		212.924.200	208.034.225	97,70
	11	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		65.675.150	62.514.915	95,19
	12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		142.249.050	145.519.310	98,83
E	Program Penanganan Bencana		APBD	322.341.070	314.092.262	97,44
	VI	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota		183.054.750	178.301.540	97,40
	13	Penyediaan Makanan		183.054.750	178.301.540	97,40
	VII	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		139.286.320	135.790.720	97,49
		Koordinasi, Sosialisasi Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		139.286.320	135.790.720	97,49
Jumlah				2.138.917.195	2.023.813.769	94,61

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Solok

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Solok adalah

1. Melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan agar data yang ada lebih abdate.
2. Memberikan bantuan sosial berupa Rastra, BPNT, PKH dan BPJS
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui bantuan permodalan.
4. Meningkatkan anggaran perlindungan sosial melalui perluasan program bantuan sosial dan premi asuransi Kesehatan masyarakat miskin.

29. INDEKS DESA MEMBANGUN

Penetapan target Indikator kinerja Utama disusun dengan perhitungan bahwa Nagari di Kabupaten Solok sampai tahun 2026 diharapkan di Kabupaten Solok terdapat peningkatan Nagari Status Maju menjadi Nagari Status Mandiri sebanyak 5 Nagari dan tidak ada lagi Nagari dengan Status Tertinggal

Untuk Teknik Penghitungan Indeks Desa Membangun sesuai dengan SOP Indeks Desa Membangun yang disusun oleh Kemendes PDTT bahwa, Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 – 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

1. Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Sosial ini ditujukan untuk melihat tahapan kemajuan perkembangan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Modal Sosial dengan penilaian indicator terdiri dari beberapa sub indicator. Range indek untuk nilai IKS ini terdiri dari 0 sampai 5.

Dengan rumus perhitungan:

$$I_x = \frac{\sum_1^n Skor \ X}{n_x \ X \ 5}$$

L_x = Indeks

N = jumlah indikator

2. Indek Ketahanan Ekonomi

Indeks ini ditujukan untuk melihat perkembangan tingkat kemajuan Nagari dibidang Ekonomi Masyarakat dimana terdiri dari beberapa Sub Indikator dengan range terdiri dari 0 sampai 5.

Dengan rumus perhitungan:

$$I_x = \frac{\sum_1^n \text{Skor } X}{n_x \times 5}$$

L_x = Indeks

N = jumlah indikator

3. Indeks Ketahanan Lingkungan

Pada Indeks Ketahanan Lingkungan dapat dilihat kesiapan Nagari dalam menghadapi bencana alam dan non Alam serta mitigasi bencana.

Dengan rumus perhitungan:

$$I_x = \frac{\sum_1^n \text{Skor } X}{n_x \times 5}$$

L_x = Indeks

N = jumlah indikator

Penghitungan Indeks Desa membangun

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari jumlah rata-rata Indeks ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

IDM = Indeks Desa Membangun

IKS = Indeks Ketahanan Sosial

IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL = Indeks ketahanan Lingkungan

- Penentuan Status IDM

Klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Pendekatan dan intervensi yang dapat diterapkan pada status Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibandingkan dengan Status Desa Tertinggal.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI.

Realisasi pencapaian meningkatnya anggaran maksimal kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel 29.1 sebagai berikut:

Tabel. 29.1

Indeks Desa Membangun

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	0,678	0,691	101,92%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Berdasarkan tabel 29.1 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada Tahun 2022 **tercapai**, dimana pada Tahun 2022 target Indeks Desa Membangun sebesar 0,678 dan terealisasi sebesar 0,691 dengan capaian kinerja sebesar 101,92%.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD.

Tabel. 29.2

Perkembangan Meningkatnya Anggaran Maksimal Kebutuhan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian (%)			Tahun 2026 (Target akhir RPJMD)	
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	Target	Capaian
1.	Indeks Desa Membangun	0,6542	0,672	0,691	NA	100	101,92	0,712	97,05%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari

Berdasarkan tabel 29.2 dapat dilihat bahwa Realisasi Indeks Desa Membangun tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar 0,019 dan untuk capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir mengalami **peningkatan** sebesar 1,92%, serta jika realisasi tahun ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) sebesar 0,712 maka capaian kinerja telah mencapai 97,05%.

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Berdasarkan tabel diatas ada peningkatan status Nagari dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 101,92 %, Peningkatan nilai indeks ini dipengaruhi oleh 6 Nagari yang berhasil meningkatkan Status Nagari, diantaranya 2 Nagari berhasil meningkatkan status nagarinya dari nagari maju menjadi nagari mandiri, sehingga jumlah nagari bertambah menjadi 3 nagari mandiri, selanjutnya ada jumlah nagari maju bertambah dari 18 nagari menjadi 22 nagari sementara untuk nagari berkembang tetap

sebanyak 43 nagari dan nagari tertinggal berkurang dari 12 nagari menjadi 6 nagari. Sementara untuk nagari sangat tertinggal di Kabupaten Solok sudah tidak ada lagi..

Keberhasilan Nagari yang dapat meningkatkan status Nagari disebabkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan berpedoman kepada hasil rekomendasi dari Indeks Desa Membangun, sehingga nilai Indeks Desa Membangun dapat terpenuhi.

D. Perbandingan antara Realisasi Tahun ini dengan Standar Nasional /Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Untuk Realisasi Indeks Desa Membangun tingkat Nasional berdasarkan target dari Kemendes PDTT yaitu meningkatkan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, untuk Kabupaten Solok turut berperan dalam mendukung target yang telah ditetapkan Kemendes PDTT, sedangkan pada Tahun 2022 Nagari di Kabupaten Solok yang telah berhasil mengurangi status nagari tertinggal dari 12 nagari menjadi sebanyak 6 Nagari.

Tabel. 29.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tahun	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	Jumlah
1	2021	-	12	43	18	1	74
2	2022	-	6	43	22	3	74

Sumber: Kemendes PDTT Tahun 2022

Di Sumatera Barat target kinerja Indeks Desa Membangun tahun 2021 adalah meningkatkan 10 Nagari berstatus maju menjadi Nagari dengan Status Mandiri dan mengentaskan 2 Nagari dengan status Sangat Tertinggal menjadi Nagari berstatus Tertinggal.

Untuk Kabupaten Solok Tahun 2022, Pada tahun 2022 ikut berperan dalam mencapai target Provinsi yaitu 2 Nagari berhasil meningkatkan status dari Maju ke Mandiri yaitu Nagari Talang dan Nagari Koto baru, sehingga untuk tahun 2022 sudah ada 3 (tiga) Nagari Mandiri yang ada di Kabupaten Solok dan tidak ada lagi Nagari dengan Status Nagari Sangat Tertinggal.

Sedangkan untuk realisasi capaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Kota Se-Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel. 29.4

Realisasi capaian IDM se- Provinsi Sumatera Barat.

Tahun 2022

RANGKIN G	KABUPATEN	IDM	
		STATUS	NILAI
1	Tanah Datar	Maju	0,7977
2	Agam	Maju	0,7807
3	Pariaman	Maju	0,7744
4	Pasaman Barat	Maju	0,768
5	50 Kota	Maju	0,7627
6	Solok Selatan	Maju	0,7474
7	Sijunjung	Maju	0,7462
8	Sawahlunto	Maju	0,7433
9	Pasaman	Maju	0,7401
10	Darmasraya	Maju	0,7326
11	Pesisir Selatan	Maju	0,7273
12	Padang Pariaman	Maju	0,7122
13	Solok	Berkembang	0,691
14	Kepulauan Mentawai	Berkembang	0,6643

Sumber: Data Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel 29.4 dapat dilihat bahwa tingkat perkembangan Nagari di Kabupaten Solok masih dalam kategori berkembang.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU PENINGKATAN/ KINERJA

Peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dipengaruhi oleh Pemerintah Nagari telah menjadikan Hasil Rekomendasi Indeks Desa Membangun sebagai dasar acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan kewenangan Nagari.

Dilihat dari capaian hasil realisasi kinerja target tercapai, adanya koordinasi yang baik antara DPMN, Bapelitbang Kabupaten Solok dan TA P3MD di Kabupaten Solok dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat Nagari.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Dengan sumber daya yang tersedia pada DPMN saat sekarang ini, bisa dikatakan belum dapat menunjang pencapaian target IDM yang telah ditetapkan sampai tahun 2026 karena status IDM Kabupaten Solok masih dalam status berkembang. Hal ini masih terbatas karena sumber daya manusia yang ada di DPMN, anggaran yang ditetapkan untuk penunjang kegiatan ini, fasilitasi pendukung seperti operasional masih belum memadai.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan kegiatan juga telah dilakukan efisiensi, seperti kegiatan yang mengharuskan turun kelapangan dapat dilakukan dengan cara mengundang Pemerintah Nagari, Tenaga Ahli P3MD serta pihak terkait untuk melakukan rapat koordinasi hal tersebut selain dapat mengefisienkan kegiatan juga dapat mengefisienkan anggaran.

Memfaatkan media sosial atau media elektronik dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pemerintahan nagari, Tenaga Ahli P3MD dan pihak terkait untuk peningkatan status atau pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 29.5
Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Indikator Indeks Desa Membangun

IKU	Kinerja			Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Angka Kelahiran Total (TFR)	0,678	0,691	101,92 %	56.006.100	55.064.500	98,32%
				Rata-rata capaian		98,32 %
Tingkat Efisiensi: (%capaian keuangan - 100 %)						1,68%
Tingkat Efektivitas: (Capaian kinerja: Capaian Keuangan) x 100%						103,66%

Berdasarkan Tabel 29.5 diketahui bahwa Indikator Indeks Desa Membangun terjadi efisiensi keuangan sebesar 1,68% dengan efektifitas 103,66%.

G. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA.

Pada Tahun 2022 tidak ada kegiatan khusus yang menunjang dari pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja ini, karena kurangnya ketersediaan anggaran pada DPMN Kab. Solok Tahun 2022. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembinaan dan monitoring dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah pada Sekretariat DPMN, digunakan untuk semua kegiatan pada DPMN Kab. Solok Tahun 2022.

Tabel. 29.6
Program Kegiatan yang Menunjang Indikator

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
-----	-------------------	----------

	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Nagari	- Program Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Nagari	20.487.600	19.751.000	96,00
		- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	35.518.500	35.313.500	99,42

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022

Pada indikator ini dapat kita lihat bahwa untuk Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri hanya memiliki anggaran sebesar Rp. 56.006.100,- (Lima Puluh Enam Juta Enam Ribu Seratus Rupiah) dan anggaran tersebut berbagi untuk beberapa kegiatan lainnya, seperti Fasilitasi Pengukuran Indeks Desa Membangun, Penyusunan Profil Nagari, Epdeskel dan juga untuk fasilitasi kegiatan Musrenbang Nagari, dimana pada Musrenbang Nagari tersebut DPMN mengarahkan Nagari untuk pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa untuk meningkatkan status Nagari tersebut.

Pada tahun 2022 realisasi anggaran untuk mencapai Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 97,71% atau Rp. 55.064.500,- (Lima Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

H. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN

Mendorong adanya tindaklanjut dari hasil rekomendasi Indeks Desa Membangun sesuai kewenangan masing-masing, sehingga peningkatan Indeks Desa Membangun dapat tercapai.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi target pencapaian indikator ini adalah:

1. Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya status IDM bagi Perangkat Nagari.
2. Melaksanakan kerjasama lintas stakeholders dalam rangka mengimplemetasikan Strategi Daerah untuk menuju kemandiraian desa
3. Melaksanakan pemetaan permasalahan disetiap dimensi (IKE, IKL, IKS) dan indikator IDM hingga ke tingkat Nagari per-wilayah Kecamatan, agar intervensi yang dilakukan baik melalui kebijakan, program maupun kegiatan oleh stakeholders tepat sasaran.
4. Merumuskan program pengembangan sistem monitoring perkembangan IDM yang terintegrasi, dalam sistem pengelolaan data dan informasi se- Kabupaten Solok yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembangunan Nagari dalam rangka memberikan arah kebijakan yang memanfaatkan Dana Desa atau sumber finansial serta sumber daya lainnya untuk mendorong kemandirian desa.
5. Kerjasama Bapelitbang, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Nagari serta Pendampingan Desa untuk mengkompilasi data, pengolahan data serta penyusunan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan dalam rangka mendorong kemandirian desa.
6. Memfokuskan arah pembangunan masing-masing Nagari sesuai dengan hasil identifikasi permasalahan di setiap indikator IDM.
7. Melibatkan partisipasi masyarakat sebagai fungsi kontrol.
8. Pembagian kewenangan antara Nagari, Kabupaten, Provinsi, Pusat perlu di pertegas.
9. Melibatkan sektor swasta dalam mendukung status peningkatan IDM.
10. Mendorong adanya penghargaan kepada Nagari dan Perangkat Nagari yang berhasil mencapai status Desa Mandiri.

2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran daerah Kabupaten Solok dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang memuat data/ informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No. IKK	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	CAPAIAN
1.a.1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	78.200834
1.a.2	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.1586616

1.a.3	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95.8456073
1.a.4	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi 2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan 6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) 7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1 <p>&nbsp;</p>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100
1.b.1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.2689598
1.b.2	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
1.b.3	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal 	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97.0360637

1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan 	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	51.1734445
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat 	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara 	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	66.9196851

1.f.2	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan 2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang 3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki 4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan 5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial 6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia 	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100
2.a.1	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. 2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja. 3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota. 	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0
2.a.2	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster 2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi 3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan 4. Persentase LPK yang terakreditasi 5. Persentase LPK yang memiliki perizinan 6. Jumlah penganggur yang dilatih 7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	16.372093
2.a.3	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total 	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	517.1780584

2.i.5	Pertanahan	<p>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</p> <p>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</p> <p>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</p> <p>4. Dokumen Izin membuka tanah</p> <p>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</p>	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0
2.i.6	Pertanahan	<p>1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota</p> <p>2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek</p> <p>3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.</p> <p>4. Dokumen Izin membuka tanah</p> <p>5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota</p>	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100
2.j.1	Lingkungan Hidup	<p>1. Hasil perhitungan kab/kota terhadap:</p> <p>a. Indeks kualitas air (IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> <p>c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73.02
2.j.2	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	10.8652921
2.j.3	Lingkungan Hidup	<p>1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota</p> <p>3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota</p> <p>4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat</p> <p>5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.</p>	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>1. Penerbitan akta perkawinan</p> <p>2. Penerbitan akta perceraian</p> <p>3. Penerbitan akta kematian</p> <p>4. Penyajian data kependudukan</p> <p>&nbsp;</p>	Perekaman KTP elektronik	98.0708926

2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<p>1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan</p> <p>2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun</p> <p>3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)</p> <p>4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)</p> <p>5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK</p> <p>&nbsp;</p>	TFR (Angka Kelahiran Total)	2
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<p>1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP</p> <p>2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif</p> <p>4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan</p> <p>&nbsp;</p>	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	50.5459552
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<p>1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah</p> <p>2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)</p>	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11.1675529
2.n.1	Perhubungan	<p>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</p> <p>&nbsp;</p>	Rasio konektivitas kabupaten/kota	897
2.n.2	Perhubungan	<p>1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</p> <p>2. Terlaksananya pelayanan uji berkala</p> <p>3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi</p> <p>4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota</p> <p>&nbsp;</p>	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	98

2.v.1	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	75.65
2.v.2	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) <p>&nbsp;</p>	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2
2.w.1	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN <p>&nbsp;</p>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75
2.w.2	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK 5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK 6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK <p>&nbsp;</p>	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	47

3.b.3	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Tingkat hunian akomodasi 	129.3854033
3.b.4	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 	0.8232675

3.f.1	Perdagangan	<p>1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :</p> <p>a. Pusat perbelanjaan</p> <p>b. Toko swalayan</p> <p>2. Persentase penerbitan TDG</p> <p>3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG</p> <p>4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota</p> <p>6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu</p> <p>7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</p> <p>8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)</p> <p>&nbsp;</p>	42.2023477
3.f.2	Perdagangan	<p>1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase kinerja realisasi pupuk</p> <p>&nbsp;</p>	12.2355725
3.f.3	Perdagangan	<p>1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</p> <p>2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</p> <p>&nbsp;</p>	16700.69416
3.g.1	Perindustrian	<p>1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota</p> <p>&nbsp;</p>	102.6683609
3.g.2	Perindustrian	<p>1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP</p>	0
3.g.3	Perindustrian	<p>1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan</p> <p>2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan</p>	<p>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</p>	100

